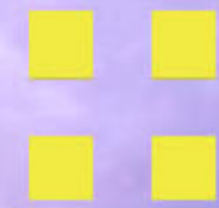


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAWA BARAT BAG. II





PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI JAWA BARAT BAG. II





Peta Pembinaan Provinsi Jawa Barat Bagian II

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88614-6-0

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Naomi Ratna Sari, S.Si
2. Anthonius Riva, SE, M.Si
3. Raden Kus Yoga Bimasakti, S.STP

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN SUBANG	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN SUKABUMI	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN SUMEDANG	20
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	21
Aspek Satuan Inovasi Daerah	22
D. KABUPATEN TASIKMALAYA	28
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	30
E. KOTA BANDUNG	35
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	36
Aspek Satuan Inovasi Daerah	37
F. KOTA BANJAR	44
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	44
Aspek Satuan Inovasi Daerah	45
G. KOTA BEKASI	51
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	52
Aspek Satuan Inovasi Daerah	53
H. KOTA BOGOR	60
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	61
Aspek Satuan Inovasi Daerah	62
I. KOTA CIMAH	69
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	69
Aspek Satuan Inovasi Daerah	70
J. KOTA CIREBON	77
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	78
Aspek Satuan Inovasi Daerah	79

K. KOTA DEPOK	84
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	85
Aspek Satuan Inovasi Daerah	86
L. KOTA SUKABUMI	92
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	93
Aspek Satuan Inovasi Daerah	94
M. KOTA TASIKMALAYA	102
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	102
Aspek Satuan Inovasi Daerah	103

BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Kabupaten Subang	109
B. Kabupaten Sukabumi	109
C. Kabupaten Sumedang	109
D. Kabupaten Tasikmalaya	109
E. Kota Bandung	109
F. Kota Banjar	109
G. Kota Bekasi	110
H. Kota Bogor	110
I. Kota Cimahi	110
J. Kota Cirebon	110
K. Kota Depok	110
L. Kota Sukabumi	110
M. Kota Tasikmalaya	111

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Subang
- Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang
- Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Subang
- Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Subang
- Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Subang
- Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Subang
- Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Subang
- Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Subang
- Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Subang
- Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Subang
- Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sukabumi
- Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sukabumi
- Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sukabumi

Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukabumi

Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumedang

Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumedang

Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumedang

Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumedang

Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumedang

Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang

Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bandung

Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bandung³⁶

Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bandung

Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bandung

Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bandung

Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bandung

Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bandung

Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bandung

Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bandung

Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bandung

Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjar

Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjar⁴⁴

Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjar

Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjar

Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjar

Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjar

Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjar

Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjar

Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kota Banjar

Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjar

Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bekasi

Gambar 68 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bekasi

Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bekasi

Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bekasi

Gambar 71 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bekasi

Gambar 72 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bekasi

Gambar 73 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bekasi

Gambar 74 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bekasi

Gambar 75 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bekasi

Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi

Gambar 77 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bogor

Gambar 79 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bogor

Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bogor

Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bogor

Gambar 82 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bogor

Gambar 83 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bogor

Gambar 84 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Bogor

Gambar 85 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bogor

Gambar 86 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bogor

Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor

Gambar 88 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Cimahi

Gambar 90 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cimahi

Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Cimahi

Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Cimahi

Gambar 93 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Cimahi

Gambar 94 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Cimahi

Gambar 95 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Cimahi

Gambar 96 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Cimahi

Gambar 97 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Cimahi

Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Cimahi

Gambar 99 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 100 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Cirebon

Gambar 101 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cirebon⁷⁸

Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Cirebon⁷⁹

Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Cirebon⁷⁹

Gambar 104 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Cirebon

Gambar 105 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Cirebon

Gambar 106 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Cirebon

Gambar 107 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Cirebon

Gambar 108 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Cirebon

Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon

Gambar 110 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 111 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Depok

Gambar 112 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Depok

Gambar 113 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Depok

Gambar 114 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Depok

Gambar 115 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Depok

Gambar 116 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Depok

Gambar 117 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Depok

Gambar 118 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Depok

Gambar 119 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Depok

Gambar 120 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Depok

Gambar 121 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 122 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sukabumi

Gambar 123 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sukabumi

Gambar 124 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sukabumi⁹⁴

Gambar 125 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sukabumi

Gambar 126 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sukabumi

Gambar 127 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sukabumi

Gambar 128 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Sukabumi

Gambar 129 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sukabumi

Gambar 130 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sukabumi

Gambar 131 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi

Gambar 132 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 133 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tasikmalaya

Gambar 134 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tasikmalaya

Gambar 135 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Gambar 136 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Gambar 137 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Gambar 138 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tasikmalaya

Gambar 139 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Gambar 140 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Tasikmalaya

Gambar 141 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tasikmalaya

Gambar 142 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya

Gambar 143 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Subang beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Sukabumi beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Sumedang beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kota Bandung beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kota Banjar beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kota Bekasi beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kota Bogor beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kota Cimahi beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kota Cirebon beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Depok beserta Skor Kematangannya

Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Sukabumi beserta Skor Kematangannya

Tabel 14 Daftar Inovasi Kota Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

The background is a yellow-tinted photograph of a monument and a building. The monument is a tall, slender, tapered structure with a flame-like top. The building is a classical-style structure with columns and a pediment. The text is overlaid on the right side of the image.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat (bagian 2). Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat (bagian 2) pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Barat (bagian 2) yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan

inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
Roadmap SiDA		
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan	Jejaring Inovasi

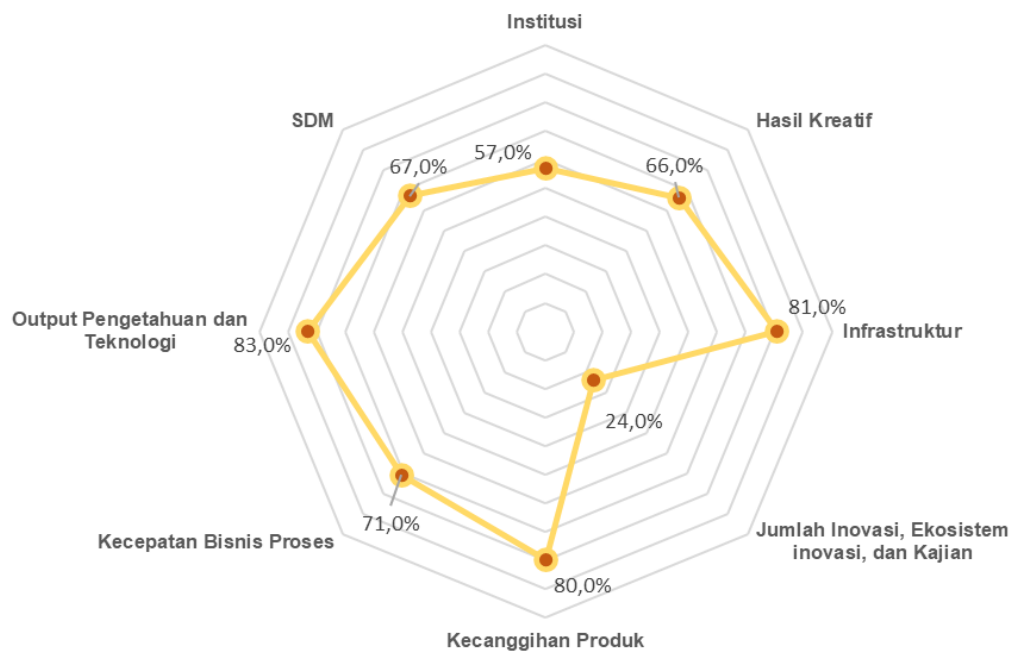
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	dan Teknologi	Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

The background is a yellow-tinted photograph. On the left, a tall, slender monument with a flame-like top is visible. On the right, a classical building with columns is partially seen. The overall scene is bright and hazy.

BAB II

INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

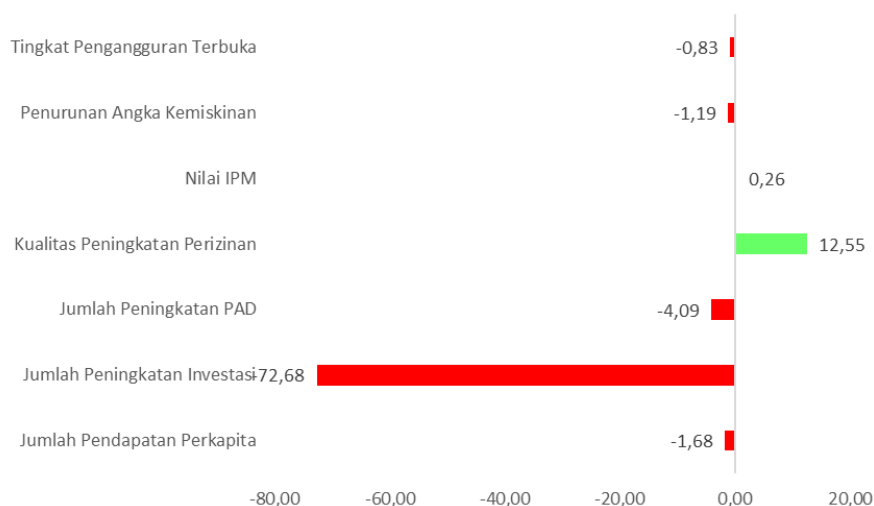
A. KABUPATEN SUBANG



Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Subang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Subang memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 24,0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



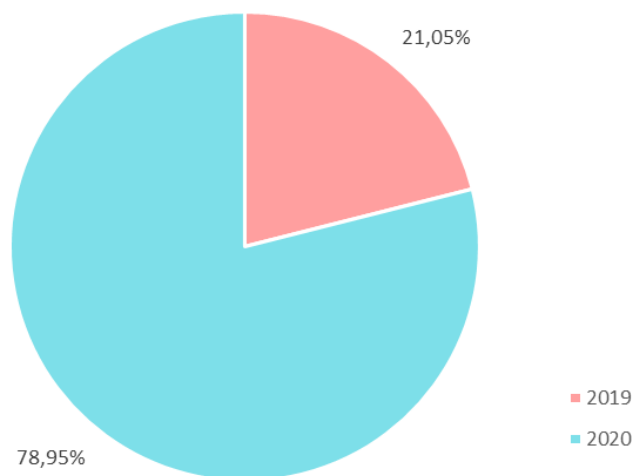
Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Subang belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,83%, di mana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,19% yang mana angka tersebut lebih rendah dari kondisi nasional yang turun sebesar 0.02%. Kemudian dari sisi PAD juga mengalami penurunan sebesar 4,09% yang juga cukup jauh dibandingkan kondisi rata-rata nasional yang naik sebesar 8%. Demikian pula dengan Realisasi Investasi yang turun sebesar 72,68% yang mana cukup jauh dengan rata-rata realisasi investasi seluruh pemda yang naik sebesar 0.45%. Terakhir ada indikator Pendapatan Perkapita yang turun sebesar 1,68% nilai tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita seluruh wilayah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

Sementara itu perbaikan tercermin pada Kualitas Peningkatan Perizinan yang mengalami kenaikan sebesar 12,55% di mana nilai tersebut melampaui rata-rata kenaikan kualitas peningkatan perizinan pemda secara nasional sebesar 5%. Aspek Satuan Inovasi Daerah. Perbaikan juga dapat dilihat dari angka IPM yang naik sebesar 0,26%, nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan standar penilaian yang bernilai 0% atau tetap.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

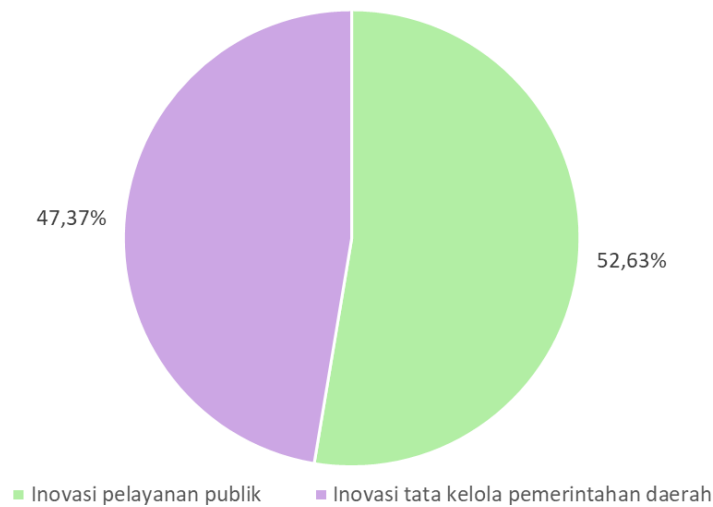
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Subang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Subang telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 15 (78,95%) inovasi dari 19 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 4 (21,05%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

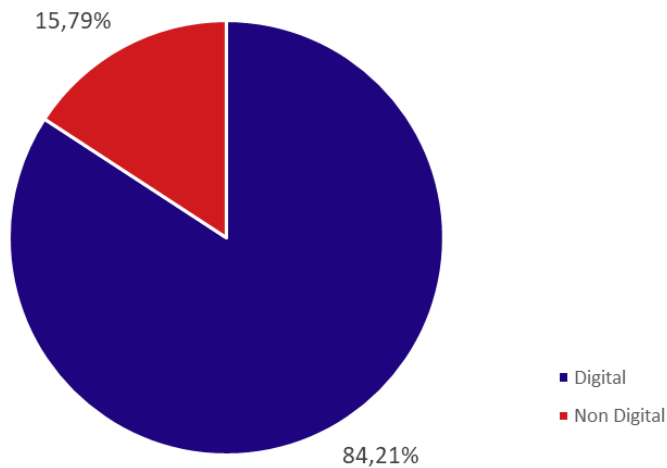
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Subang

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi tata kelola pemerintahan daerah mendominasi dari segi kuantitas, yaitu terdapat 10 (52,63%) dan 9 (47,37%) inovasi lainnya merupakan inovasi dengan bentuk pelayanan publik serta belum ada inovasi bentuk lainnya yang dilaporkan pada tahun 2021.

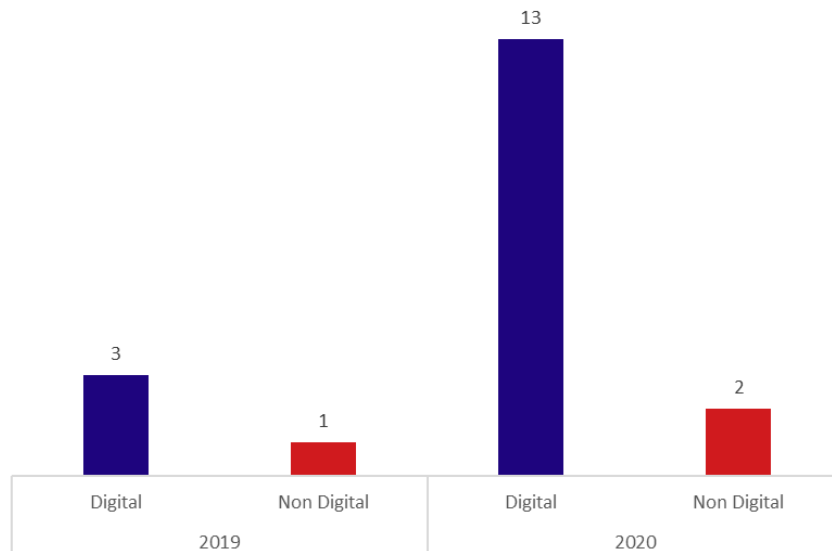
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Subang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 16 (84,21%) dari 19 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Subang merupakan inovasi digital, kemudian 3 (15,79%) inovasi merupakan inovasi non digital.

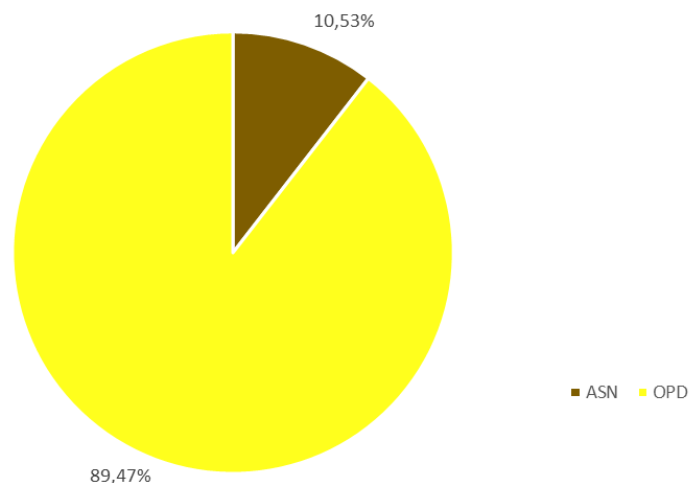
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Subang

Jumlah inovasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya bagi inovasi digital sementara untuk inovasi non digital terdapat kenaikan inovasi baru tetapi tidak cukup banyak. Inovasi digital naik di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi baru namun pada tahun 2020 naik menjadi 13 inovasi. Kemudian inovasi non digital mengalami perubahan dari sisi jumlah di mana pada tahun 2019 ada 1 inovasi yang baru mulai diterapkan dan pada tahun 2020 terdapat 2 inovasi baru yang mulai diterapkan.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

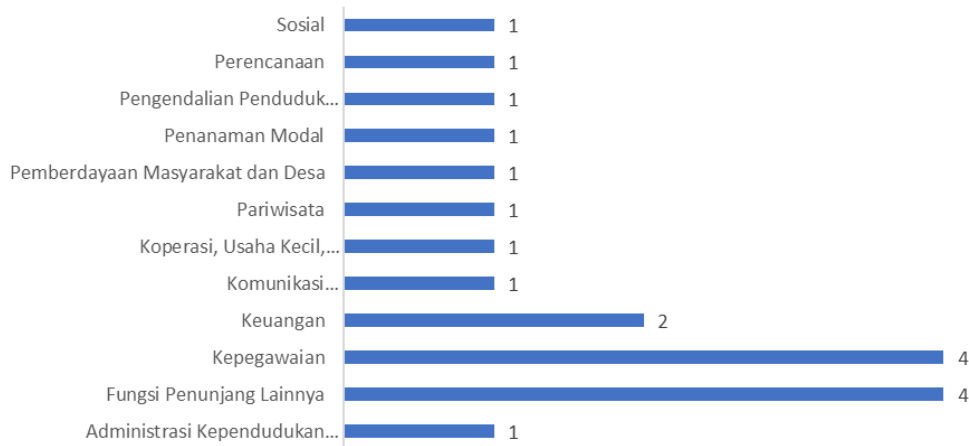


Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Subang

17 2 Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Subang pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 17 (89,47%) inovasi sementara 2

(10,53%) lainnya diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

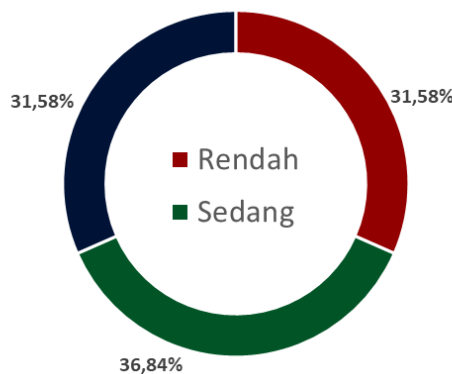
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Subang

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Subang berdasarkan urusan pemerintahan belum banyak mengingat kuantitas yang dilaporkan, tetapi dapat dilihat bahwa inovasi yang dilaporkan tidak hanya terpusat pada satu atau dua urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kepegawaian dan fungsi penunjang lainnya dengan 4 inovasi dari 19 inovasi yang dilaporkan. Selanjutnya ada 2 inovasi dari urusan Keuangan dan masing-masing 1 inovasi pada urusan Sosial, Perencanaan, Pengendalian Penduduk, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Komunikasi serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, baru ada 1 (satu) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu sosial. Urusan lain yang telah dilaporkan inovasinya pada tahun 2021 adalah perpustakaan dan penanaman modal yang masing-masing berjumlah 1 inovasi.

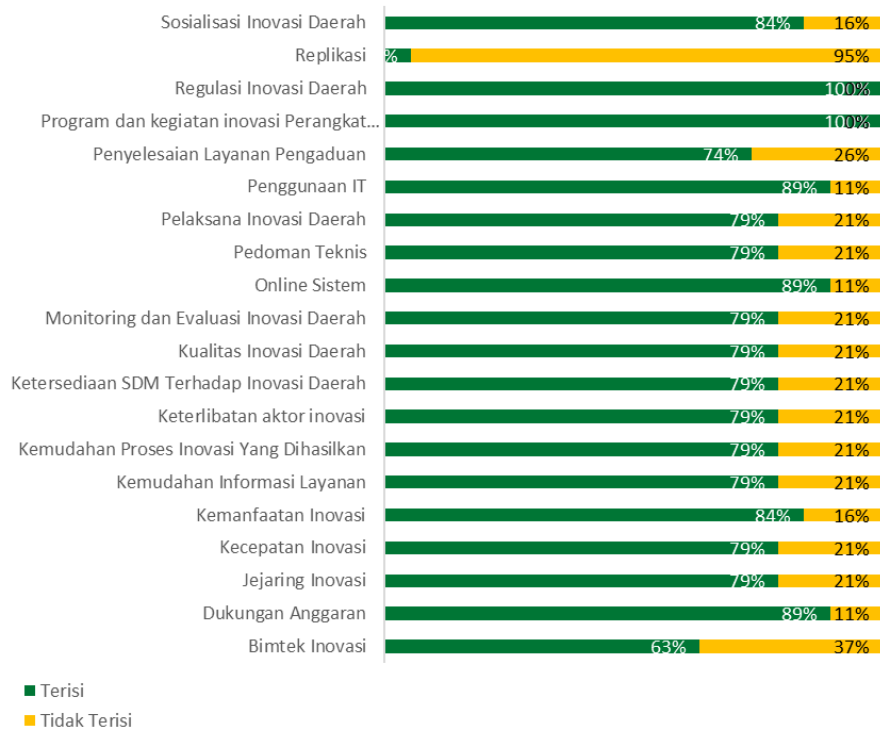
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Subang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Subang terbagi dalam tiga rentang yang hampir seimbang yaitu rendah dengan rentang 0,01 s.d. 49,00 sebanyak 6 inovasi, kemudian sedang dengan rentang skor kematangan 50 s.d. 100 sebanyak 7 inovasi dan tinggi dengan skor kematangan lebih dari atau sama dengan 100 sebanyak 7 inovasi.

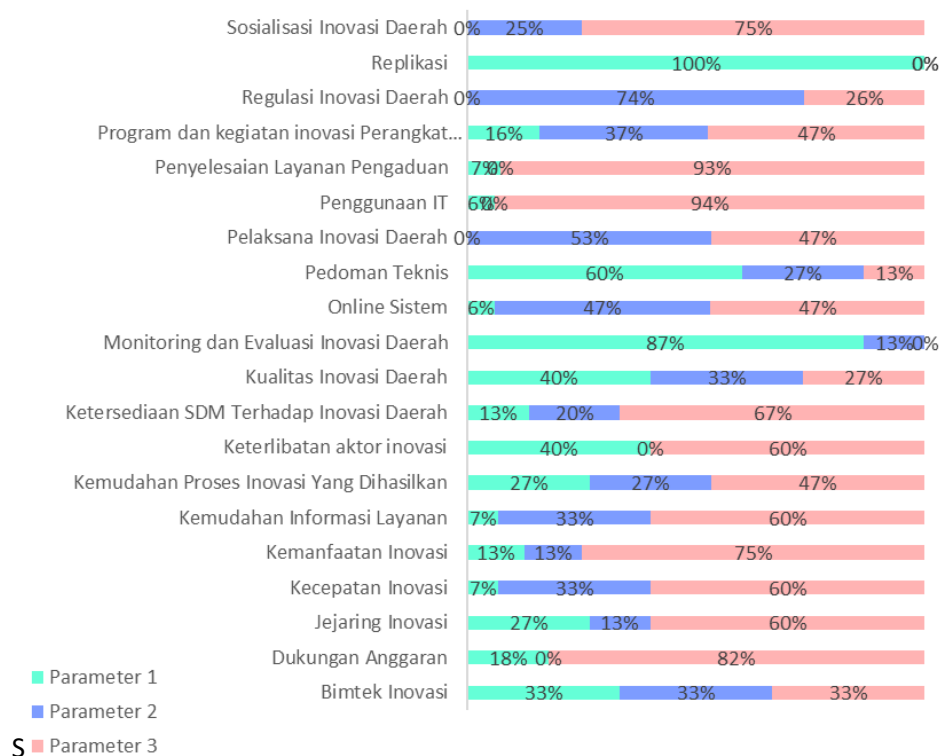
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Subang

Dari 19 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Subang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 21,58% sedangkan 78,42% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Program merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya 19 dari 19 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Subang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 5% artinya baru sebagian kecil inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT sebesar 94%, artinya 94% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 74% artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

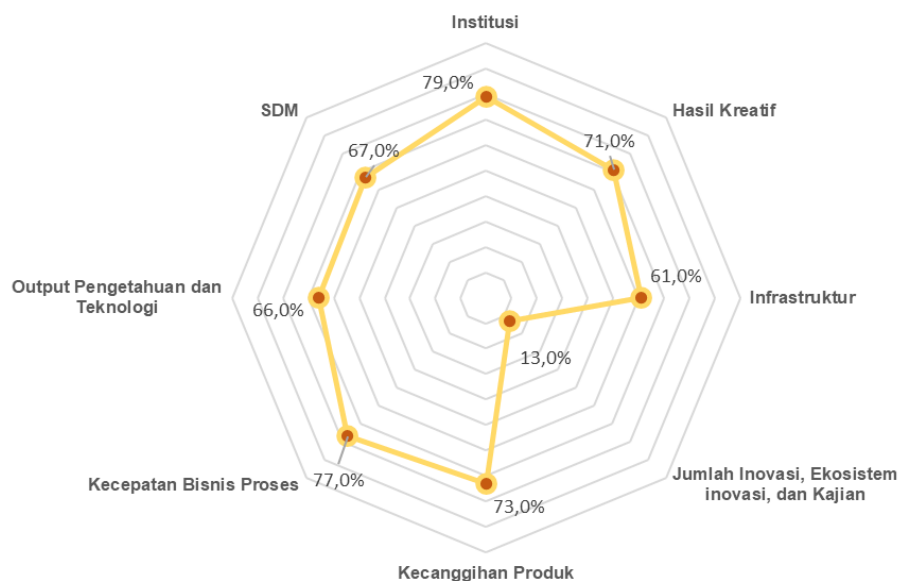
j. Daftar Inovasi Kabupaten Subang beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Subang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Lapor Kang (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Subang)	113
SINANAS (Aplikasi Perizinan Online) Pengembangan 2019-2020	101
BUMDES NGADIGI SUBANG JAWARA	49
Kembang Jawara (Katalog Program Pembangunan Subang Jawa)	95
Siabah Jawa	85
Sijawara (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi)	99

SIDARA KEREN (Aplikasi Data Keluarga Di Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Subang)	105
Smart Desa	87
NGAWUDUK (Ngawangun Dunia Usaha Kreatif)	82
SIPEDAS (Sistem Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Subang)	113
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Subang	110
Jawara Wisata	96
i-PBB	31
E-SAKIP	85
Sidalang (Sistem Pendataan Ulang PNS 2020 Kabupaten Subang)	111
SIPATUH (Sistem Pelayanan Tanpa Menyentuh)	16
e-SPPD	22
e-Disposisi	26
SIMPEG/Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Pengembangan 2019)	24

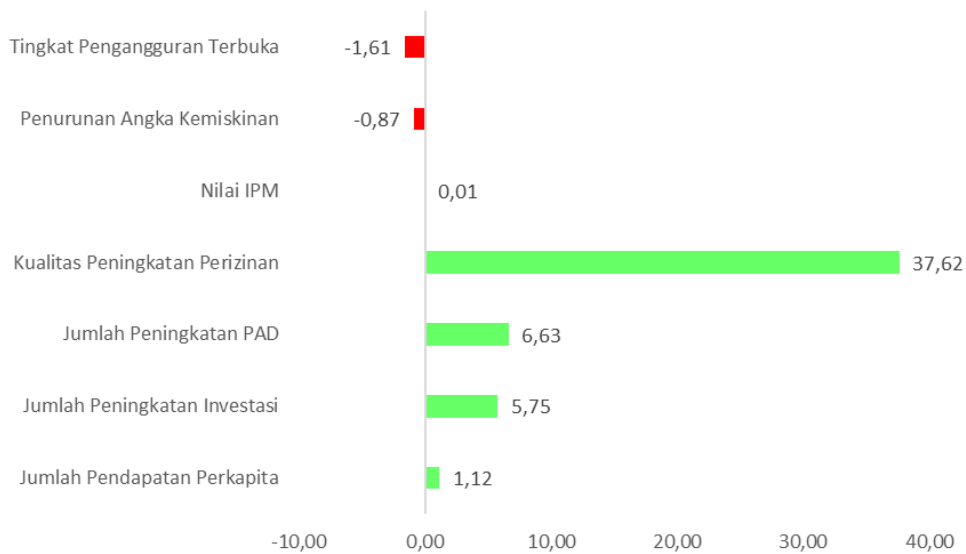
B. KABUPATEN SUKABUMI



Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sukabumi memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 79,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 13,0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



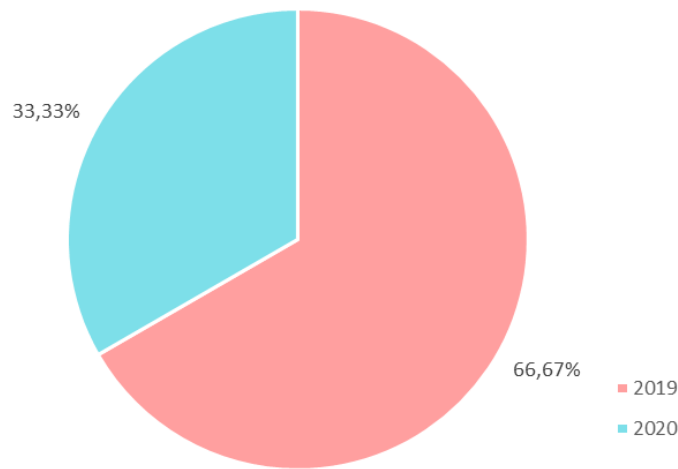
Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sukabumi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sukabumi telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meskipun belum menyeluruh. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,61%, di mana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0,92%. Selanjutnya, indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,87%, angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%.

Meskipun terdapat beberapa penurunan pada 3 indikator di atas, Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan perbaikan diantaranya Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0,01% di mana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 37,62%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga mengalami perbaikan pada Jumlah Pendapatan PAD sebesar 6,63% di mana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 5,75% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Aspek Satuan Inovasi Daerah. Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami kenaikan sebesar 1,12%, angka ini lebih tinggi dari nilai tengah parameter 2 indikator tersebut, yaitu turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

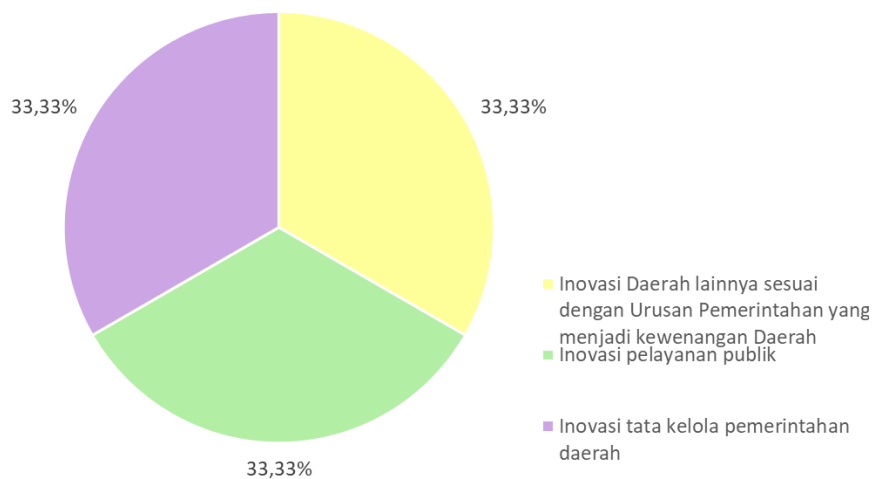
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sukabumi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukabumi telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 4 (66,67%) inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 2 (33,33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

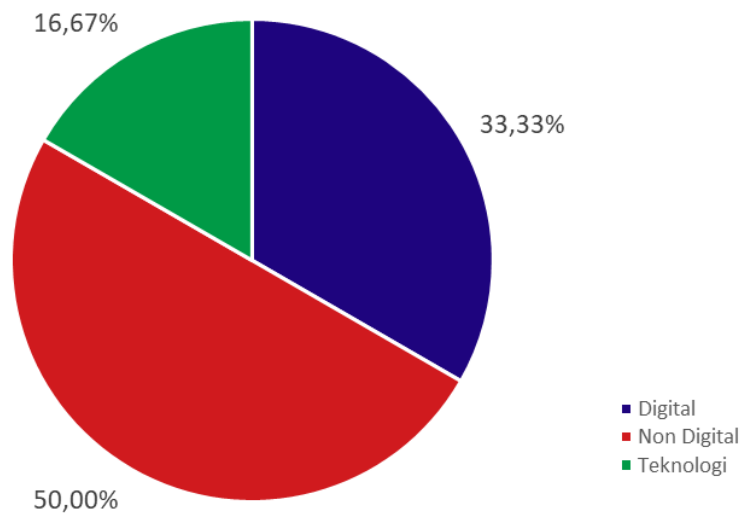
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sukabumi

2 2 Berdasarkan bentuk inovasi, seluruh bentuk inovasi telah dilaporkan oleh Kabupaten Sukabumi, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi bentuk lainnya. Masing-masing urusan dilaporkan dengan proporsi yang sama yaitu 33,33% dengan 2 inovasi.

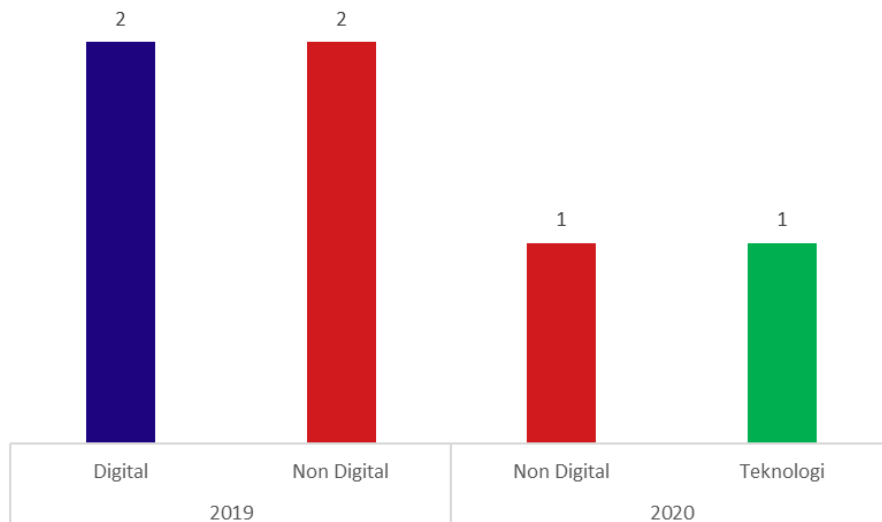
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sukabumi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (50,00%) dari 6 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sukabumi merupakan inovasi non digital. Kemudian 2 (33,33%) inovasi merupakan inovasi Digital dan 1 (16,67%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

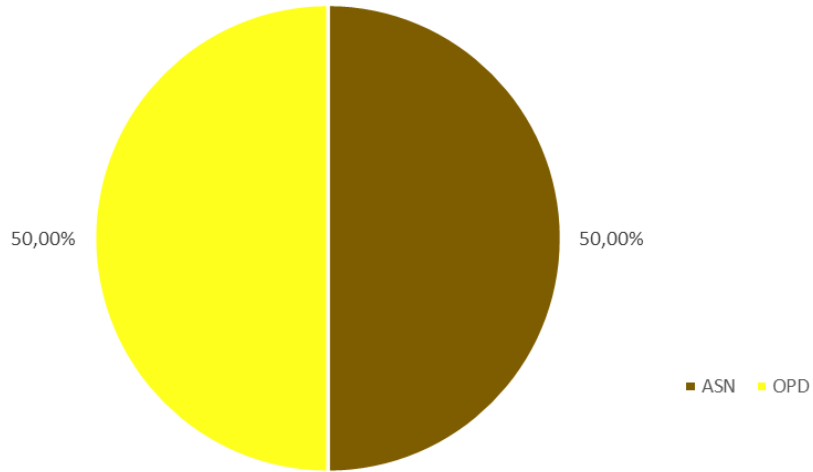


Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sukabumi

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital tetapi terdapat peningkatan inovasi teknologi baru yang ditetapkan. Dapat dilihat bahwa 1 inovasi non digital baru mulai diterapkan pada tahun 2020 di mana pada tahun 2019 ada 2 inovasi baru non digital. Begitu pula dengan inovasi Digital yang baru mulai diterapkan di tahun 2019 dan tidak ada

penambahan inovasi digital di tahun 2020. Sementara inovasi teknologi mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 belum ada inovasi baru yang mulai diterapkan tetapi ada penambahan inovasi baru pada tahun 2020 sebanyak 1 inovasi.

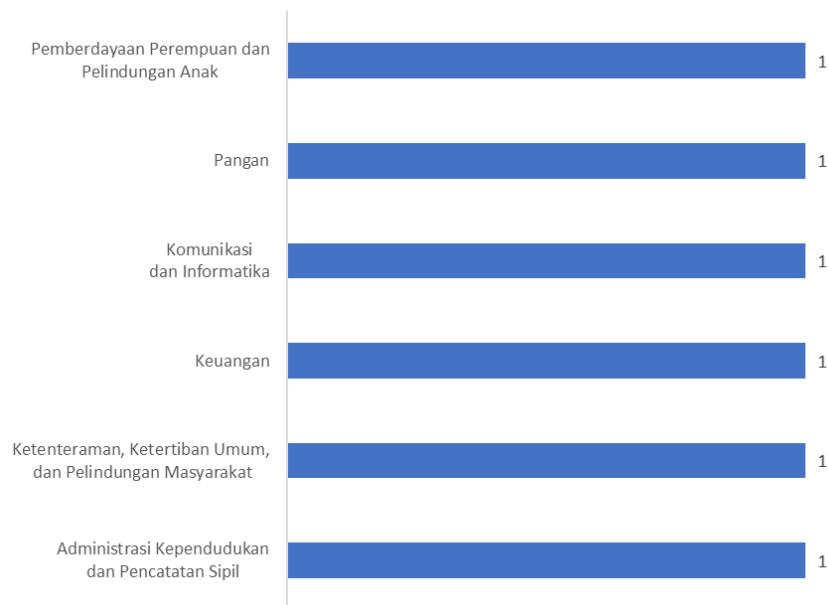
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sukabumi

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN dan Perangkat Daerah dengan masing-masing 3 inovasi (50%). Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

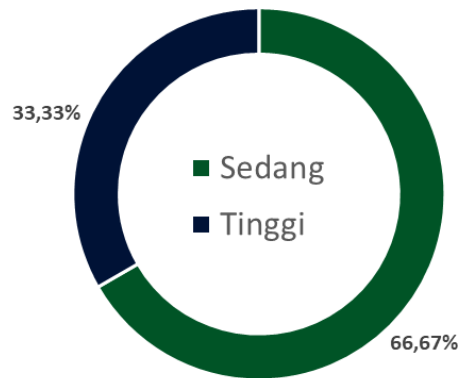


Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sukabumi

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sukabumi berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata mengingat jumlah inovasi yang dilaporkan. Terdapat 6 urusan yang

dilaporkan inovasinya dengan masing-masing 1 inovasi yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, hanya satu urusan yang telah dilaporkan Kabupaten Sukabumi sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

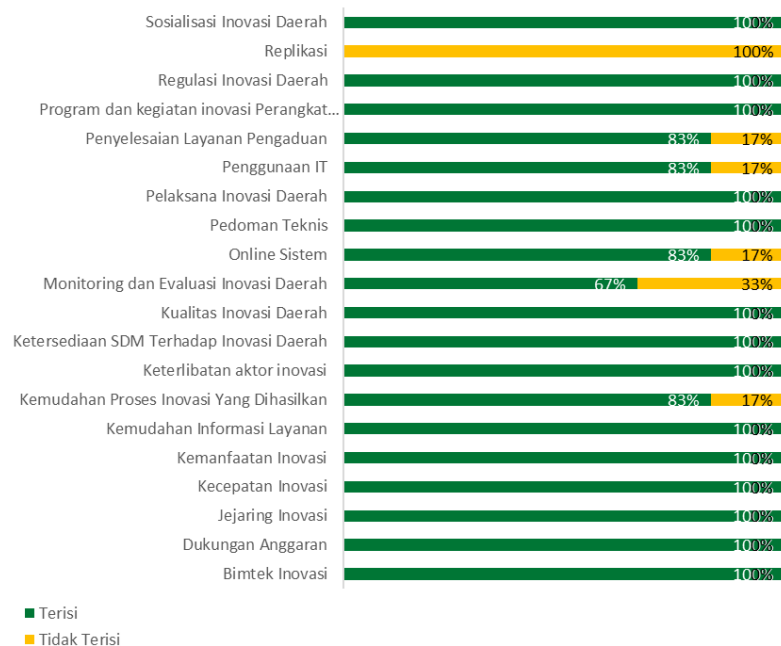
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sukabumi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi, di mana terdapat 4 (66,67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan terdapat 2 (33,33%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

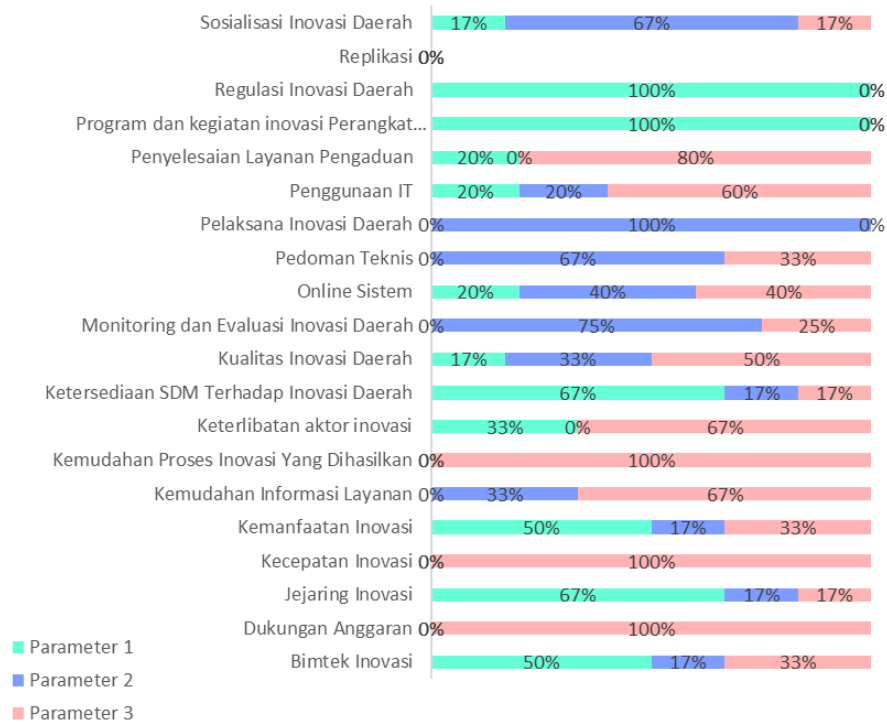


Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukabumi

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukabumi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 10,00% sedangkan 90,00% lainnya telah terisi data pendukung. Ada indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Jejaring Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sukabumi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya belum ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

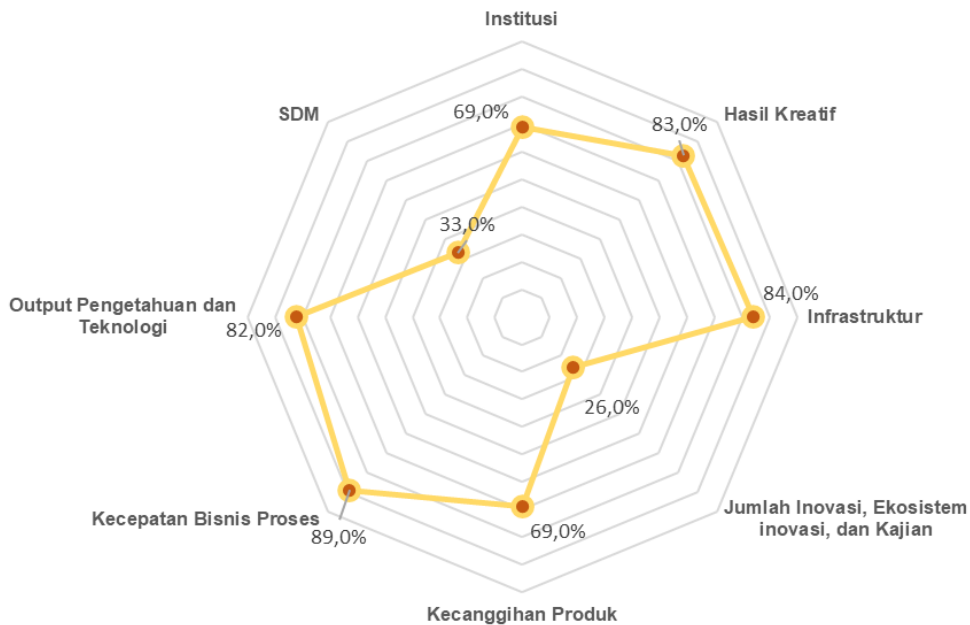
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Penciptaan Inovasi dan Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 100% artinya 100% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sukabumi beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Sukabumi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BIMASAKTI (BANK INFORMASI MASYARAKAT SUKABUMI AKTUAL TERINTEGRASI)	97
RETRIBUSI TERINTEGRASI (RISTI)	96
MOPELING SARASA (MOTOR PELAYANAN KELILING SARASA ON SITE ON CALL ONE DAY)-TATAKELOLA PEMERINTAHAN	97
KAPULAGA (KALAU MINGGU KUMPUL KELUARGA)	104
SIAGA-LAH (SISTEM INFORMASI PENGAMANAN GANGGUAN WILAYAH KECAMATAN CICURUG)	92
TATAPAK (PeningkatAn KeTAhanan PAngan Keluarga)	101

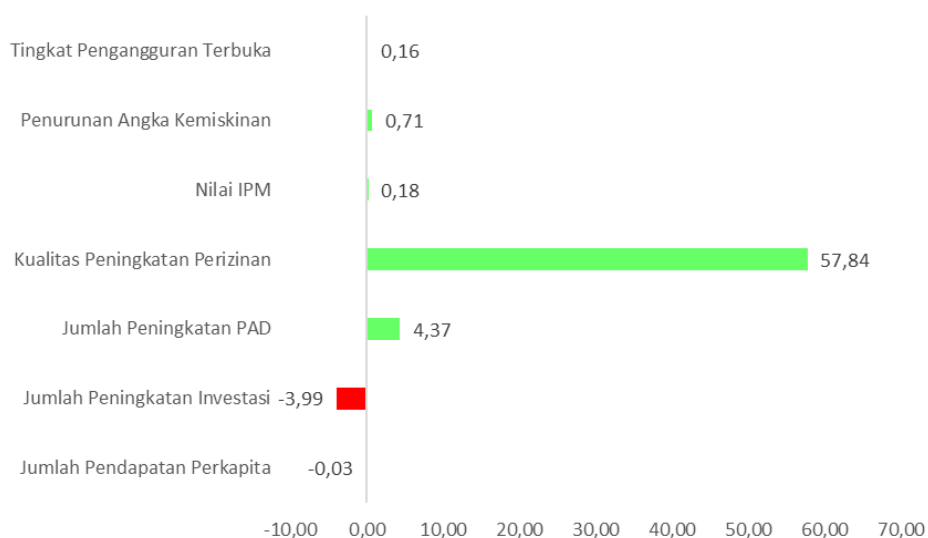
C. KABUPATEN SUMEDANG



Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumedang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumedang memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 89,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 26,0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



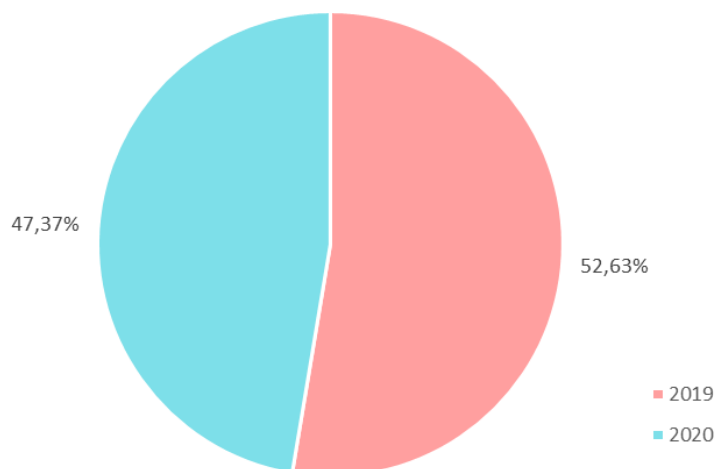
Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumedang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumedang telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang turun sebesar 3,99% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Selanjutnya penurunan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 0,03% yang mana nilai ini sebenarnya masih lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kabupaten Sumedang menunjukkan kenaikan sebesar 4,37%, yang masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

Sebaliknya, enam indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 0,16%. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Kedua, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,71%, angka tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0,18% di mana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 57,84%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

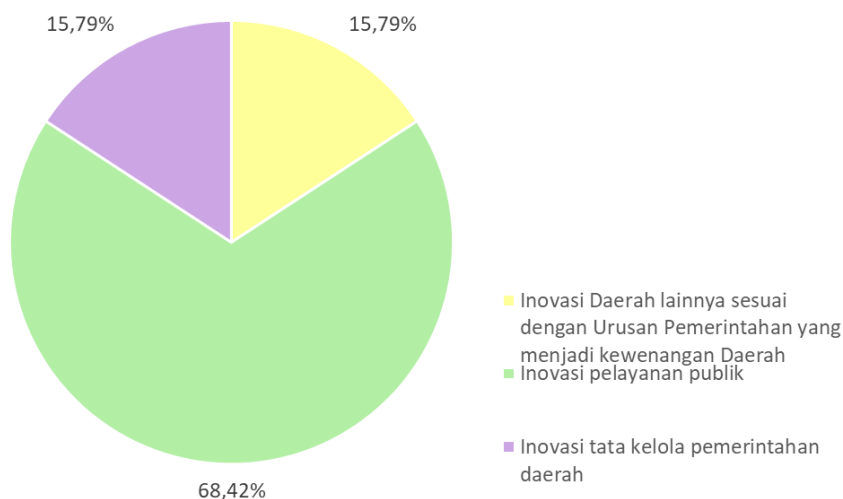
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumedang telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 10 (52,63%) inovasi dari 19 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 10 (47,37%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

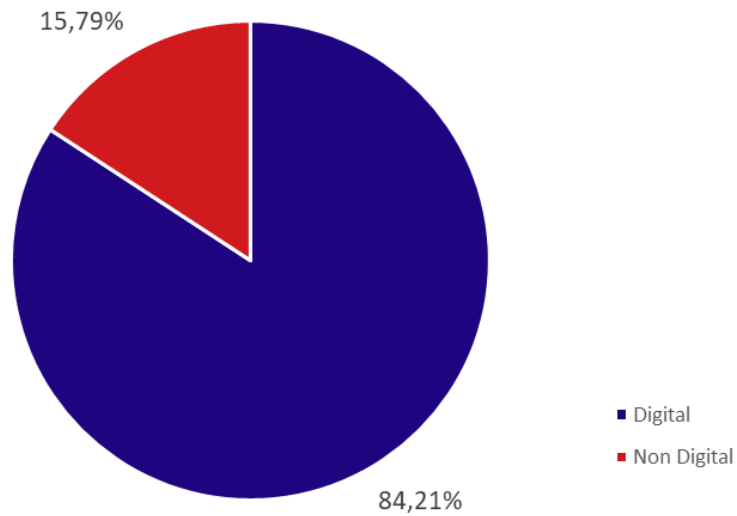


Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Berdasarkan bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumedang mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 13 (68,42%) inovasi dan 3 (15,79%)

inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan serta 3 (15,79%) inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya.

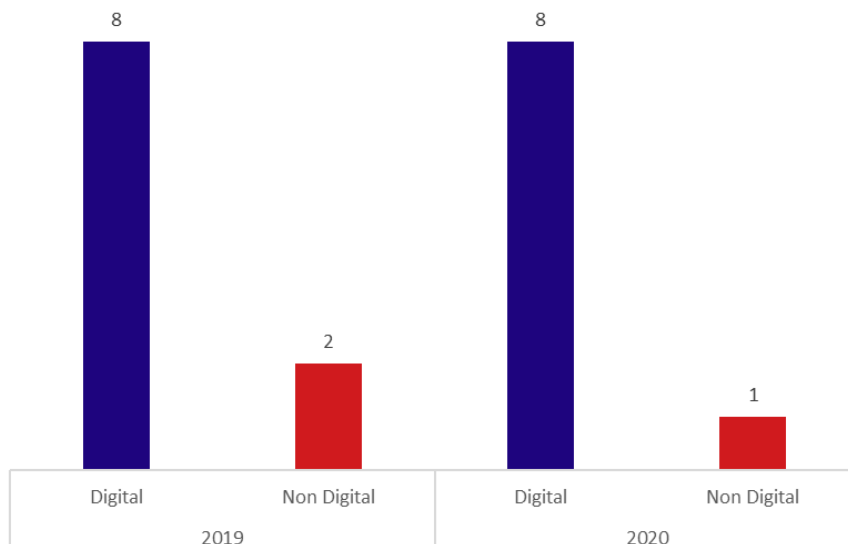
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumedang

16 3 Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 16 (84,21%) dari 19 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sumedang merupakan inovasi digital dan 3 (15,79%) inovasi lainnya merupakan inovasi non-digital.

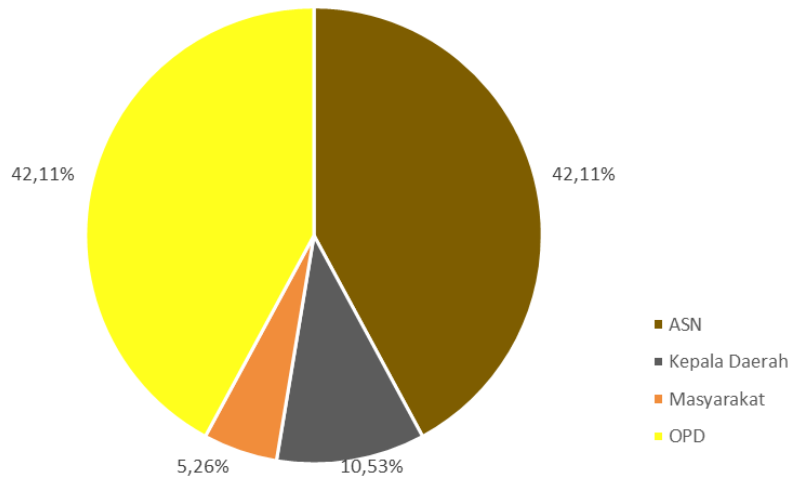
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumedang

Terdapat penurunan jumlah inovasi baru yang diterapkan sebesar 3 inovasi non digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Sementara pada inovasi digital, jumlah inovasi baru yang mulai diterapkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing berjumlah 8.

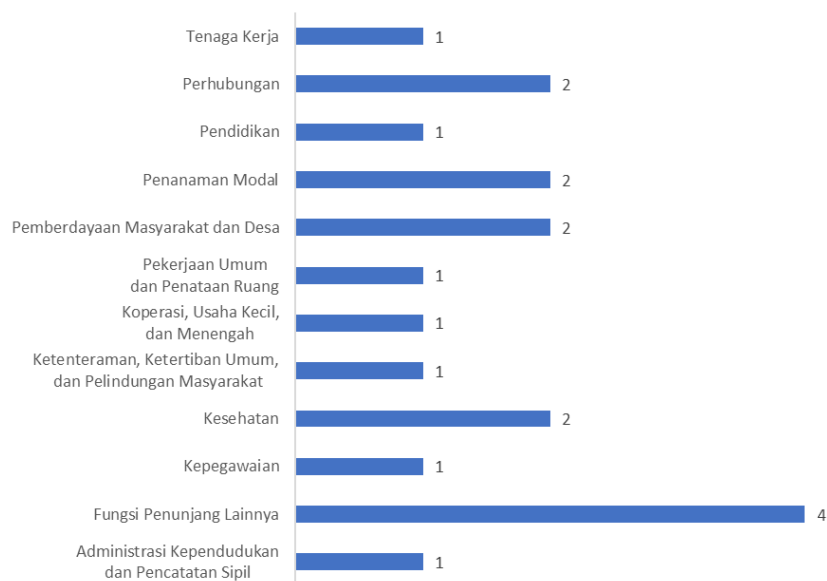
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumedang

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 8 (42,11%) inovasi sementara 8 (42,11%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, kemudian 2 (10,53%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan terakhir 1 (5,26%) diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

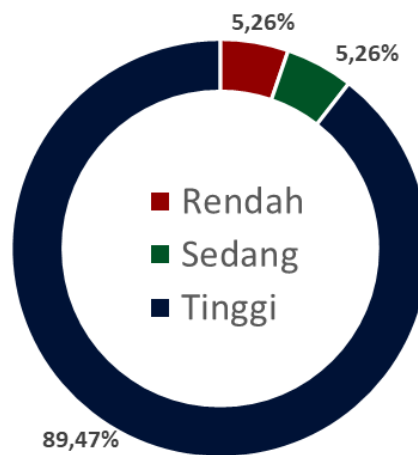
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumedang

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sumedang berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada fungsi penunjang lainnya dengan 4 inovasi kemudian masing-masing 2 inovasi dari urusan Perhubungan, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kesehatan. Selanjutnya dengan masing-masing satu inovasi adalah urusan Tenaga Kerja, Pendidikan, PUPR, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian serta administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan, pendidikan, PUPR, dan trantibumlinmas, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum melaporkan.

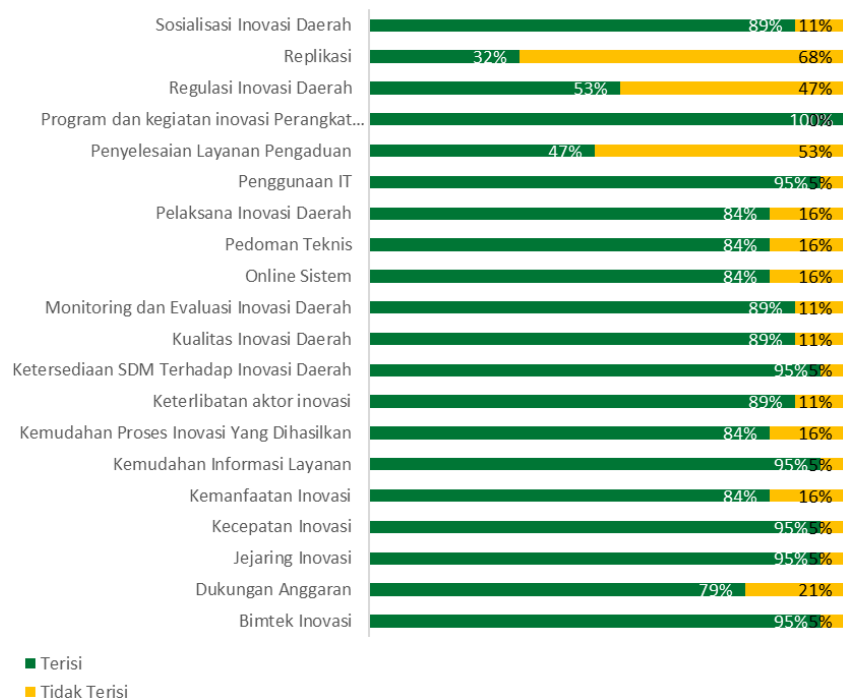
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumedang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan tinggi, di mana terdapat 17 (89,47%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Kemudian terdapat 1 (5,26%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan 1 (5,26%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

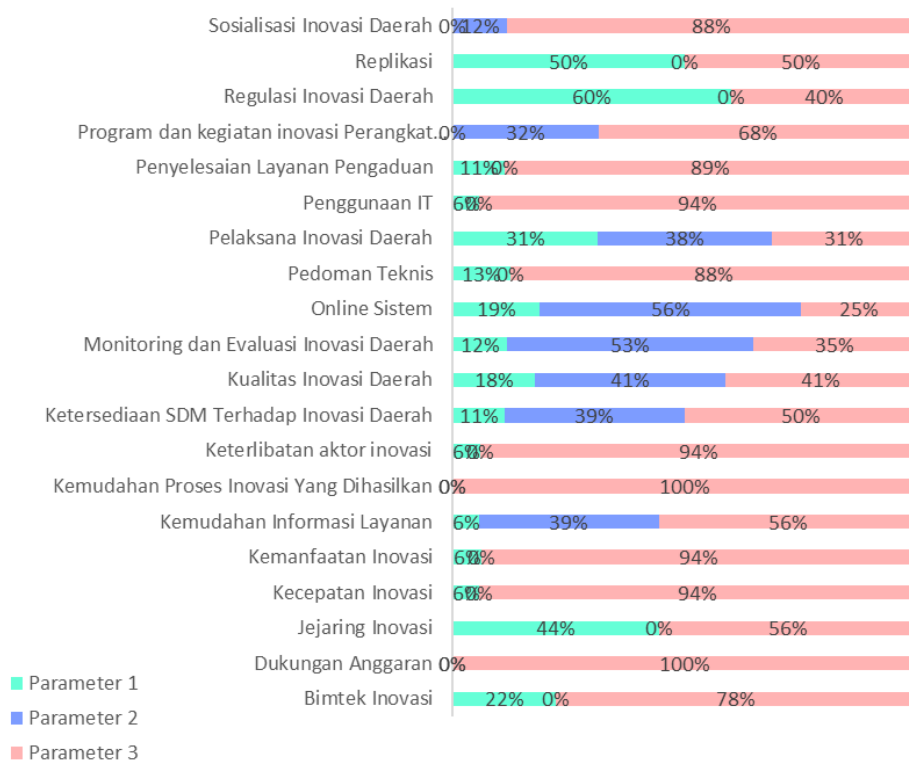


Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumedang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 17,11% sedangkan 82,89% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumedang telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 32% artinya hanya sebagian inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 56% artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 60% artinya mayoritas inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

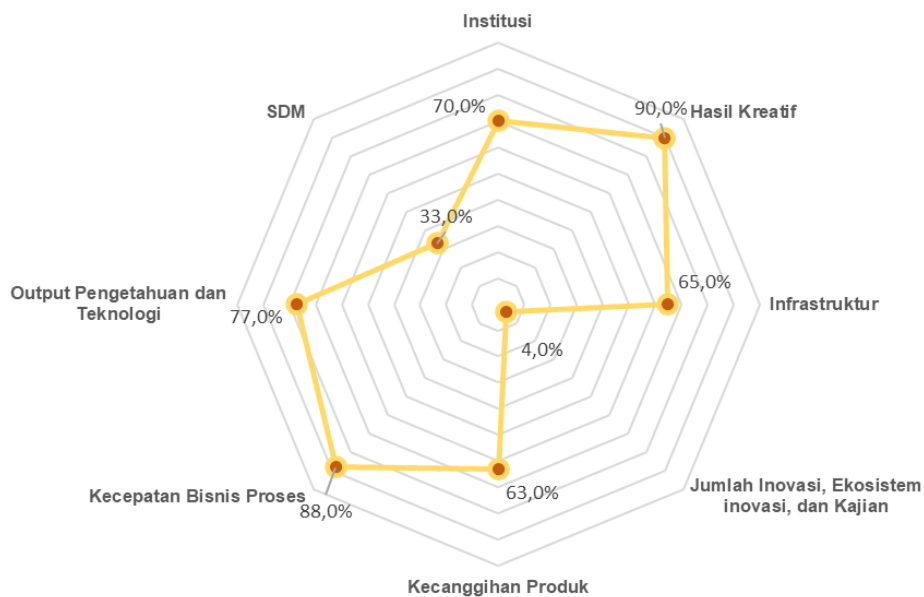
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumedang beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Sumedang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban (SIMANTRI)	67
E Office	107
Mang Dadang Lumpat (Sistem Aplikasi Jaringan Dokumentasi Perundang-undangan Lengkap Akurat Mudah dan Cepat)	105
Rancakalong Berbagi	27
Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL)	102
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa	112

Smart Public Service Kecamatan Jatinangor	102
Sistem Pelayanan Era Milenial (SIPELEM)	113
Sistem Gerai UMKM Terpadu (SIMADU)	108
Percepatan Penurunan Stunting melalui Aplikasi Simpati	116
SISTEM INFORMASI PENGADUAN DAN PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (SIPPUJAAN)	121
SISTEM INFORMASI PELATIHAN BERBASIS DATABASE ONLINE (SIPEDO)	116
OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI JARINGAN IRIGASI CIKONDANG BERBASIS WEB GIS	107
PSC 119 SIMPATIK	135
PENINGKATAN PAD MELALUI PENGADAAN TRAYEK KHUSUS DIKAWASAN WISATA JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG	113
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK	118
SISTEM PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK	108
SISTEM INFORMASI IZIN CETAK MANDIRI (SIICE MANDIRI) V.1.1	108
“STRATEGI KOMPLEMENTER 7 (TUJUH) METODE PEMBELAJARAN MASA DARURAT COVID-19”	104

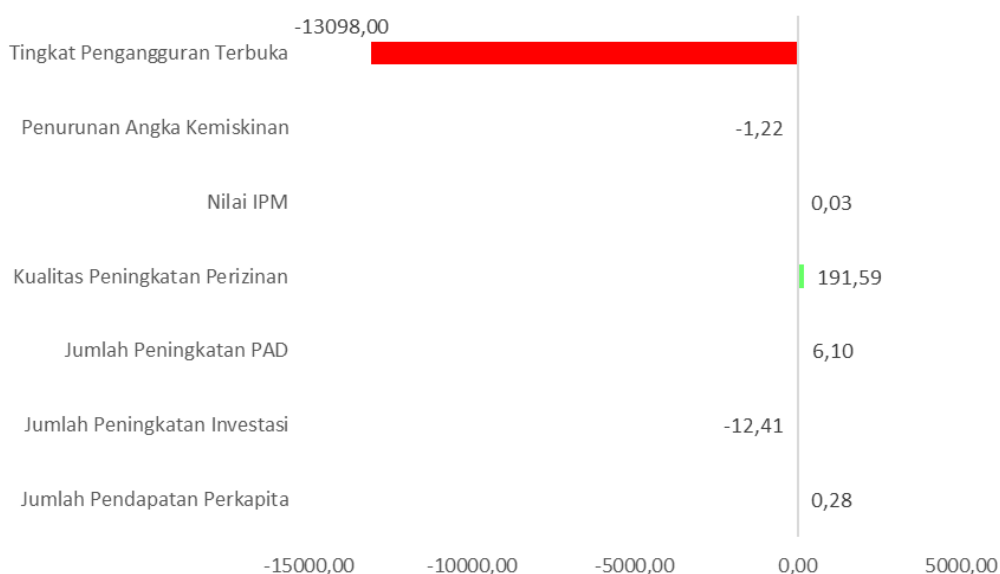
D. KABUPATEN TASIKMALAYA



Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tasikmalaya memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 90,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 4.0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1 atau tidak terisi.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



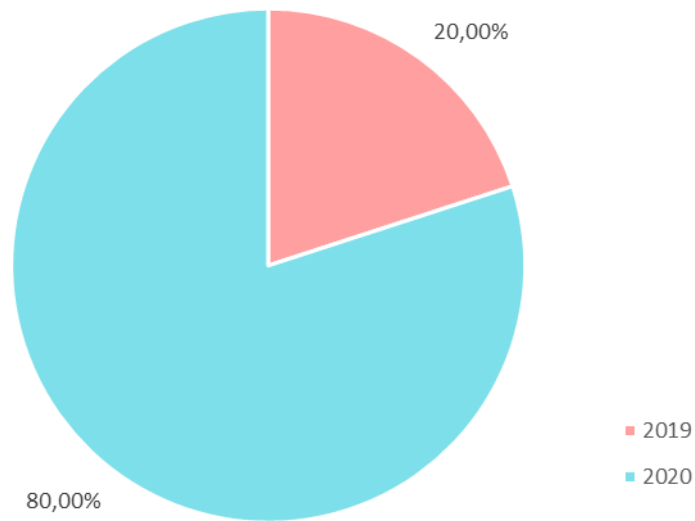
Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 13098%. Nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah tahun 2021 yang naik sebesar 0,92%, selain itu juga mengindikasikan adanya kesalahan penginputan Angka Pengangguran Terbuka. Selanjutnya angka kemiskinan juga naik sebesar 1,22% yang juga lebih tinggi dibanding standar parameter yang turun sebesar 0,02%. Selanjutnya adalah indikator Peningkatan Investasi yang turun sebesar 12,41% yang mana nilai tersebut lebih rendah dibanding standar yang naik sebesar 0,45%.

Sebaliknya, tiga indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.03% di mana nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 191,59%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Jumlah PAD juga membaik dilihat dari 6,10% kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sejalan dengan standar parameter yang naik sebesar 8% meskipun masih di bawah standar. Indikator terakhir adalah Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami kenaikan 0,28%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar parameter yaitu turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

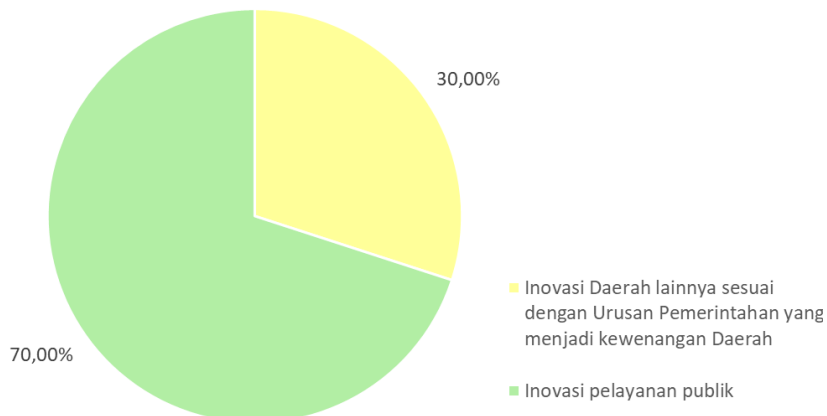
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tasikmalaya telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 8 (80,00%) inovasi dari 10 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 2 (20,00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

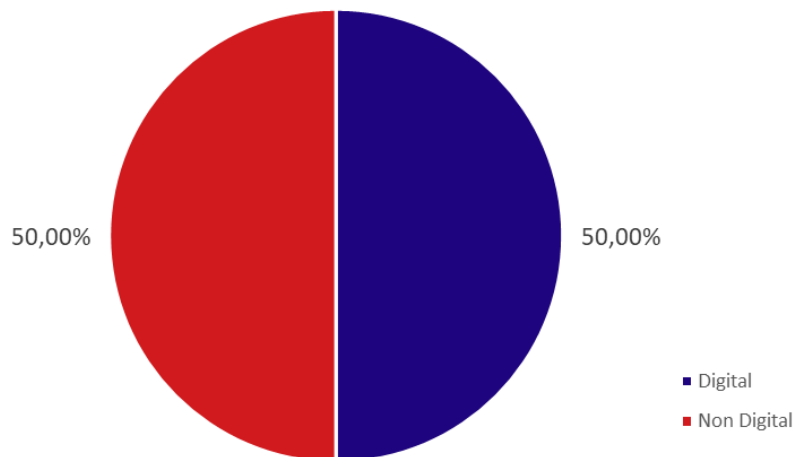
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tasikmalaya, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya, sementara inovasi tata kelola pemerintahan belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 7 (70,00%) inovasi dan 3 (30,00%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

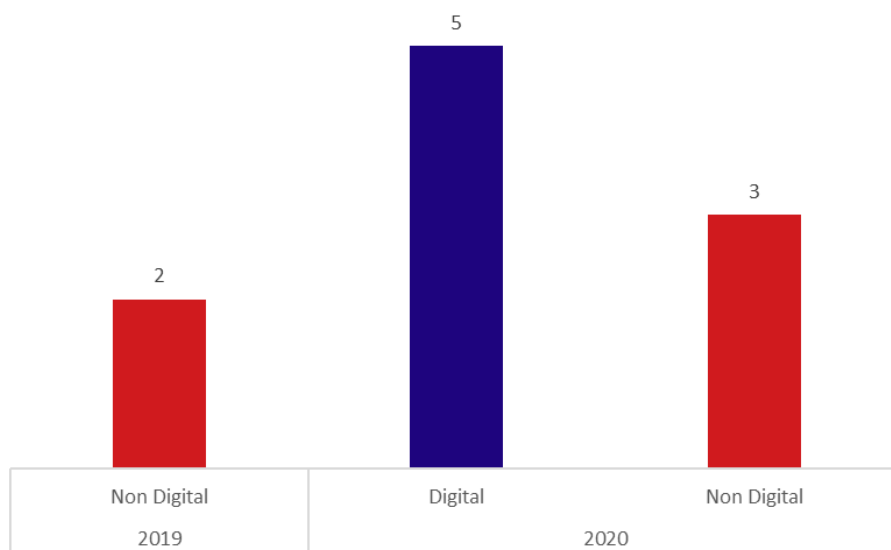
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (50,00%) dari 10 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Tasikmalaya merupakan inovasi non digital dan 5 (50,00%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

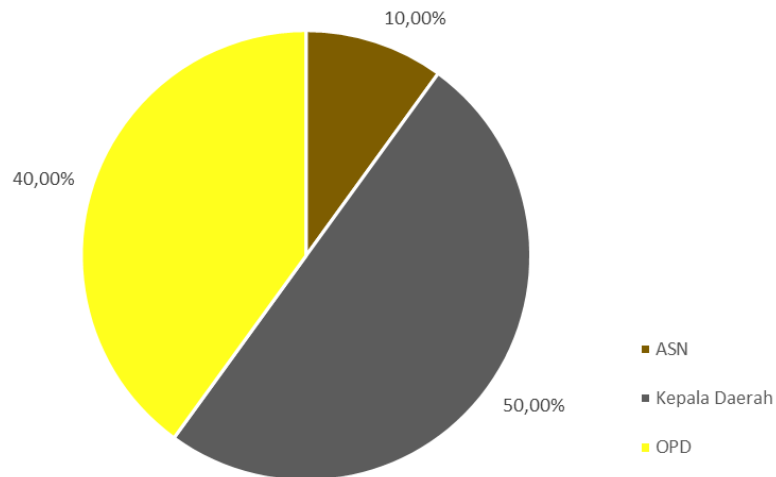
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tasikmalaya

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 5 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi non digital sebanyak 1 inovasi. Pada tahun 2020 terdapat 5 inovasi baru yang diterapkan, dibandingkan tahun 2019 di mana tidak ada inovasi digital yang mulai diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara inovasi non digital pada tahun 2019 terdapat 2 inovasi baru dan di tahun 2021 terdapat 3 inovasi baru mulai diterapkan.

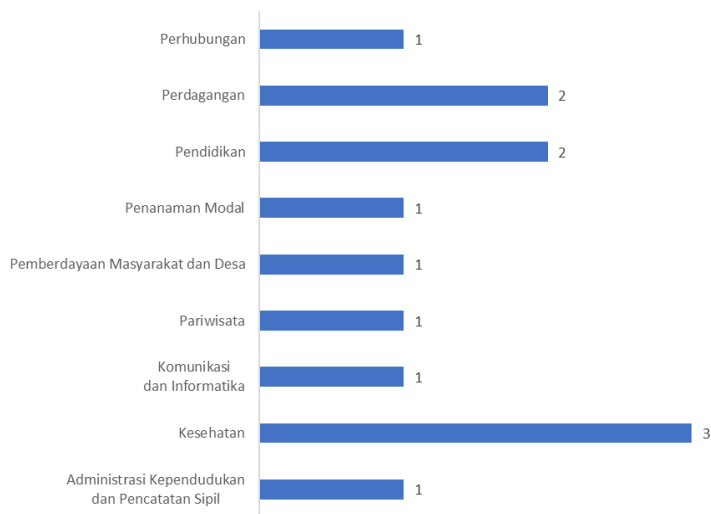
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tasikmalaya

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah sebanyak 5 (50,00%) inovasi kemudian 4 (40,00%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah serta 1 (10,00%) diinisiasi oleh ASN, sementara inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

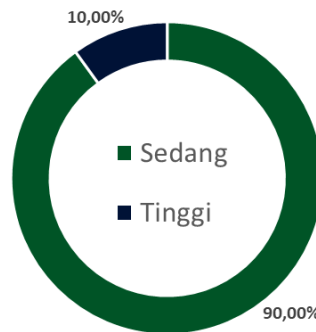


Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tasikmalaya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 3 inovasi kemudian dengan masing-masing 2 inovasi merupakan inovasi pada urusan Perdagangan dan Pendidikan. Terakhir dengan masing-masing 1 inovasi adalah urusan Perhubungan, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu

urusan kesehatan dan pendidikan, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

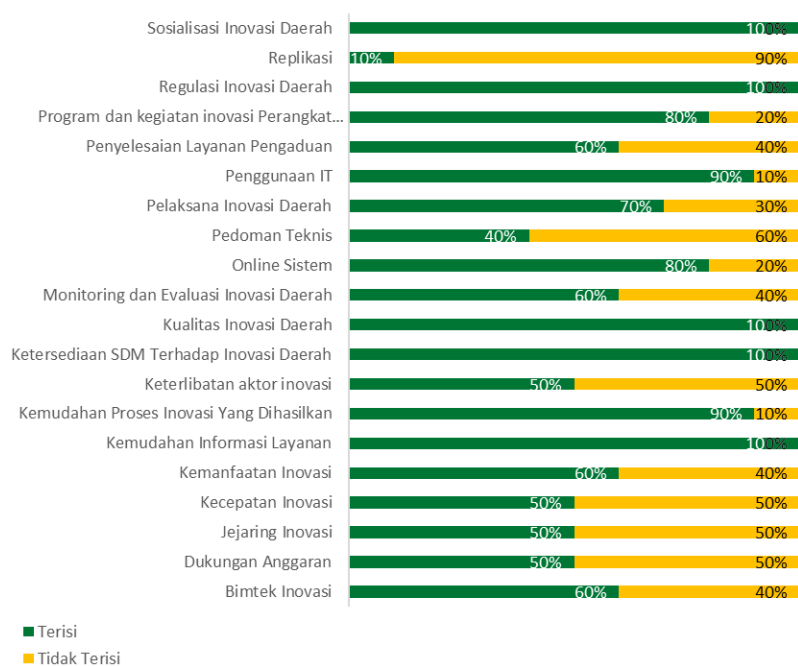
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tasikmalaya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, di mana terdapat 9 (90,00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 1 (10,00%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

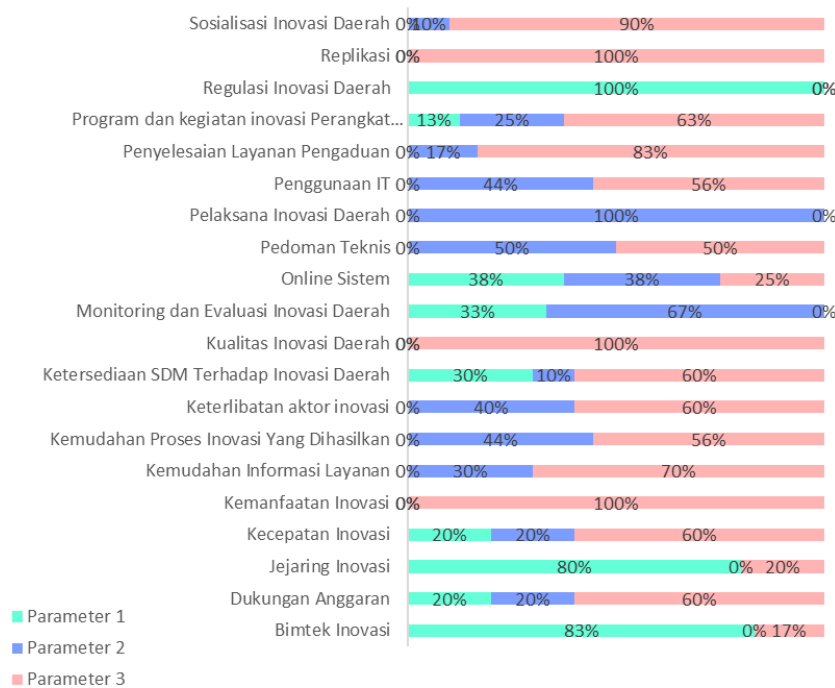


Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tasikmalaya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 30,00% sedangkan 70,00% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dengan keterisian tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, dan Kemudahan Informasi Layanan dengan keterisian 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tasikmalaya telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 10% artinya hanya 10% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

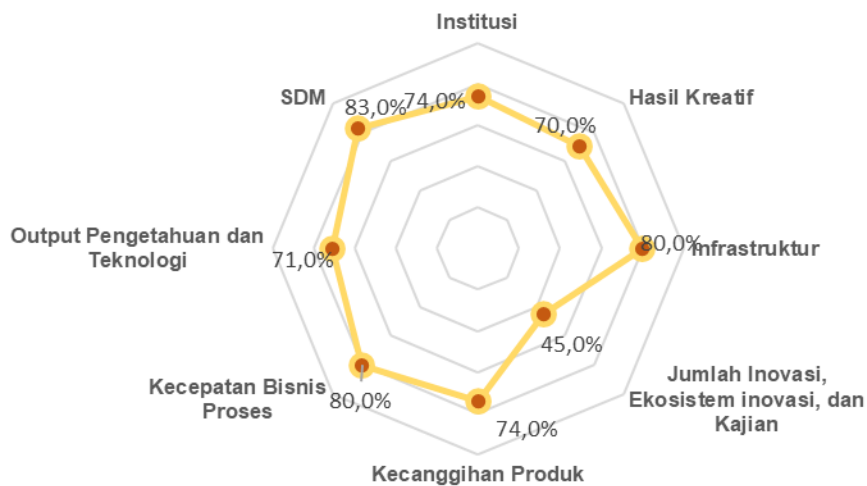
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, Kualitas Inovasi Daerah, Kemanfaatan Informasi Layanan sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah dengan 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Adaptasi Kebiasaan Baru Tatanan Normal Pasar Desa Karyawangi	96
Berinovasi Melawan Pandemi Agar Usaha di Pasar Tradisional Tetap Berjalan	73
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Adaptasi Kebiasaan baru	66
RT Siaga, siap siaga mengawal dan menjaga keamanan, kenyamanan wisatawan di Tasikmalaya	59
Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Apotek (SIA) Pada Adaptasi Kebiasaan Baru	80
Tampilan Beda Pasar Modern Semangat Menggebu Sambut Tatanan Normal Baru	53
REKAMAN DISABILITAS JOMPO DAN ODGJ DI DESA TERPENCIL (REKDISAMPOSANSIL)	108
DIAGNOTIC READING MANAJERIAL SEKOLAH KREATIF INOVATIF DI MASA PANDEMI	94
Stasiun Pemancar TV Lokal Sekolah Untuk PJJ	70
Kredit JIMAT (Jamban Idaman Masyarakat)	89

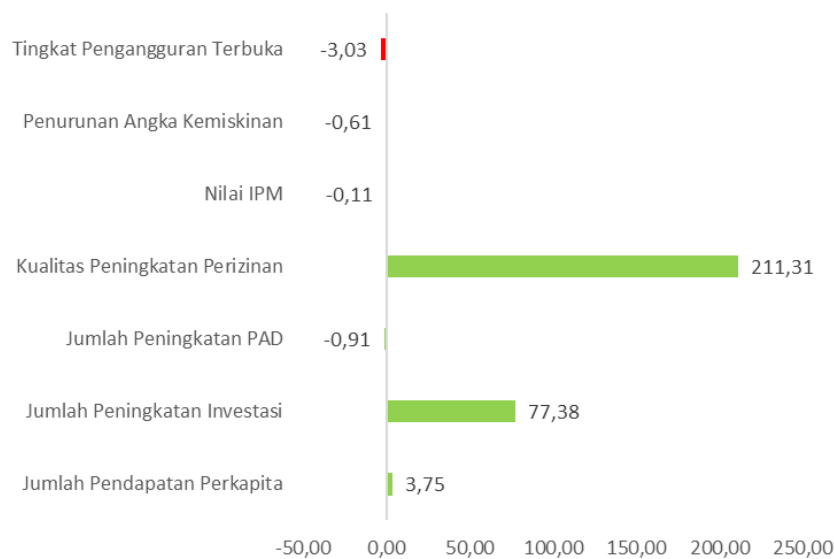
E. KOTA BANDUNG



Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bandung

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Bandung memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 45.0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



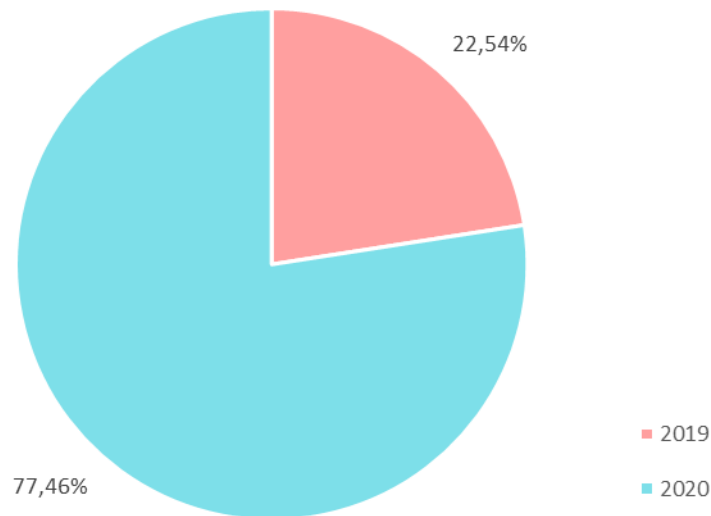
Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bandung

Dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bandung belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.03%, di mana nilai tersebut lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah sebesar -0.92%. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.6% di mana nilai tersebut lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah sebesar -0.2%. Dilihat dari indikator Nilai IPM, penurunan 0.11% dari tahun sebelumnya, hal ini lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah sebesar 0%.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 211.31% di mana nilai tersebut jauh lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Investasi, Kota Bandung juga mengalami peningkatan sebesar 77.38% di mana lebih tinggi dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Namun pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, PAD Kota Bandung menurun sebesar 0.91% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah minimal meningkat sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Bandung meningkat sebesar 3.75%, nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

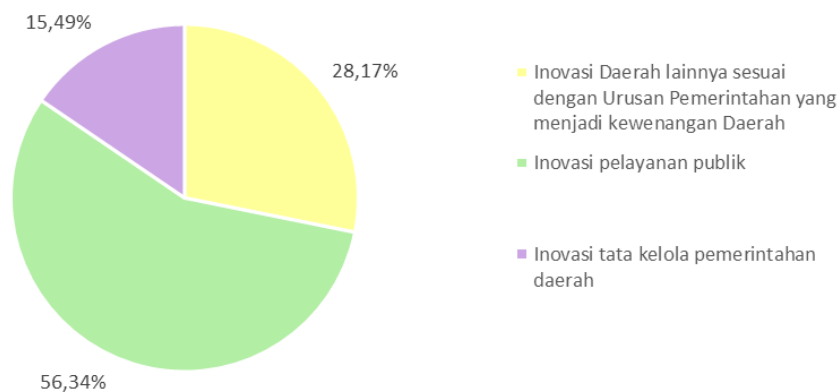
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bandung

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bandung mulai diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 16 (22.54%) inovasi dari 71 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 15 (41,67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

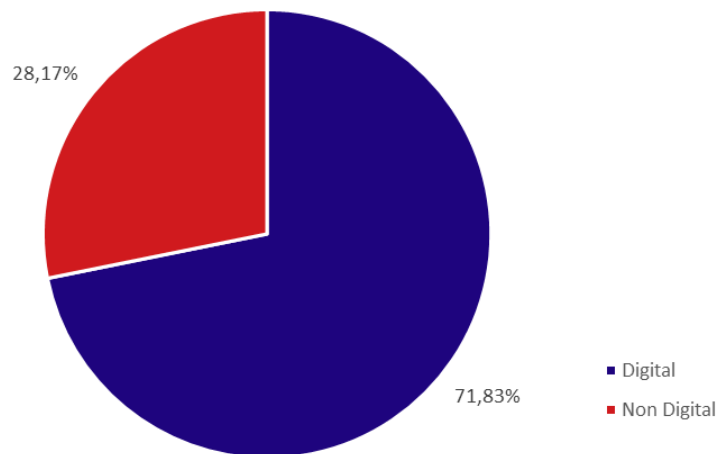
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bandung

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kota Bandung merupakan Inovasi Pelayanan Publik dengan jumlah 40 inovasi (56.34%), diikuti oleh Inovasi Daerah Lainnya sebanyak 20 inovasi (28,17%), dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebanyak 11 inovasi (15,49%)

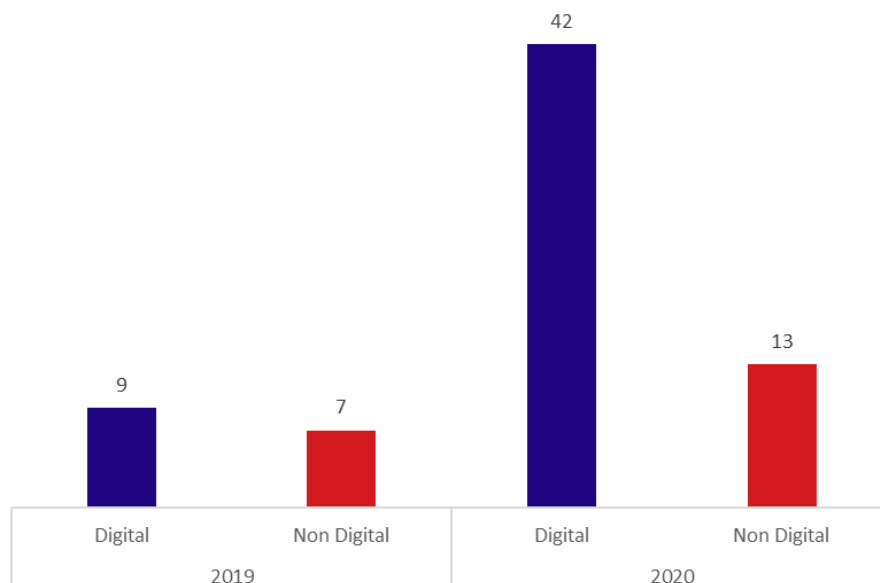
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bandung

Berdasarkan jenis inovasi, pada tahun penilaian 2021, terdapat 51 inovasi (71.83%) dari Kota Bandung yang merupakan inovasi digital, sedangkan untuk inovasi non digital terdapat 20 inovasi (28,17%).

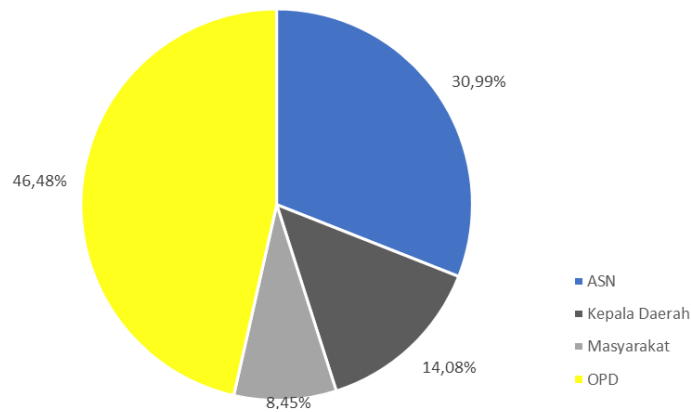
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bandung

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi diterapkan sejumlah 9 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 42 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital yang mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 13 inovasi.

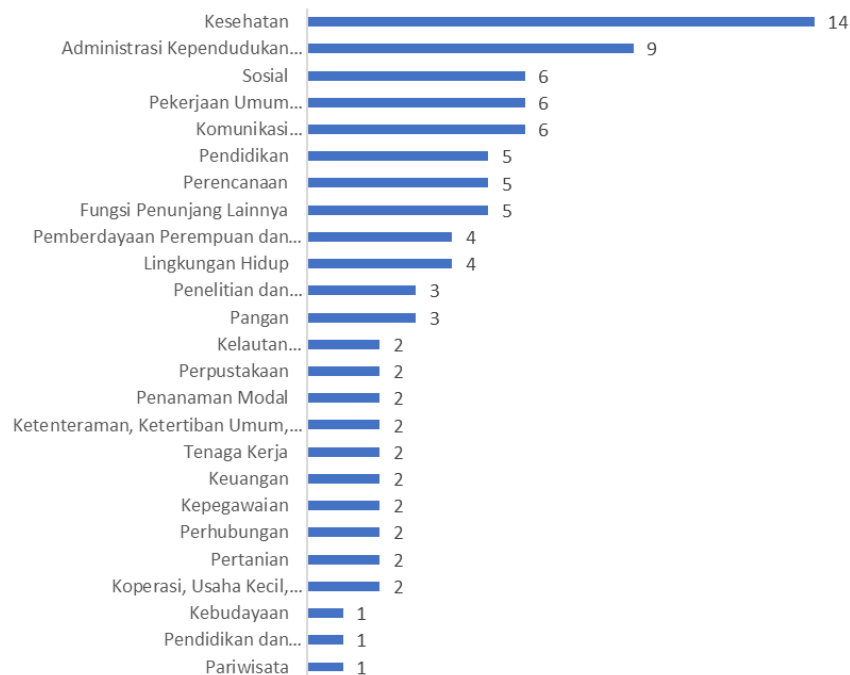
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bandung

Inisiator inovasi dari Kota Bandung cukup beragam, hal ini terlihat dari jenis inisiator yang berasal dari 4 kelompok berbeda. Sebanyak 33 inovasi (46.48%) berasal dari inisiatif OPD, kemudian 22 inovasi (30.99%) berasal dari inisiatif ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, 10 inovasi (14.08%) berasal inisiatif dari Kepala Daerah, dan 6 inovasi (8.45%) berasal dari inisiatif masyarakat.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

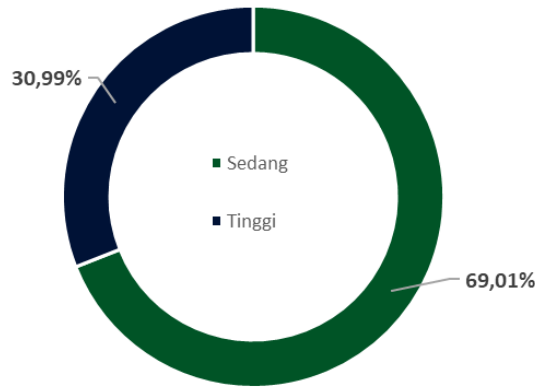


Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bandung

Sebaran inovasi daerah pada Kota Bandung berdasarkan urusan pemerintahan cukup bervariasi. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 14 inovasi dari 71 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 5 inovasi, urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 6 inovasi, urusan kesehatan dengan 14 inovasi, urusan sosial dengan 6 inovasi serta urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 2 inovasi.

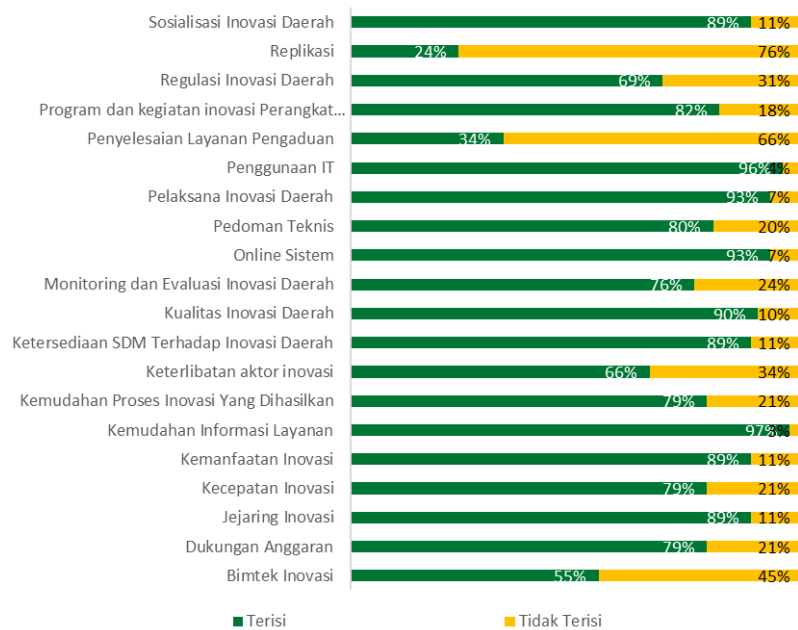
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bandung

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 49 (69,01%) inovasi dan terdapat 22 (30,99%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

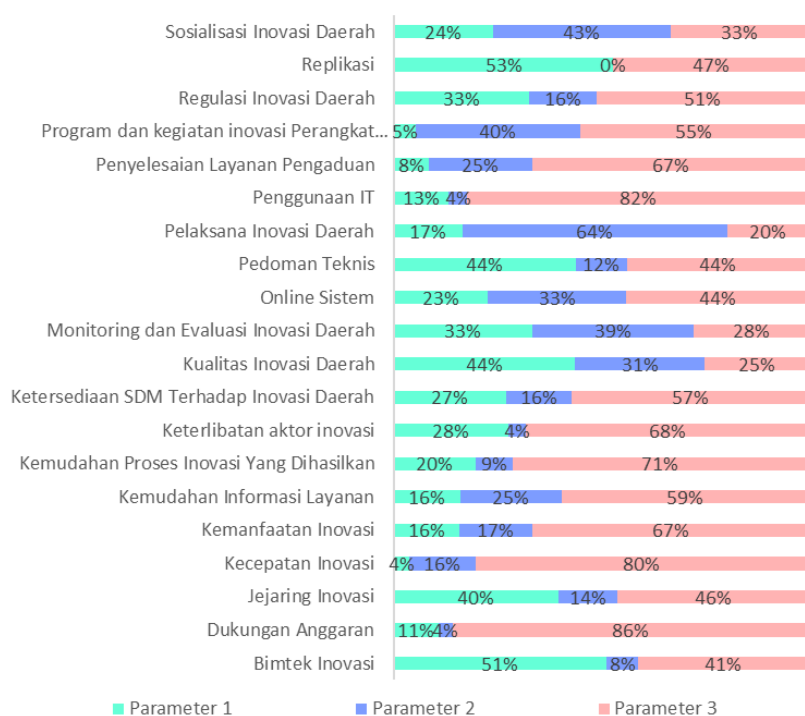
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bandung

Dari 71 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bandung, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 22,68% sedangkan 77,32% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Kemudahan Inovasi Layanan dan Penggunaan IT merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 97%, artinya 69 dari 72 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bandung telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 24% artinya hanya 17 dari 71 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT sebesar 86%, artinya 86% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 64% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 51% artinya 51% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

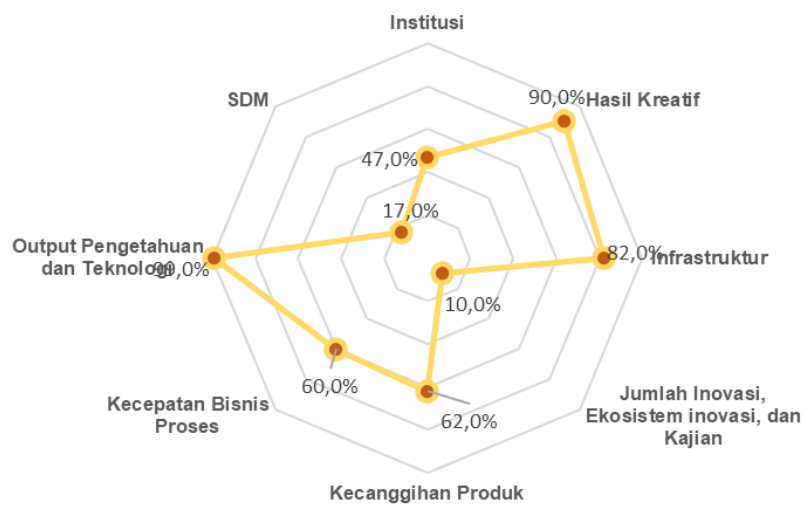
j. Daftar Inovasi Kota Bandung beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kota Bandung beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SEMUA DIGITAL LAYANAN KOTA (SADAYANA) - BANDUNG SMART CITY FORUM	133
SIMKURING (Sistem Informasi Manajemen Kegiatan UPT dan Monitoring)	132
Patrakomala (Patron Aplikasi Ekonomi Kreatif Berkelanjutan)	132
Bandung Integrated Online Licensing Application (BIOLA)	128
Unit Reaksi Cepat (URC)	124
Mini Lab Food Security dengan eWasmut nya	124
Transformasi BPG (Bandung Planning Gallery)	119
Waste to Food	118
SALAMAN (Selesai Dalam Genggaman)	116
E-PUNTEN (Elektronik Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen)	113
e-SATRIa versi Android	113
Bandung ICONIC (Innovation Contest and Coaching Clinic)	113
Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Kota Bandung	109
CIKALAT (Cinta Ka Balita Tamansari)	108
Bandung Smart Map Plus	108
LIKE (Layanan Administrasi Kepegawaian)	108
e-DALEV (Elektronik Pengendalian dan Evaluasi)	106
e-MUSRENBANG (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	103
e-LITE (Elektronik Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Teknologi)	101
PUSAT INFORMASI COVID-19 (PUSICOV)	100
Eco Enzym	100
Sistem Informasi Kewirausahaan UMKM Terintegrasi (SIRKUIT)	100
Jaring Pengaman Sosial (JPS)	99
E-Pustaka Bandung	99
Sistem Pendaftaran Online RSKIA Kota Bandung	98
Sistem Ketersediaan Tempat Tidur RSKIA Kota Bandung	98
Aplikasi Invest Bandung	96
e-LKPJ (Elektronik Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah)	94
SIPOFPO (Sistem Informasi Posyandu Four Point 0)	93
PEMUDA (Pemutakhiran Data Mandiri)	93
ASMARA SEJIWA BERJANJI	93
SaKOJA (Sakola Juara)	93
SITU PASKAL (Sistem Data Terpadu Pasirkaliki)	92
Aplikasi SIMONEL	89

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SINABAK (Sistem Informasi Anjab dan ABK)	89
Weekend Service	88
Anjungan Kartu Identitas Anak (KIA) Mandiri	88
RW Si CETAR	88
Sumur Imbuhan Dalam (SID)	87
ADU CEPAT (Pengaduan Untuk Cek Pemanfaatan Data)	87
e-YARIS	86
Ngageulis Lembur Sorangan (Liburan)	84
Sistem Informasi Integrasi Taman Bacaan dan Perpustakaan (SI INTAN) Kota Bandung	83
SI APLOAD	83
BEMO (Bandung Easy Mobility)	82
Sistem Kredensial Tenaga Kesehatan (Pengembangan SIMRS)	81
PERISAI (Peta Digital Data dan Informasi)	80
Aplikasi SIKUMBANG	80
Angkot Distancing Saredona BDG	80
NEW BIMMA	79
Podcast HumasBdg	78
KANDAGA (Konseling Daring Keluarga)	77
Inovasi Penanganan COVID-19 dan Realtime	77
Mang Bagja (Manajemen Bandung Kinerja)	77
Sistem Informasi Manajemen Desain Pembangunan SIMDP/SIDENOK	76
Portal Sukajadi	76
Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP)	72
PENJEBOL PASKAL	72
Buruan SAE	71
Telemedicine Pasien Rajal	67
Bandung Emergency Application Support atau BEAS.	64
Program Kesetaraan Paket A,B,C bagi Siswa Kurang Mampu	63
Kawasan Pengelolaan Sampah Mandiri RW 08	63
GEBBER	62
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMONREBI)	61
Pemetaan Pelaku Usaha Dengan Menggunakan Aplikasi My maps	60
SIKAYA (Sistem Kelas Maya)	60
e-Survey Kepuasan Masyarakat	59
Serial Bandung Juara	59
Rumah Edukasi	54
BANG KASEP	53

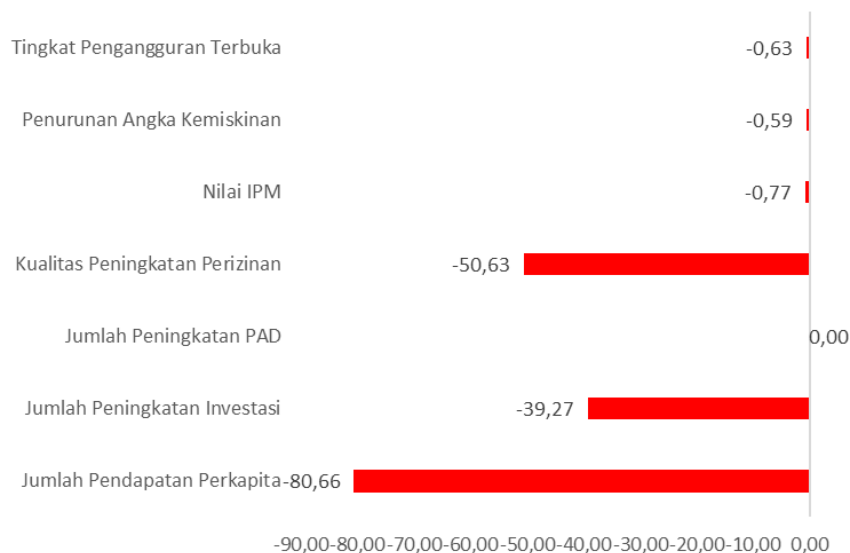
F. KOTA BANJAR



Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Banjar memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 99.0%, artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih rendah, yaitu 10.0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjar

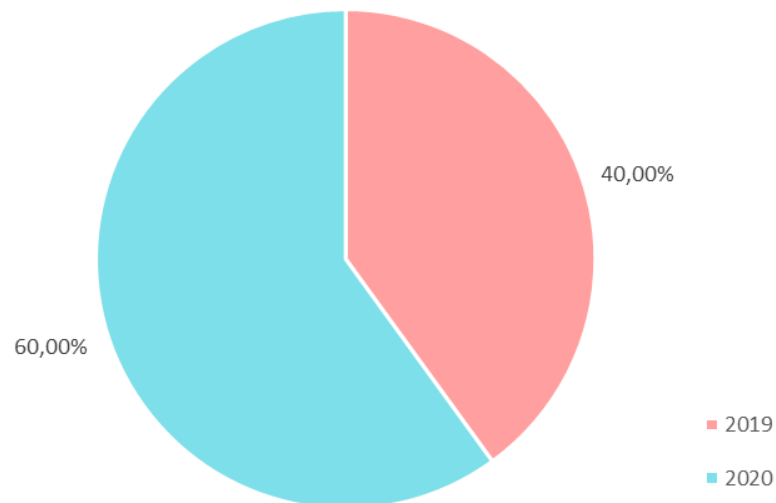
Dalam Laporan Inovasi Daerah tahun 2021 terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjar terdapat penurunan hampir semua indikator ukur. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0.63%, artinya

jumlah pengangguran terbuka Kota Banjar pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada indikator Penurunan Angka Kemiskinan, terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 0.59%. Dilihat dari indikator Nilai IPM, terdapat penurunan 0.77% dari tahun sebelumnya, hal ini lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah sebesar 0%.

Dalam indikator Kualitas Peningkatan Perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan oleh Kota Banjar menurun sebesar 50.63% di mana nilai tersebut lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 5%. Selain itu, pada indikator Jumlah Peningkatan PAD, realisasi PAD Kota Banjar pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 2019. Berdasarkan indikator Jumlah Investasi, Kota Banjar mengalami penurunan jumlah investasi baik yang berasal dari PMA maupun PMDN sebesar 80.38% di mana lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah yaitu peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Banjar menurun sebesar 80.66%, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

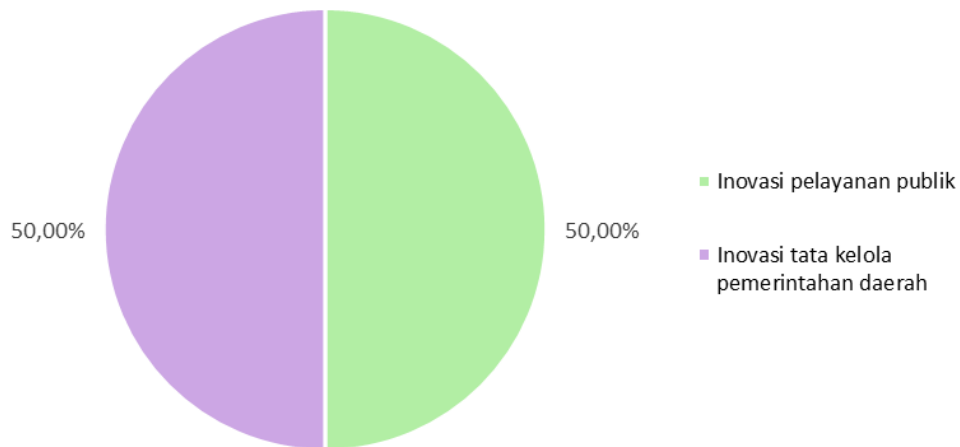
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjar

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banjar mulai diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 6 (60.00%) inovasi dari 10 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 4 (40.00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

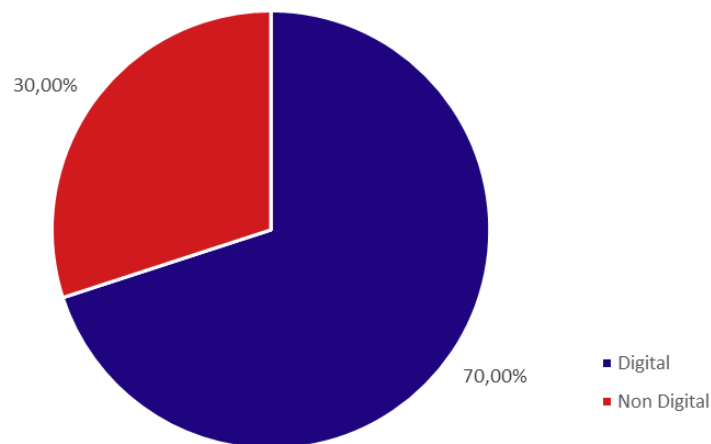
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjar

Berdasarkan bentuk inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kota Banjar merupakan Inovasi Pelayanan Publik dengan jumlah 5 inovasi (50.00%) dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebanyak 5 inovasi (50.00%)

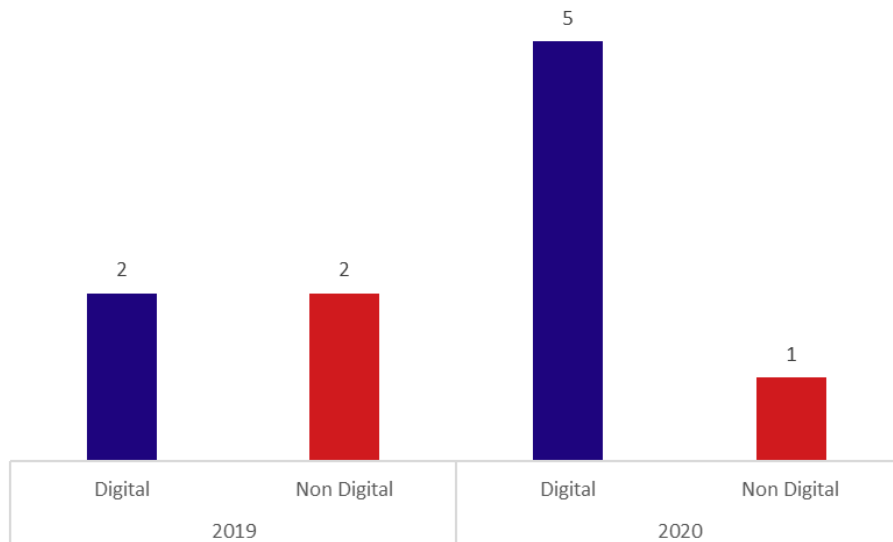
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjar

Berdasarkan jenis inovasi, sebagian besar inovasi daerah Kota Banjar merupakan inovasi digital dengan jumlah 7 inovasi (70.00%), sedangkan 3 inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

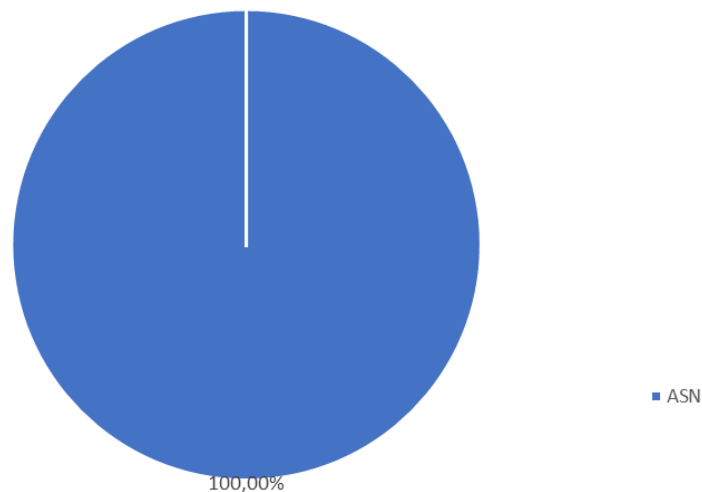
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjar

Berdasarkan tahun penerapan dan jenis inovasi, jumlah inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi diterapkan sejumlah 2 inovasi, meningkat menjadi 5 inovasi digital pada tahun 2020. Namun pada inovasi Non Digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi.

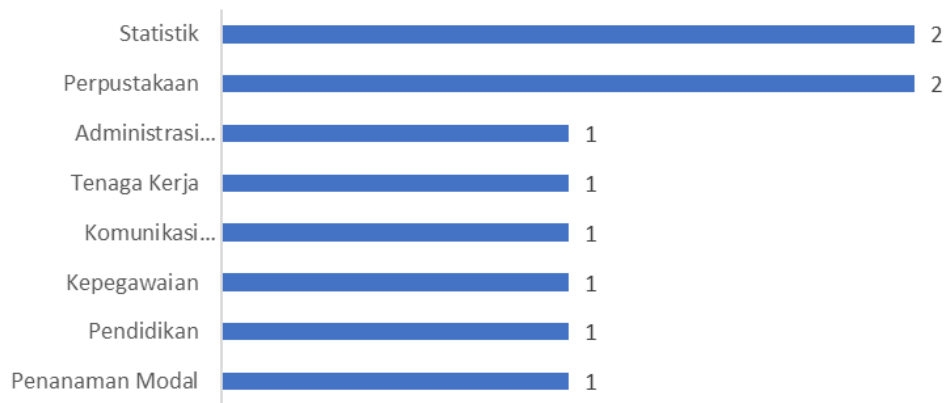
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjar

Inovasi daerah Kota Banjar pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 seluruhnya diinisiasi oleh ASN dengan jumlah inovasi 10.

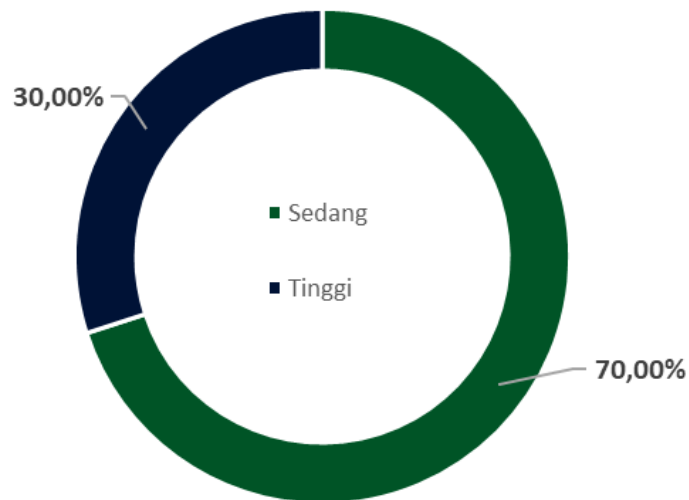
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjar

Berdasarkan urusan pemerintahan, inovasi daerah dari urusan Statistik dan Perpustakaan merupakan urusan terbanyak dengan jumlah masing – masing sebanyak 2 inovasi, selain itu terdapat inovasi yang berasal dari urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi.

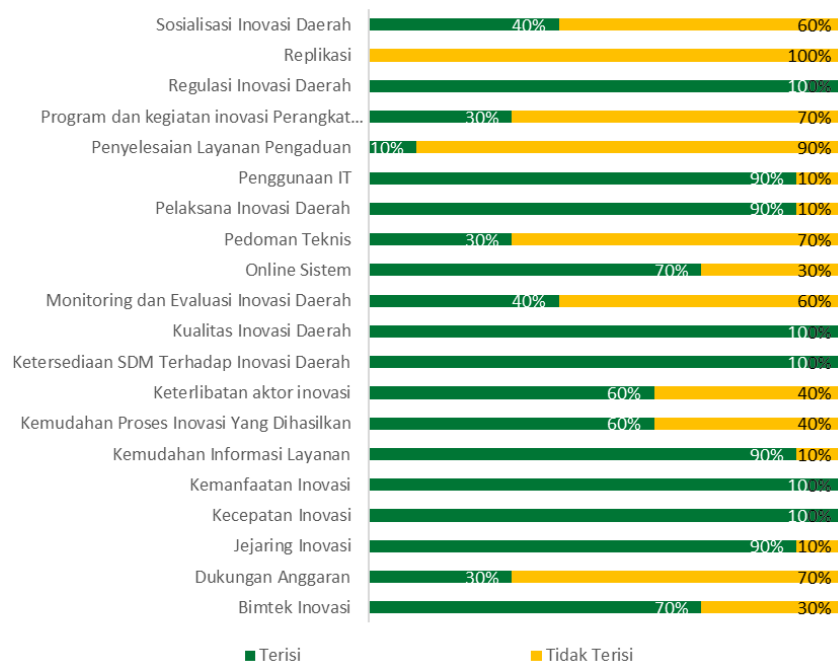
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Kota Banjar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sejumlah 7 (70,00%) inovasi dan terdapat 3 (30.00%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi.

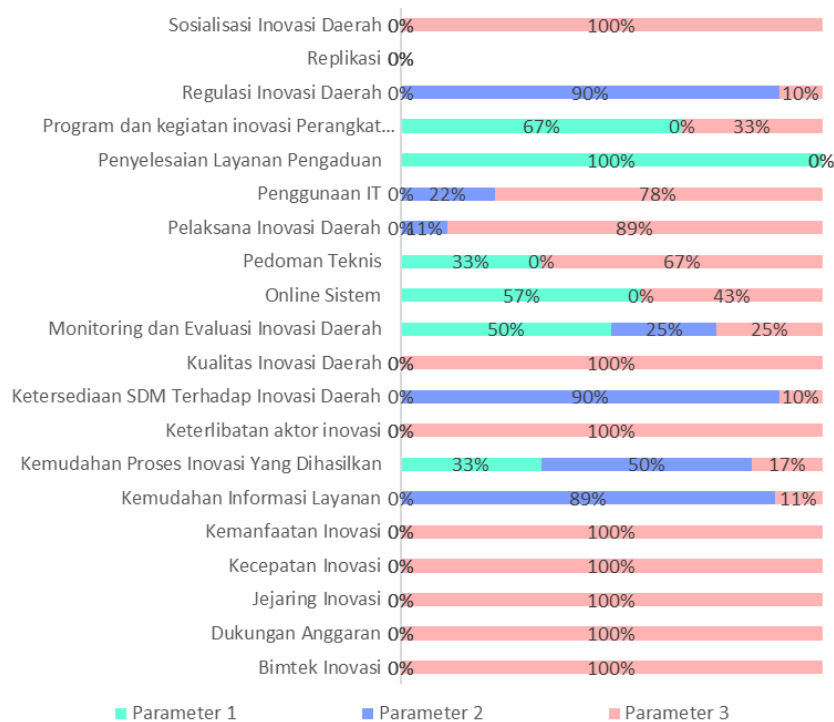
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjar

Dari 10 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bandung, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 35,00% sedangkan 75,00% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bandung telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya dari seluruh inovasi yang dilaporkan tidak terdapat data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi, artinya seluruh inovasi yang dilaporkan Kota Banjar telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter ketiga pada indikator – indikator tersebut. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Daerah sebesar 90% artinya 90% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Regulasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan sebesar 100% yang berarti dari seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung hanya memenuhi parameter pertama dalam indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan.

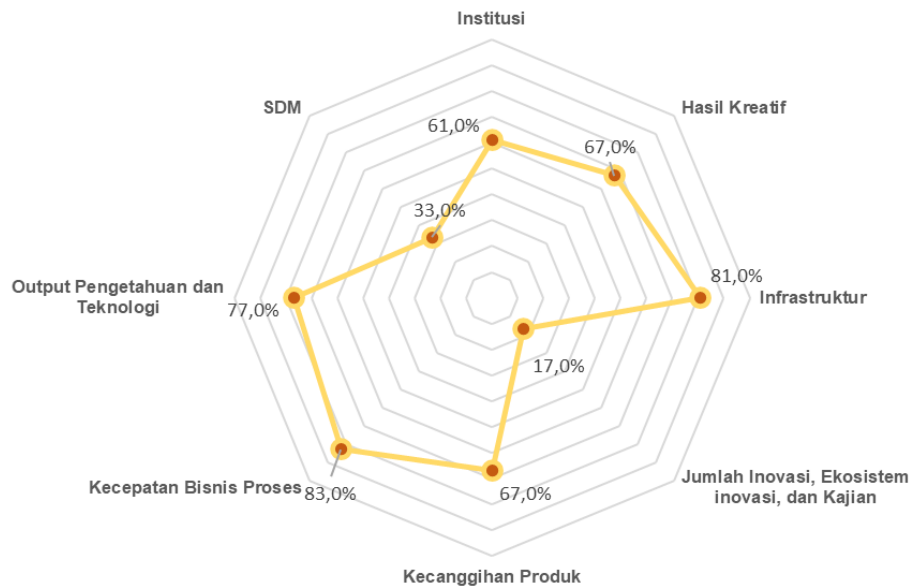
j. Daftar Inovasi Kota Banjar beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kota Banjar beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
MASARI LINE (Masyarakat Muktisari Online)	74
INOVASI SISTEM INFORMASI ARSIP IZIN DIGITAL MANAJEMEN FILE ARSIP DENGAN MUDAH DAN CEPAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR	77
ABATASA (Anak Banjar Tetap Sekolah)	126
Wisata Baca dan Literasi	104
Aplikasi Surat Terintegrasi (ASTER)	85
SISTEM INFORMASI ASET (SIMAS)	85

Jemput Bola Disdukcapil	121
PATAS PAKARANG RAJA (Peningkatan kapasiTAS SDM PurwaharJA, KARANGpanimbal, RAharja dan mekarharJA)	51
e-Pusda Kota Banjar	92

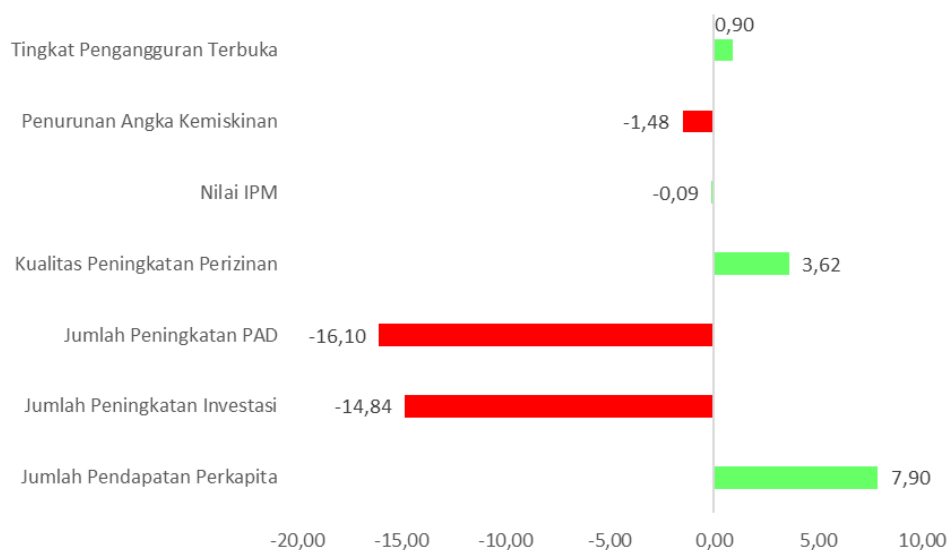
G. KOTA BEKASI



Gambar 67 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bekasi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Bekasi memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 17,0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

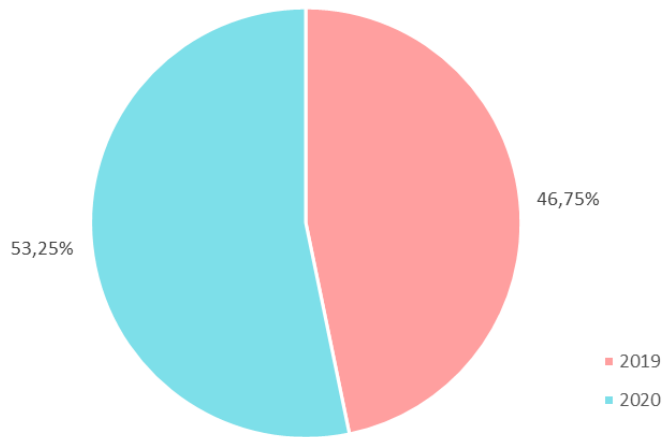


Gambar 68 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bekasi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bekasi belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama perbaikan pada Tingkat pengangguran terbuka yang turun sebesar 0,90%, nilai tersebut lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%. Kedua, indikator Angka Kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 1,48% yang mana masih berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah, turun 0,02%. Ketiga, indikator Nilai IPM yang tidak mengalami penurunan maupun kenaikan sama seperti standar nasional parameter indeks inovasi. Kemudian, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang naik sebesar 3,62%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter yang naik sebesar 5%, nilai tersebut masih cukup rendah. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD yang turun sebesar 16,10%, jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 14,84%, di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami kenaikan sebesar 7,9% lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

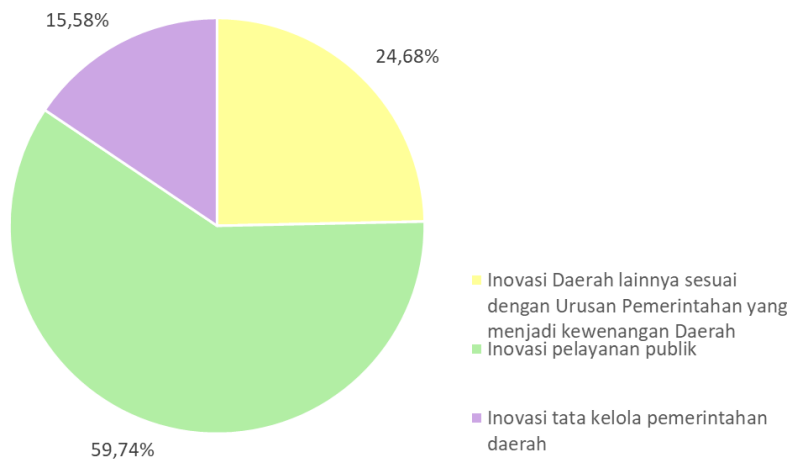
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bekasi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, jumlah inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2020 dan 2019 sedikit perbedaan. Pada tahun 2020 ada 41 (53,25%) inovasi baru mulai diterapkan dan pada tahun 2019 ada 36 (53,25%) yang baru mulai diterapkan.

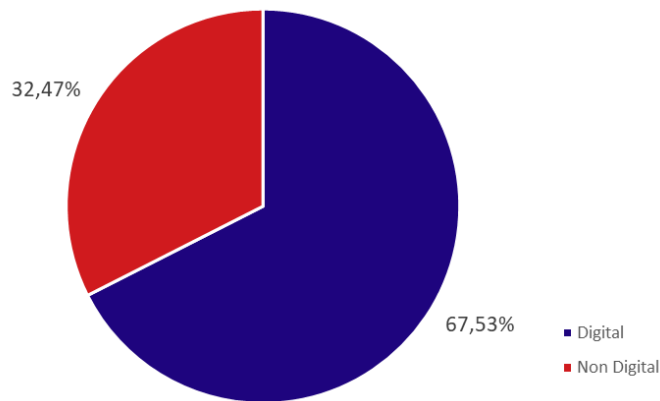
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bekasi

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bekasi, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik dengan 46 inovasi (59,74%). Kemudian bentuk lainnya sejumlah 19 inovasi (24,68%) dan 12 inovasi (15,58%) lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan.

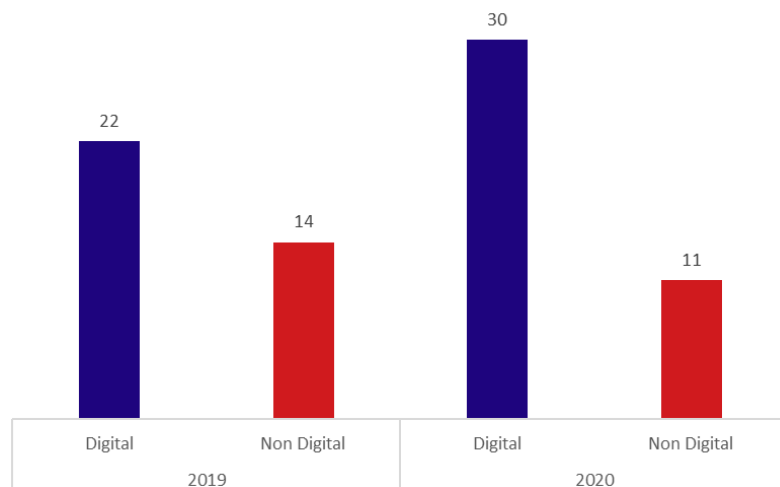
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bekasi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 52 (67,53%) dari 77 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Bekasi merupakan inovasi digital, kemudian 25 inovasi (32,47%) merupakan inovasi non-digital.

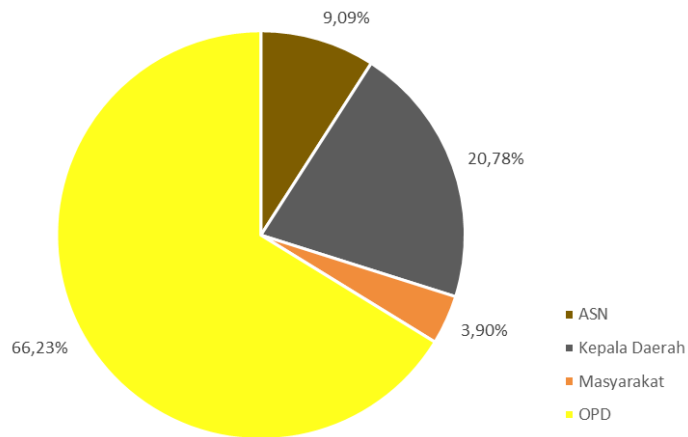
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bekasi

Terdapat kenaikan dan penurunan jumlah inovasi baru yang diterapkan berdasarkan jenis dan tahun penerapan inovasi di Kota Bekasi. Inovasi digital yang mulai diterapkan di tahun 2020 naik sebanyak 8 inovasi digital yaitu 22 di tahun 2019 kemudian 30 di tahun 2020. Untuk inovasi non digital, ada 14 inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2019 sementara di tahun 2020 ada 11 inovasi baru yang mulai diterapkan.

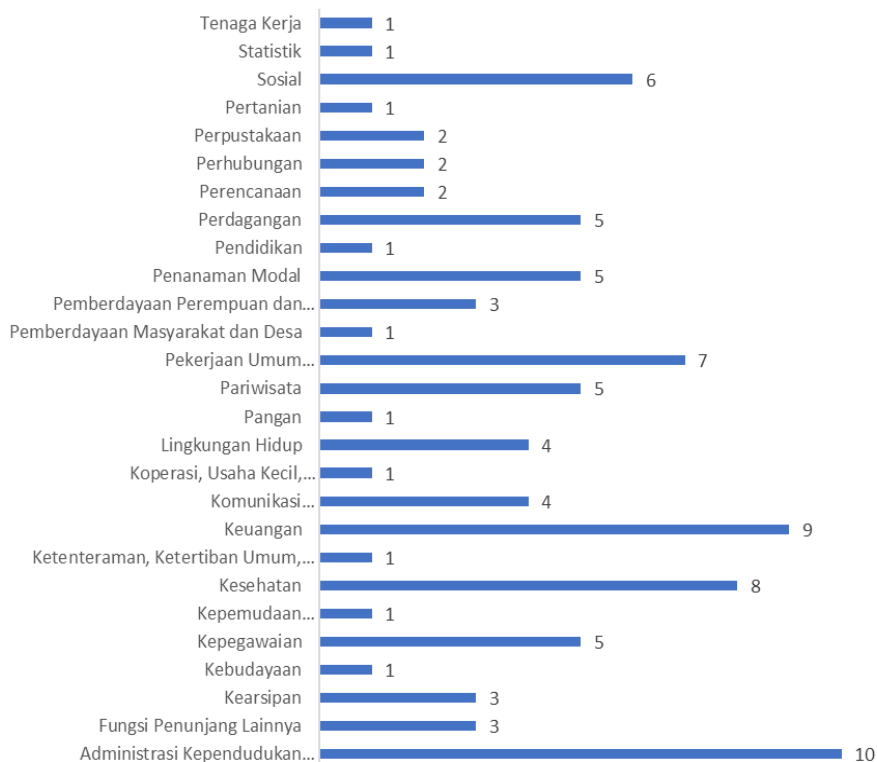
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bekasi

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Bekasi pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 51 (66,23%) inovasi sementara 16 (20,78%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN sebanyak 7 (9,09%) kemudian 3 inovasi (3,90%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

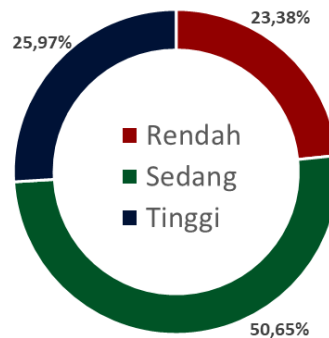
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bekasi

Sebaran inovasi daerah pada Kota Bekasi berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Administrasi dan Pencatatan Sipil dengan 10 inovasi. Dari 6 urusan wajib, terdapat urusan yang telah diterapkan inovasi yaitu pada urusan PUPR dengan 7 inovasi kemudian sosial, pendidikan dan kesehatan serta trantibumlinmas dengan masing-masing 1 inovasi.

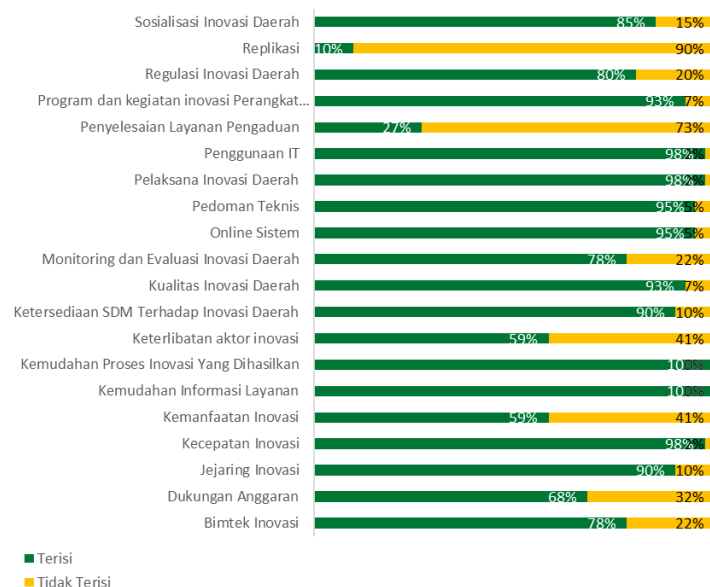
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bekasi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, di mana terdapat 39 (50,65%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 20 (25,97%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 18 (23,38%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

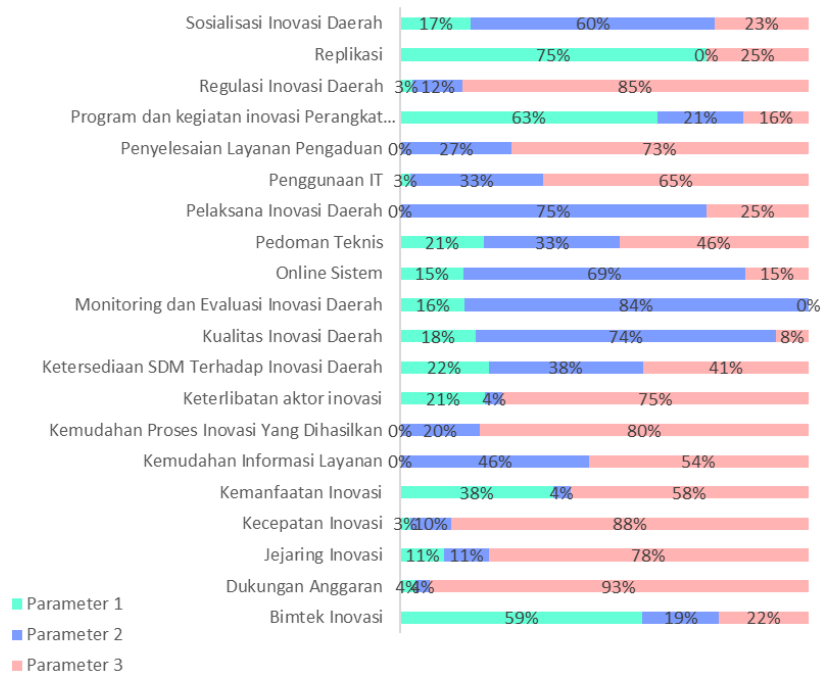


Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bekasi, diperoleh rata-rata inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 79,63% sedangkan 20,37% lainnya tidak terisi data pendukung. Ada indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dan Kemudahan Informasi Layanan. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bekasi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 10% artinya hanya 10% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 93%, artinya hampir seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi sebesar 84% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 75% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Bekasi beserta Skor Kematangannya

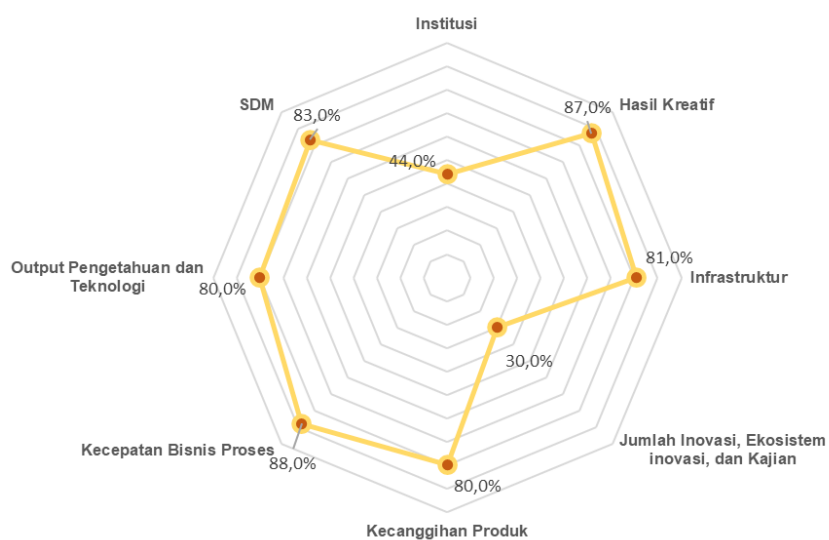
Tabel 8 Daftar Inovasi Kota Bekasi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Neosata (New Normal Tempat Pariwisata) Kota Bekasi	15
Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik DPMPSTSP pada New Normal Life	15
STAYCATION DI HOTEL KOTA BEKASI	15
Implementasi Tatahan Normal Baru AIR (Adaptasi, Interaksi, Rezeki)	15
Neopatra (New Normal Pasar Tradisional) Kota Bekasi	15
Neopamor (New Normal Pasar Modern) Kota Bekasi	15
Neotel (New Normal Hotel) Kota Bekasi	15
Neorestro (New Normal Restoran) Kota Bekasi	15
Neotrans (New Normal Transportasi Umum) Kota Bekasi	15
Pelayanan Sistem Antar Obat (SITARO) Pasien RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	105
SIKERJA (Sistem Aplikasi Kinerja Aparatur)	103
Aplikasi SIBEROJOL (Sistem Berobat Jalan Online) Pasien RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	111
Coaching dan Mentoring Clinic PNS Kota Bekasi	16
Pemagangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	12
Pengembangan Kompetensi PNS	20
Service Tracking Sytem Kecamatan Mustikajaya	59
KOLECER (Kotak Literasi Cerdas)	83
SIPJALU (Sistem Informasi Pengendalian Pajak Penerangan Jalan Umum)	80
Booking Antrian Online Perekaman E-KTP Kecamatan Bekasi Utara	113
Pojok Baca	85
Peningkatan Layanan Administrasi Ketatausahaan Melalui Sistem Administrasi Ketatausahaan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	100
Pro ABu Lokal (PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI)	57
Aplikasi INTEGRITY RSUDCAM SYSTEM (IRS) / Aplikasi PCR COVID-19 Pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	106
Patriot Decision Support System (PDSS)	133
Cetak Izin Mandiri	110
Pelayanan Inovasi Ada Apa Dengan CathLab (AADC) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	74
Pelayanan Poli Forensik dan Medikolegal yang Terintegrasi (Lapormater) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	94
CC Room (ATCS) Automatic Management Traffic Control system)	65
Pelayanan Pasar Online di Pasar Rakyat se-Kota Bekasi	93

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Program Bank Sampah Kecamatan Rawalumbu	67
Bekasi Emergency System (BEST)	88
JEBOL DUKCAPIL	86
iPBB Kota Bekasi	86
SIPADAT BERISI (Sistem Pemanfaatan Data Berbasis Internet)	115
Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (ESPTPD)	113
Aplikasi SI JONI (Sistem Informasi Jaminan Online) dalam Program Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK Kota Bekasi.	104
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN MELALUI GERAKAN "SISWA PEDULI LINGKUNGAN DI (SAPU LIDI)" KECAMATAN BEKASI TIMUR	87
Inovasi Kecamatan Bekasi Barat dalam Gerakan Serentak Pertumbuhan Ekonomi Rakyat "IKAT GESPER"	27
High Speed Tax Reklame Service	82
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi melalui Rancangan Peraturan Daerah	20
Pesan Layan Antar Kecamatan Pondokmelati (Pesanan PomeI)	45
APLIKASI SISTEM PELAPORAN PEMBANGUNAN (SIMPELBANG)	102
E-Sosial	41
Sistem Informasi Aspirasi Publik Sekretariat DPRD Kota Bekasi	78
LaporQu	87
BICOV-19	68
IRS (Integrity RSUDCAM System) / IRS - Kepegawaian RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	93
E-Sipeng Kesbangpol (SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BADAN KESBANGPOL)	26
Contact Center Services Kecamatan Bantargebang	78
Penerapan Adaptasi Pola Kehidupan Baru terhadap para pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19	18
Kecamatan Layak Anak (KECALA) Patriot	79
SPARKO (Spartan Komando)	90
Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT)	92
PAYMENT ONLINE SYSTEM (POS) RETRIBUSI DAERAH KOTA BEKASI	50
SISTEM INFORMASI PELAYANAN VALIDASI SSPD BPHTB ONLINE (SIS VALLEN)	88
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN DAERAH (SIMDARA) V.2	84
Manajemen Informasi Integrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Mister PBB)	72
SURAT KUASA KHUSUS (SKK) PENAGIHAN PAJAK DAERAH	75
Forum Anak Kota Bekasi (FORAKSI)	83
SISTEM OTOMATISASI PERENCANAAN (SISTOPER) BAPENDA KOTA BEKASI	100

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
TELEPON SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (TESA)	95
System Informasi Pendataan Organisasi Sosial on The Web (ORSOS OTW)	98
HALO PAMOR	104
Medan Satria Melayani dan Menyapa Warga (MESRA MENYAPA)	65
PEMATUSAN	80
URC PENERANGAN JALAN UMUM	86
Sistem Informasi Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIP-PKS)	107
Optimalisasi Pelayanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jalanan Berbasis Web Pada Dinas Sosial Kota Bekasi	82
URC BINA MARGA	84
Sistem Manajemen Keamanan Informasi	107
Mall Pelayanan Publik	116
Aplikasi Sertifikat Keterangan Kematian	104
MOTEKAR BERSAHAJA	92
Plasa Pelayanan Sosial (PPS)	95
Sistem Verifikasi dan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial (SIKITA)	106
DUDUK MESRA (PENGADUAN DISDUKCAPIL MELAYANI MASYARAKAT)	103
SISTEM PELAYANAN ORANG ASING (SIP_ORA)	99

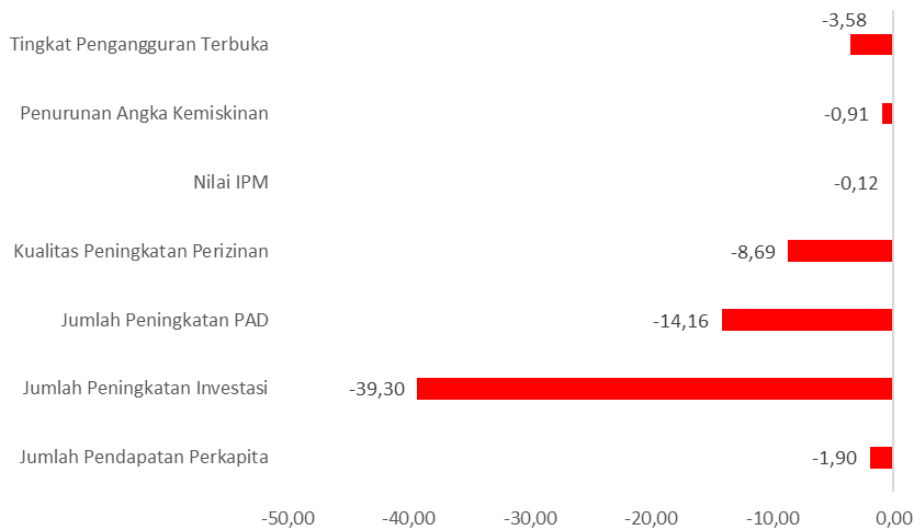
H. KOTA BOGOR



Gambar 78 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bogor

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Bogor memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 88,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada kedua variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 30,0% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

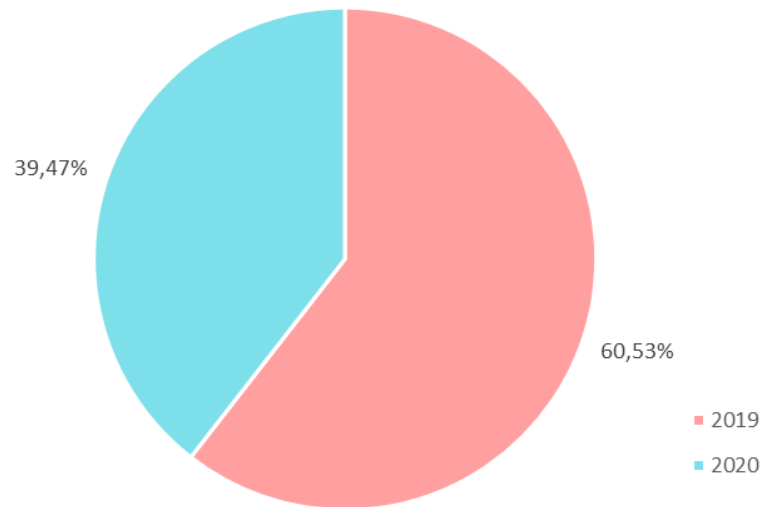


Gambar 79 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bogor

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bogor mengalami penurunan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 14,16% cukup rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah tahun 2022 yaitu naik 8%. Indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 3,58%. Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.91%, angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0.12% di mana nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 8,69%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang turun sebesar 39,30% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 1,9% yang mana nilai ini lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

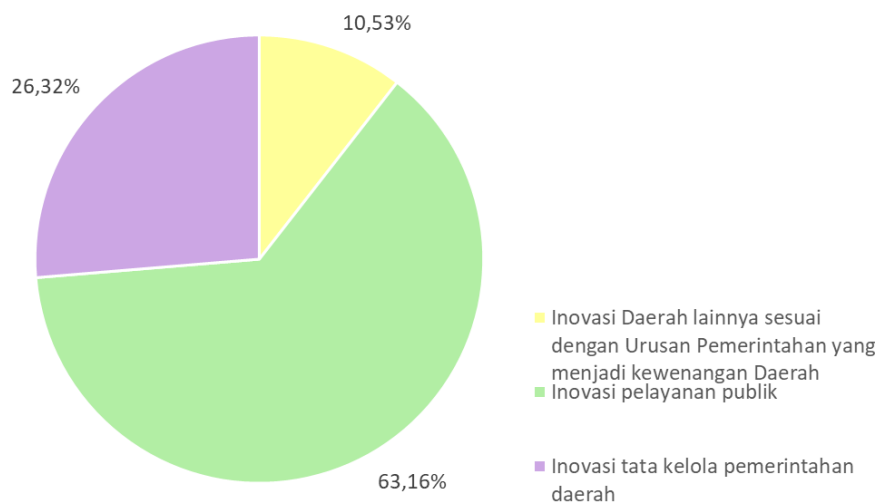
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bogor

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bogor telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 23 (60,53%) inovasi dari 38 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 15 (39,47%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

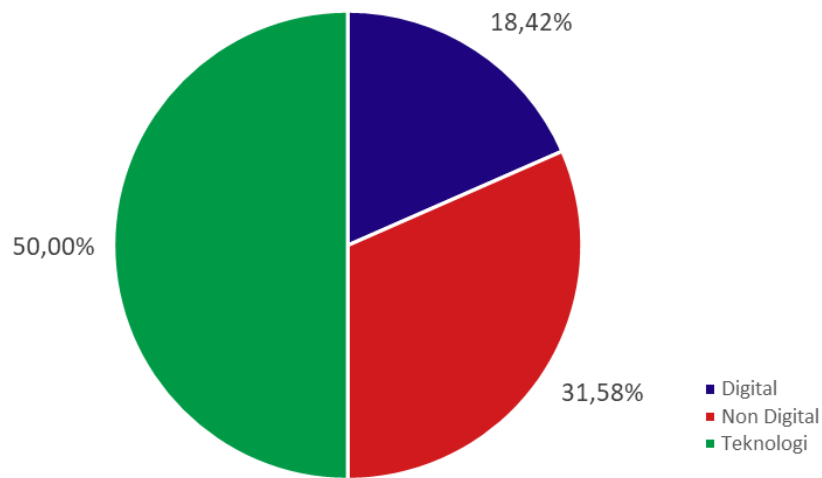


Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bogor

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bogor, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 24 (63,16%) inovasi,

10 (26,32%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan dan 4 (10,53%) inovasi lainnya adalah inovasi bentuk lainnya.

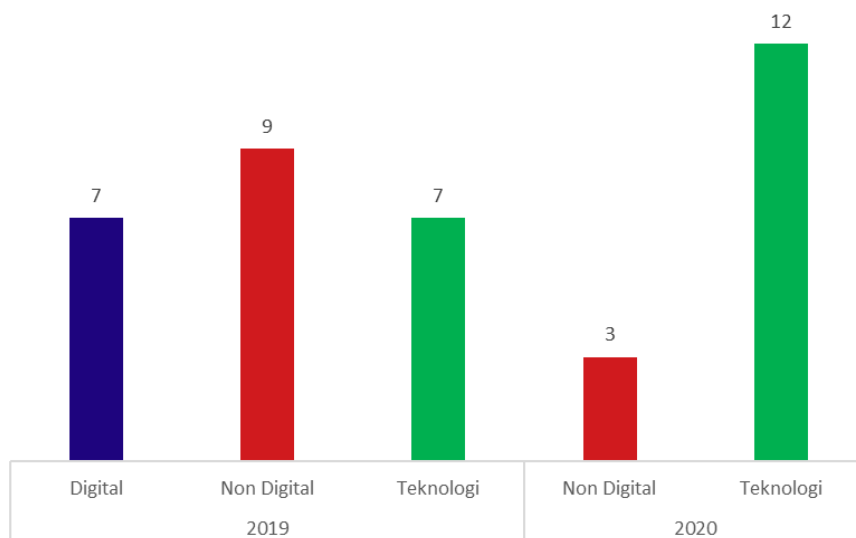
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bogor

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 19 (50,00%) dari 38 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Bogor merupakan inovasi Teknologi, kemudian 12 (31,58%) merupakan inovasi Non Digital dan 7 (18,42%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

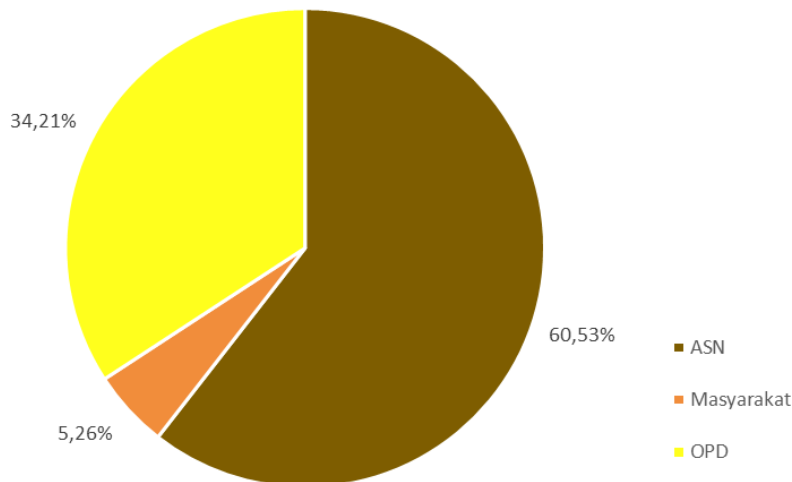


Gambar 83 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bogor

Secara keseluruhan, terdapat penurunan jumlah inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2019 dan 2020. Inovasi digital baru yang diterapkan di tahun 2019 berjumlah 7 inovasi, jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan jumlah inovasi digital baru yang ditetapkan di

tahun 2020. Sejalan dengan inovasi non digital di mana di tahun 2020 terdapat 3 inovasi baru yang ditahun sebelumnya 9 inovasi baru yang terapkan. Terakhir inovasi teknologi, pada tahun 2019 terdapat 9 inovasi baru mulai diterapkan kemudian 3 inovasi ditetapkan pada tahun 2020.

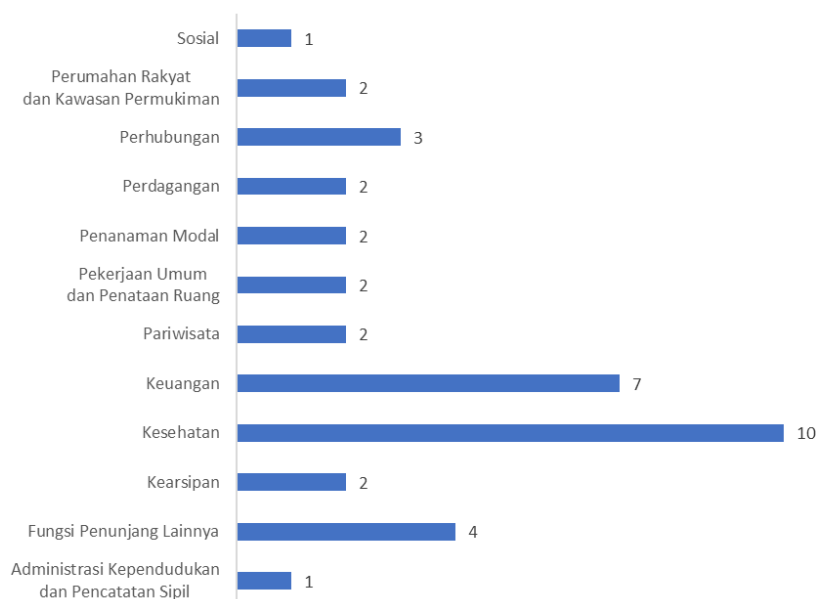
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bogor

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Bogor pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 23 (60,53%) inovasi kemudian 13 (34,21%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah. 2 inovasi (5,26%) merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

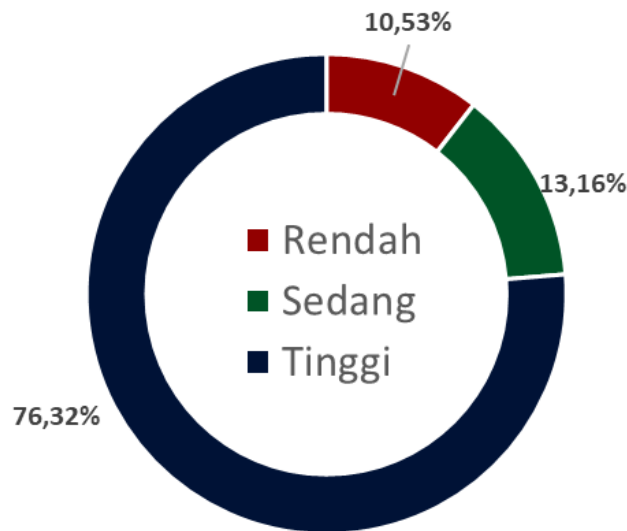
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bogor

Sebaran inovasi daerah pada Kota Bogor berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Kesehatan dengan 10 inovasi kemudian masing-masing 7 inovasi merupakan inovasi dalam urusan Keuangan, 4 inovasi dari urusan penunjang lainnya, 3 inovasi dari urusan perhubungan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 4 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Sosial, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Kesehatan, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum melaporkan.

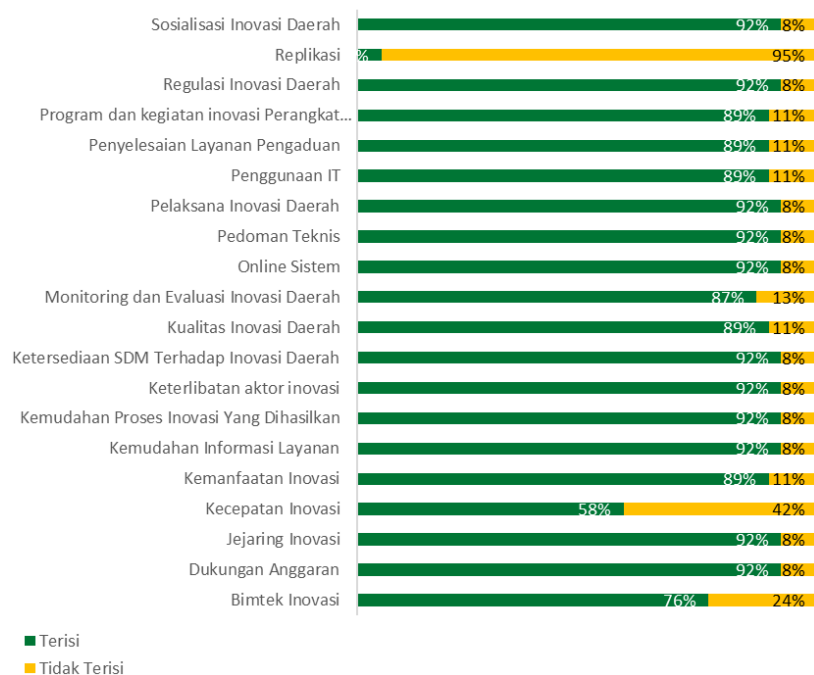
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bogor

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan tinggi, di mana terdapat 29 (76,32%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Kemudian terdapat 5 (13,16%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan 4 (10,53%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

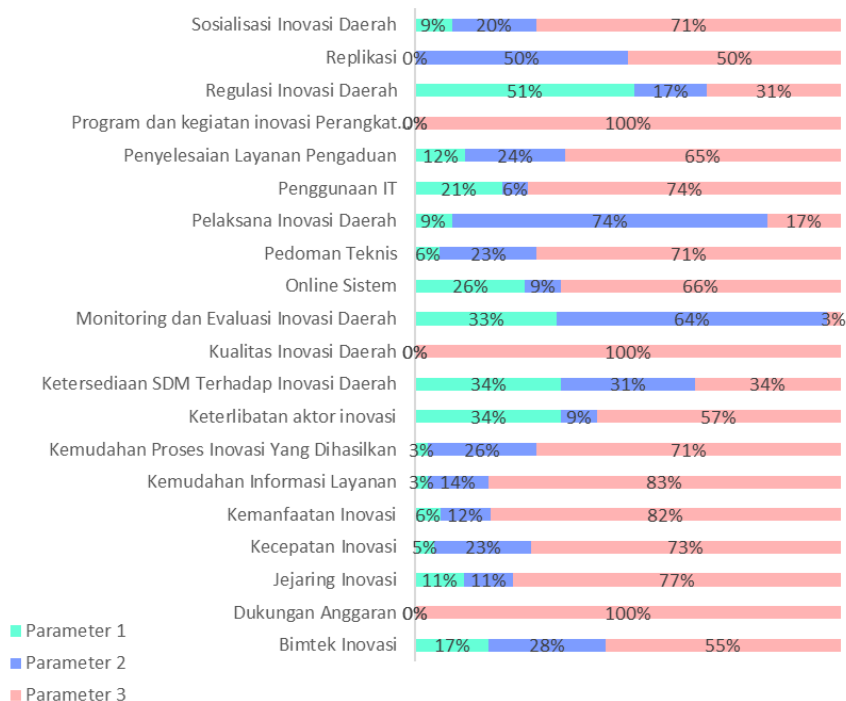


Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bogor, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 84,34% sedangkan 15,66% lainnya tidak terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian tertinggi 92%, yaitu: ISosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bogor telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 5% artinya baru sedikit inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Kualitas Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 64% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah Regulasi Inovasi Daerah sebesar 51% artinya separuh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

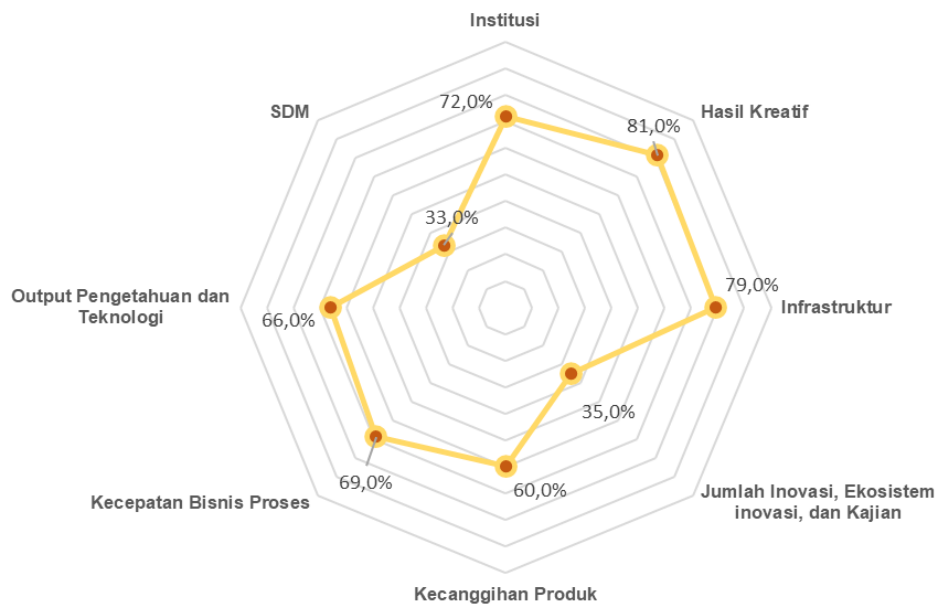
j. Daftar Inovasi Kota Bogor beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kota Bogor beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Layanan Publik di Kota Bogor	0
Bogor Kota Dalam Taman	0
Adaptasi Kebiasaan Baru Pasar Modern di Kota Bogor	0
Booking Antrian Online MPP	130
SEHAT ALA BADRA (SEHAT ALAMI BADAN/RAGA)	72
“Mobile Laktasi” atau “MOLASI”	107
SOMETHING KA DOOR DOOR	87
GEMAS “Generasi Emas Anak Sehat”	62

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
DIVA DARA	46
SAVA 61 (periksa iVA 6 bulan dan 1 tahun)	79
Gadar Polisi (Gerakan Sadar Polio Injeksi)	105
SIP BOS (Sadari, Ingat, Pastikan Balita Anda Mendapat Imunisasi Booster)	97
Management Informasi System (MIS)	114
SIMA PANGERAN	128
PATEN Kecamatan Bogor Utara	103
SIMANTEP	121
SISIRAH (Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau)	102
Website Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	118
SIMAE (Sistem Informasi Manajemen Angkutan Elektronik)	114
SIMASDA (Sistem Manajemen Aset Daerah) Kota Bogor	126
e-SPPT Kota Bogor	137
SIMA PANGERAN (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)	127
EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Kota Bogor	134
API BPN (Application Programming Interface Badan Pertanahan Nasional)	125
e-Retribusi	122
PBB Online Kota Bogor	141
SIMTAKA (Sistem Manajemen Tata Naskah)	105
SIPASPROP (Sistem Informasi Pasar Properti) Kota Bogor	129
SIVERA (Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah) Kota Bogor	127
SiDoGi (Sistem Informasi Dokumen Digital)	109
VO BPHTB (Validasi Online BPHTB) Kota Bogor	133
Kujang Fresh Perumda Pasar Pakuan Jaya	109
SOLID (Sosial Integrasi Data) Kota Bogor	137
SIKANCIL BERLARI (Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berintegritas Layanan Prima)	127
Prokes di Restoran Bumi Aki Pajajaran	125
INTERAKSI DGIS (INTEGRASI, KOLABORASI, AKSELERASI PENGGUNAAN DRONE DAN GIS)	124
MIS LLTT (Management Information System Ver 2 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	133
e-MOLEN (Sistem Informasi Monitoring Online) Kota Bogor	131

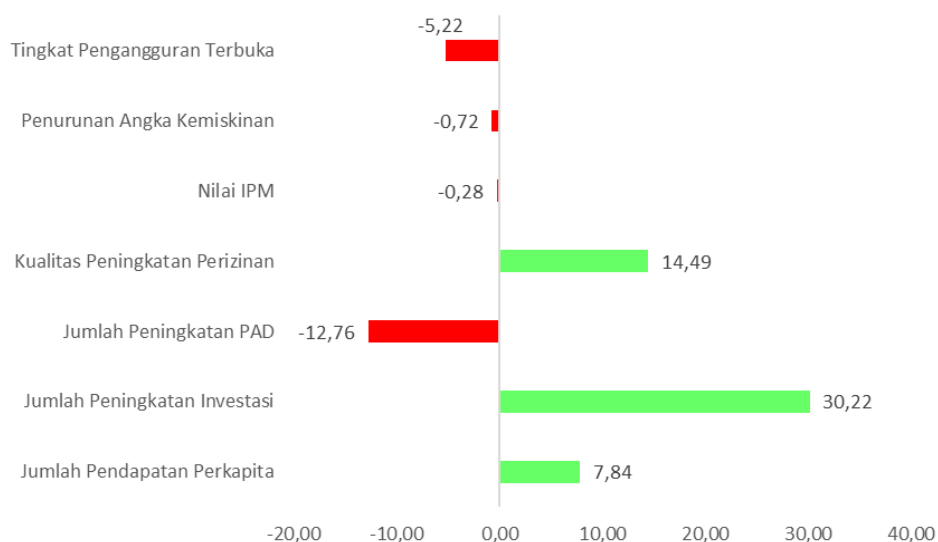
I. KOTA CIMAHI



Gambar 89 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Cimahi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Cimahi memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 81,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Sumber Daya Manusia sangat rendah rendah, yaitu 33,00% di mana artinya skor indikator dalam variabel tersebut yang telah terisi pada parameter 2 pada pelaporan indeks inovasi daerah tahun 2021.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 90 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cimahi

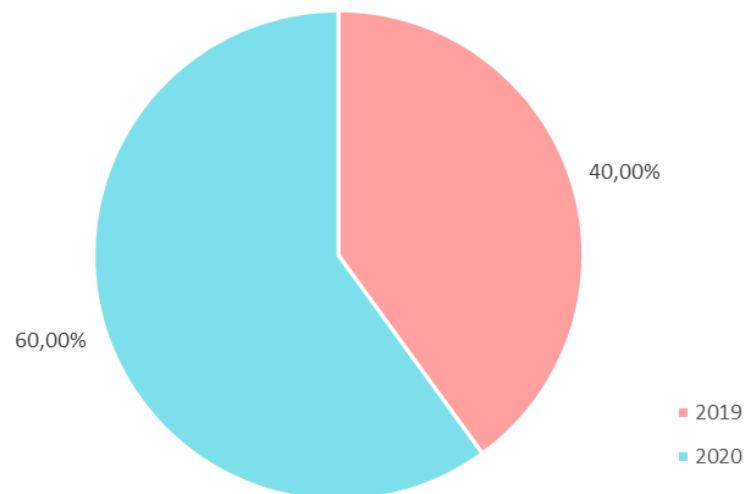
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui

grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cimahi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 5,22%. Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Kedua, indikator Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0,72%, kondisi tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0,28%, kondisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Cimahi menunjukkan penurunan sebesar 12,76%, yang lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

Sebaliknya, indikator lain menunjukkan perbaikan atau bernilai tetap dari tahun 2020. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 30,22% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Kemudian, indikator jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami kenaikan sebesar 7,84% yang mana lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah tahun 2020 yaitu turun sebesar 1,85%. Kualitas Peningkatan Perizinan yang mengalami penurunan sebesar 14,49%, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

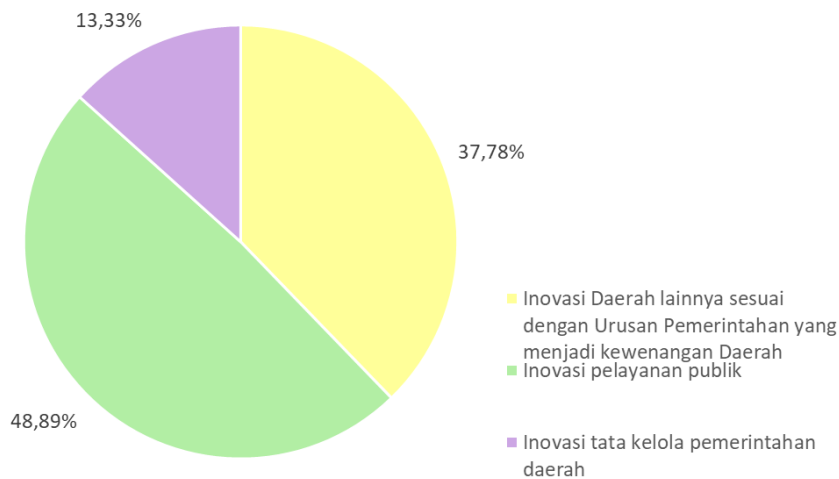
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Cimahi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cimahi telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 27 (60%) inovasi dari 45 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 18 (40,00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

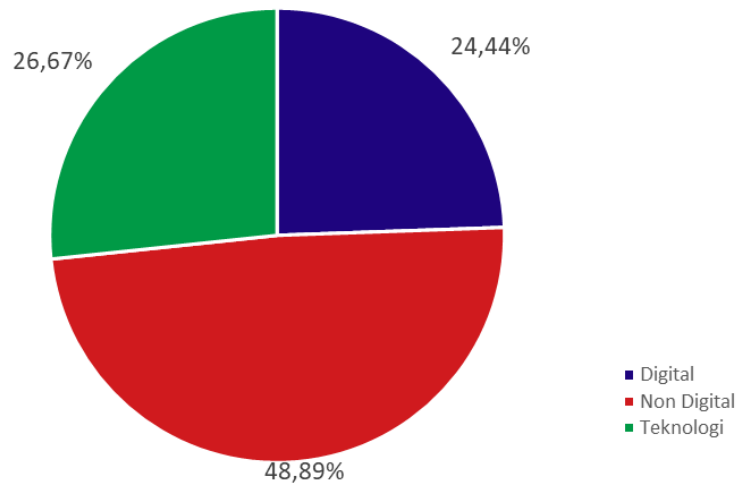
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Cimahi

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cimahi, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 22 (48,89%) inovasi, kemudian 17 (37,78%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya, dan 6 (13,33%) inovasi lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan.

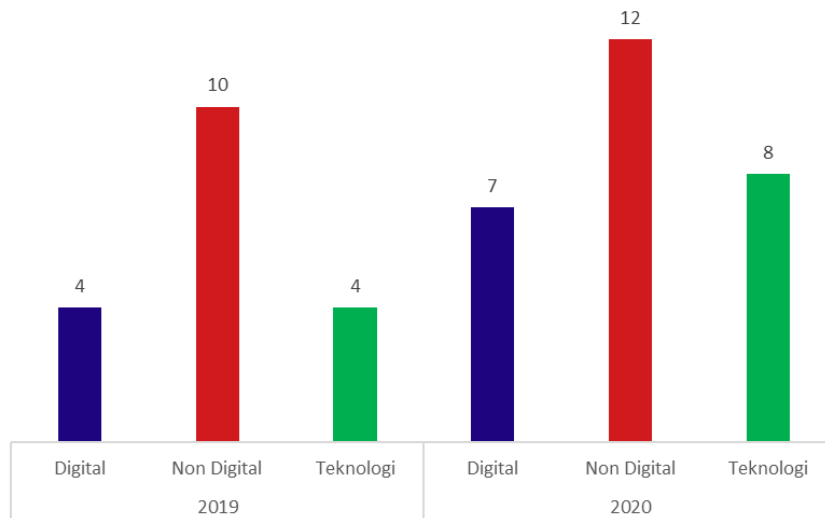
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Cimahi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 22 (48,89%) dari 45 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Cimahi merupakan inovasi non-digital, 12 (26,67%) inovasi merupakan inovasi Teknologi dan 11 inovasi (24,44%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

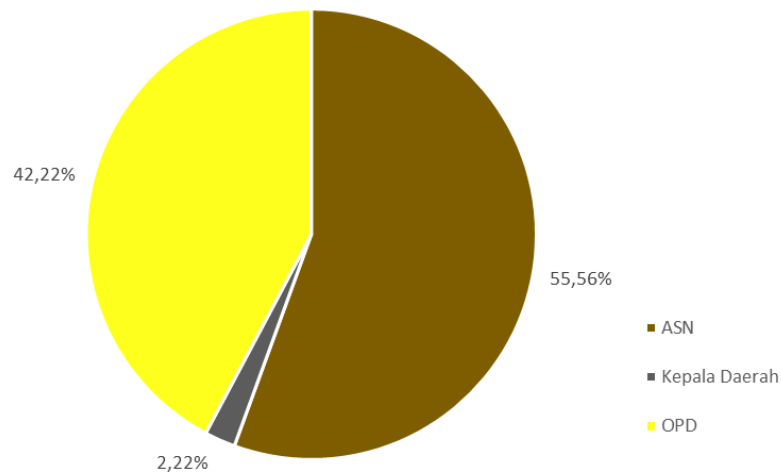
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 94 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Cimahi

Terdapat kenaikan jumlah inovasi digital yang mulai diterapkan pada tahun 2020 dibanding 2019. Inovasi digital naik dari 4 inovasi baru pada tahun 2019 menjadi 7 inovasi baru pada tahun 2020. Sejalan dengan itu, inovasi non digital juga mengalami kenaikan jumlah inovasi baru yang mulai diterapkan dari 10 pada tahun 2019 dan 12 pada tahun 2020. Demikian juga dengan inovasi teknologi dengan 4 inovasi pada tahun 2019 dan 8 inovasi baru pada tahun 2020.

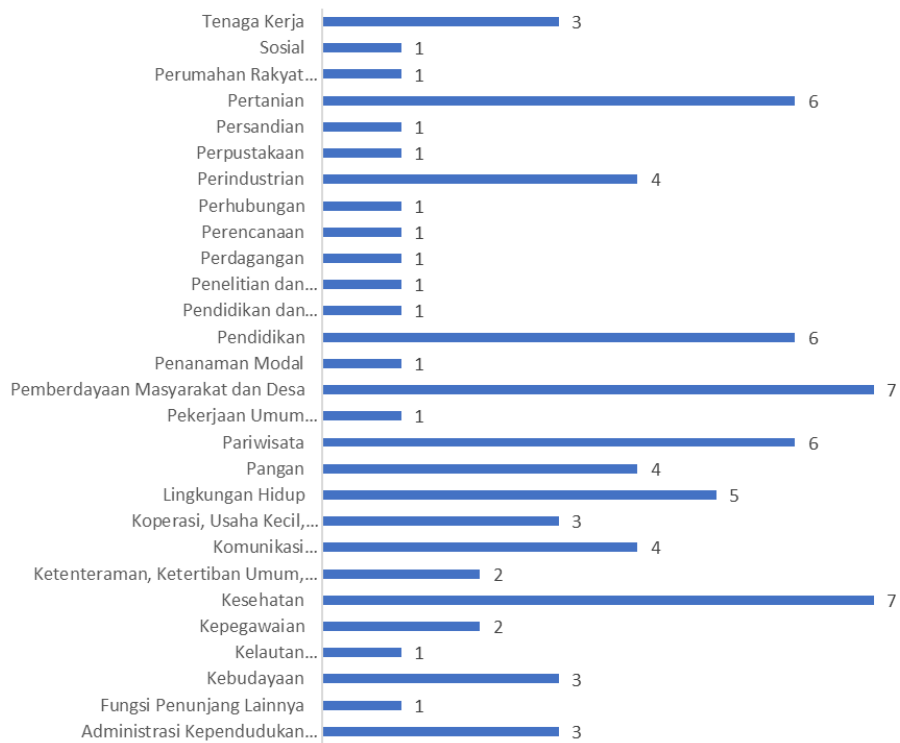
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Cimahi

Seluruh inovasi yang dilaporkan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 diinisiatif oleh Perangkat Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, dan Anggota DPRD serta Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

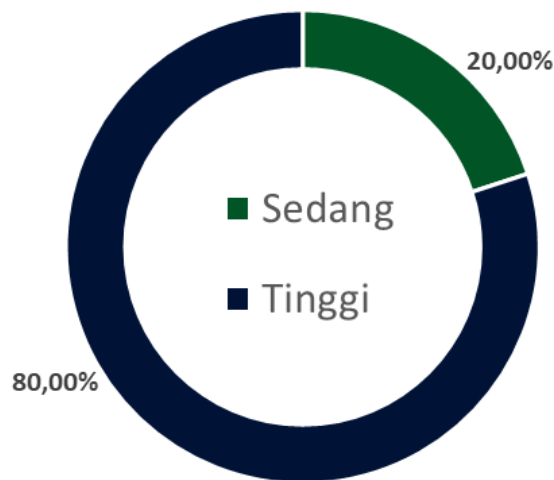
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 96 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Cimahi

Sebaran inovasi daerah pada Kota Cimahi berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kesehatan dengan 7 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, seluruh inovasi wajib pelayanan dasar yaitu Urusan Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Sosial, Trantibumlinmas dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

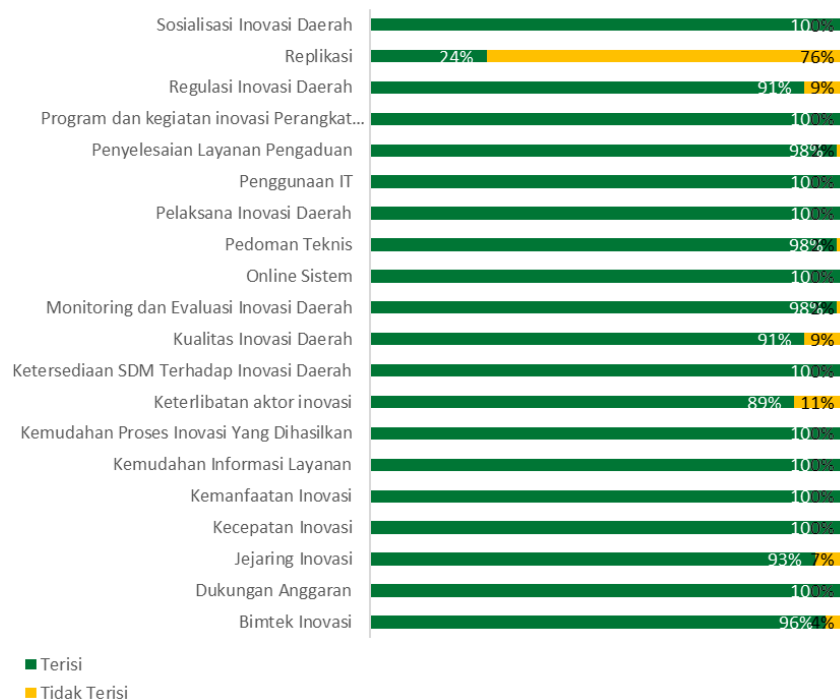
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Cimahi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan tinggi, yaitu 36 (80,00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Kemudian terdapat 9 (20,00%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

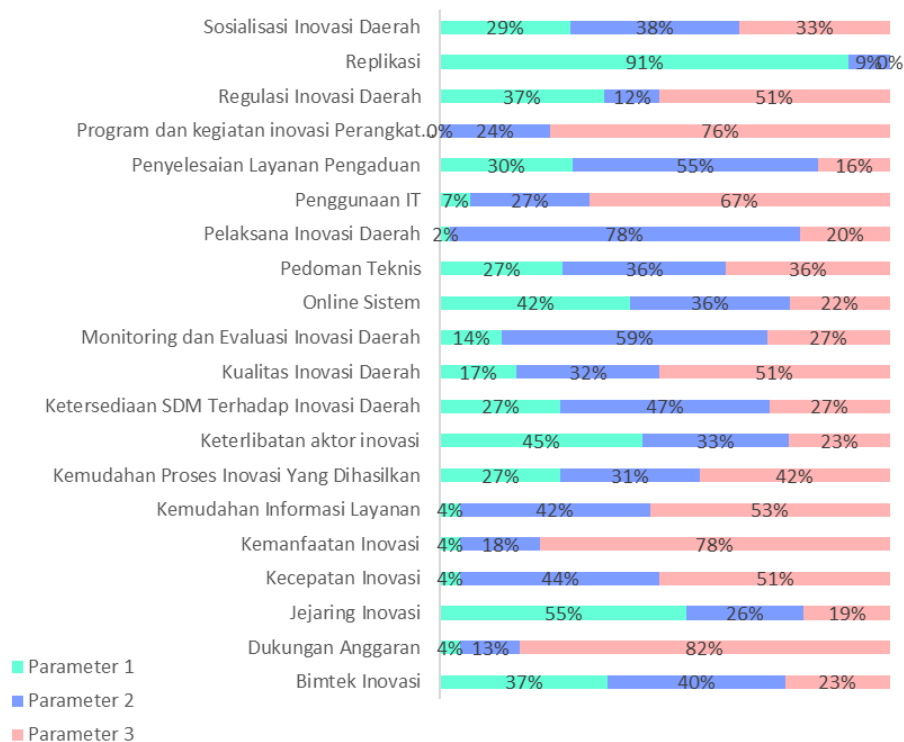


Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Cimahi

Dari 45 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cimahi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 6,11% sedangkan 93,89% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu: Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, ketersediaan SDM Terhadap Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Penciptaan Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cimahi telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 24% artinya hanya beberapa inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi sebesar 78%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 78% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi sebesar 55% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kota Cimahi beserta Skor Kematangannya

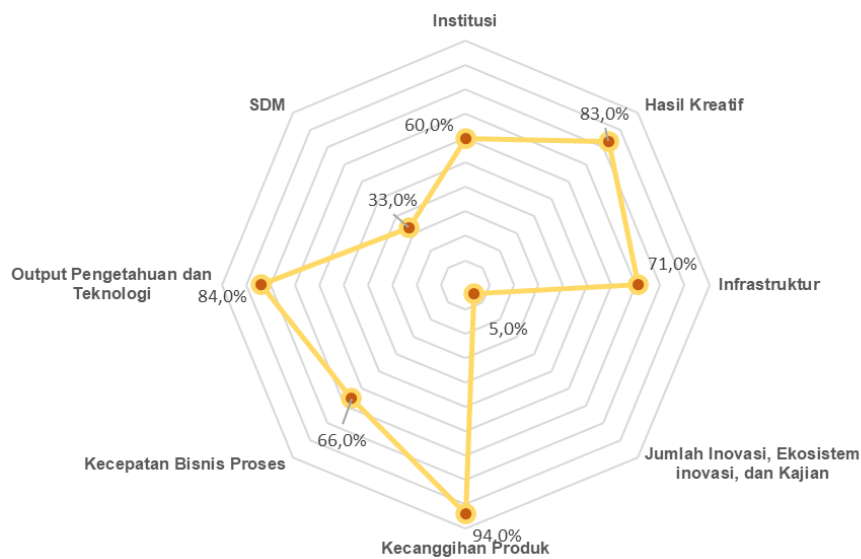
Tabel 10 Daftar Inovasi Kota Cimahi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SIKACI (Sistem Informasi Kinerja PNS Kota Cimahi)	103
KLINIK YANLIK	98
SIBEDA (Sistem Informasi Bencana Daerah)	101
Pelayanan Jemput Bola bagi Lansia dan Disabilitas (Jebol bagi DiLan)	108
One Day Service Paket 3 in 1	91
PECI SIKOBOI	99
Si-PENDIL (Sistem Pengelolaan Data Infrastruktur Lingkungan)	100
Collabtourism Legokawi	104

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
CSBI (Cimahi Small Business Innovation)	98
Sistem Informasi Link And Match (SILIMA)	115
TIREKS KESWA (Tim Reaksi Kesehatan Jiwa)	113
BISNIS DIGITAL KREATIF DI CO-WORKING SPACE CIMAHI (BIDIK CO-SPACE CIMAHI)	113
SIMAKCI - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kota Cimahi	106
BAPPEDA KOTA CIMAHI 360 Cireundeu	113
BAPPEDA KOTA CIMAHI Cireundeu Fun Explorer (Wisata Tracking dan Camping Cireundeu)	124
SILPa KAMI/Sistem Informasi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	92
MAGAKAR (Masyarakat Siaga Kebakaran)	107
BAPPEDA KOTA CIMAHI (Seni Pertunjukan Cireundeu)	112
LINGCAU (Labeling catering Aman Uenakk)	99
Piloting Pengelolaan Sampah Organik Metode Maggot BSF dengan Pemberdayaan Masyarakat	109
AWAS PANIK (kAWasan tuntAS Pilah sAmpah orgaNIK)	96
SIMRENDA MONEV CIMAHI	108
Ngigel (ngempelkeun sareng ngadugikeun informasi kesehatan online)	96
SILATIK (Sistem Informasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	109
Cimahi Heritage Military Tourism (CMHT)	115
SiTarung (Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang)	122
SERBA CEPAT DENGAN SMART TECHNO PARK (SEMARAK)	116
Inisiasi Pembentukan Lab Kualifikasi BSL 2 dengan Lab Poltekes untuk Pemeriksaan Tes RT-PCR	108
SITERANG (VAKSINASI ON THE SPOT HEWAN PENULAR RABIES DAN FLU BURUNG)	121
PETERPAN (PENGOBATAN TERNAK PANGGILAN)	118
Beras Analog dan Miekong	102
IKM CIMAHI MARI BERAKSI (MAJU MANDIRI DENGAN BERKOLABORASI)	103
PELAK CABE (Pemanfaatan Pekarangan dan Teknologi Pada Komoditas Cabai)	107
BIOGRO	111
Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan (PEMPEK) Keliling CIMAHI	97
GERTAKAN SPM (Gerakan Serentak Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)	109
Datang, Daftar dan Dapatkan (DADAKAN)	112
GERPASI (Gerakan 8 Pasukan Aksi)	103
Portal Layanan Cimahi Smart City Mobile	128
SAPA PJU	111

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
CRH (Cimahi Reading Habit) Online	118
SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi)	113
SIPASOL (SISTEM PELAPORAN ADMINISTRAS SEKOLAH SECARA ONLINE)	105
Microstock Ecovery Temocity : Economic Recovery From Templating With Community	116
Bela Beli Cimahi	107

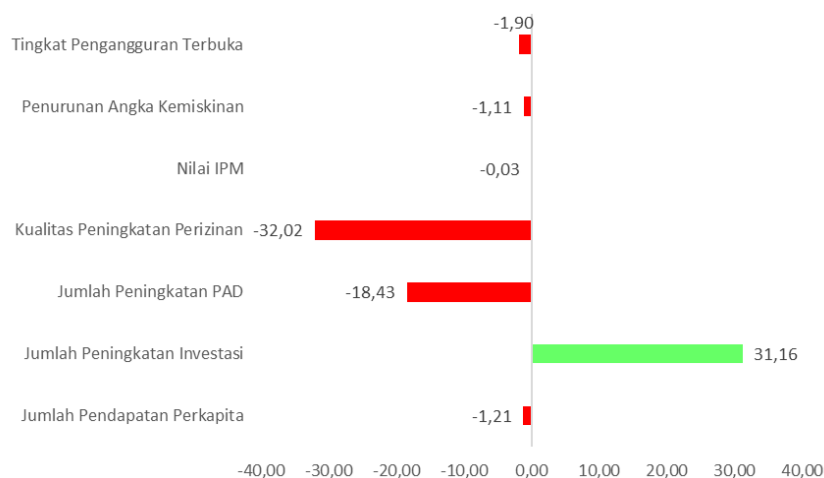
J. KOTA CIREBON



Gambar 100 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Cirebon

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Cirebon memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 94,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 5% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



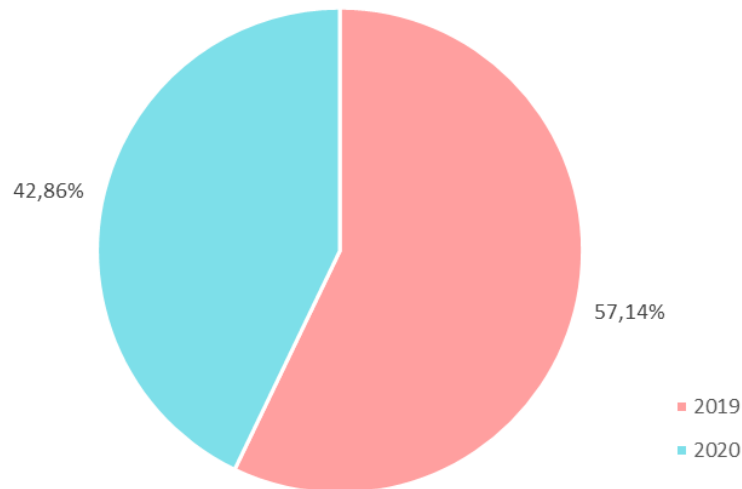
Gambar 101 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cirebon

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Cirebon telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,11%, angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 0,02%. Indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebesar 1,11%. Angka tersebut sudah lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0.03% di mana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 32,03%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Indikator Peningkatan PAD pada Kota Cirebon menunjukkan penurunan sebesar 32,02%, yang jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 1,21% yang mana nilai ini sedikit lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%.

Sebaliknya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 31,16% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

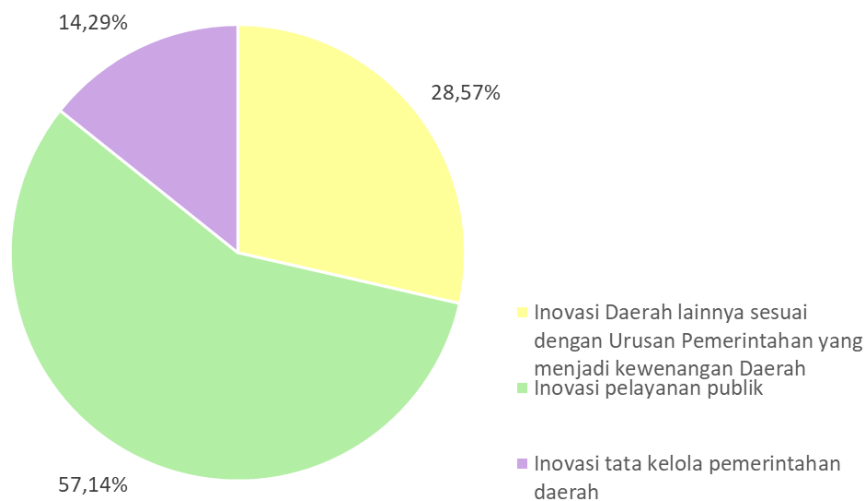
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Cirebon

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cirebon telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 3 (42,86%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (57,14%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

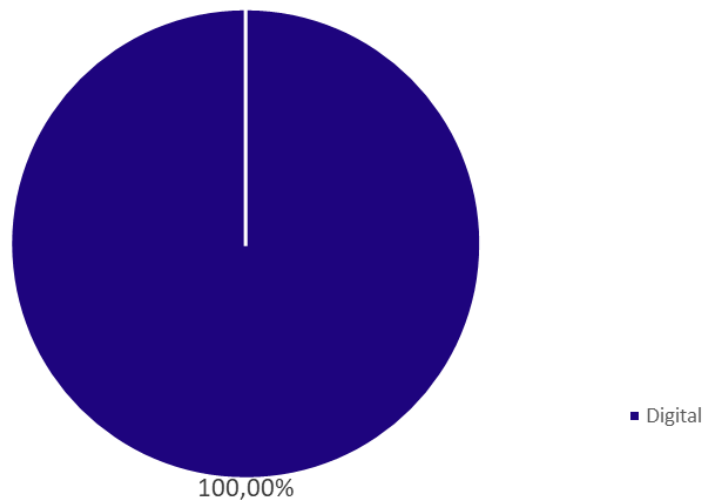
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Cirebon

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cirebon, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 4 (57,14%) inovasi dan 2 (28,57%) merupakan inovasi bentuk lainnya, serta 1 inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

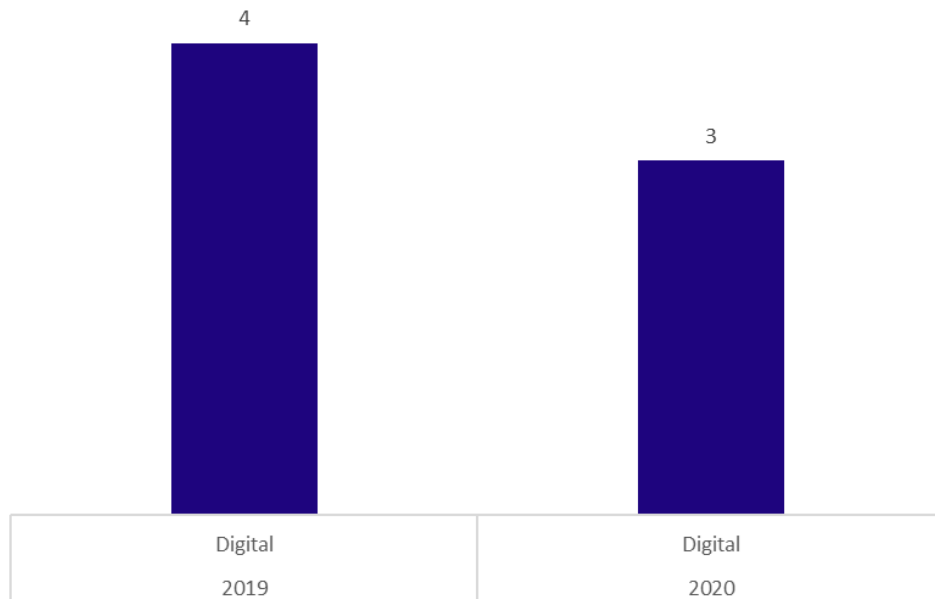
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Cirebon

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan Kota Cirebon merupakan inovasi digital.

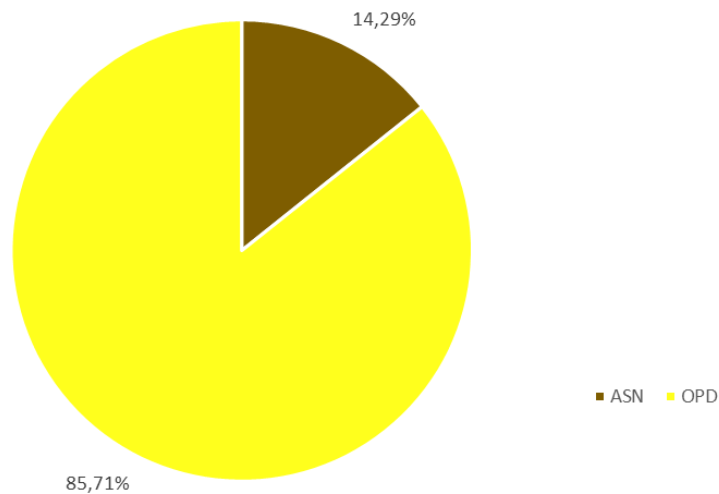
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Cirebon

Terdapat penurunan jumlah inovasi baru yang diterapkan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Inovasi digital menurun dari 4 inovasi menjadi 3 inovasi baru yang diterapkan. Sementara untuk inovasi non digital belum dilaporkan.

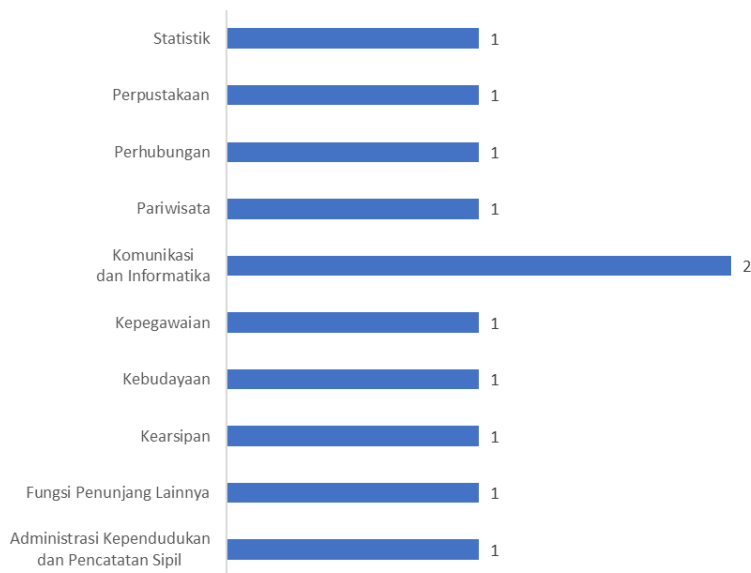
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Cirebon

6 1 Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Cirebon pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 6 (85,71%) inovasi sementara 1 (14,29%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, Anggota DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

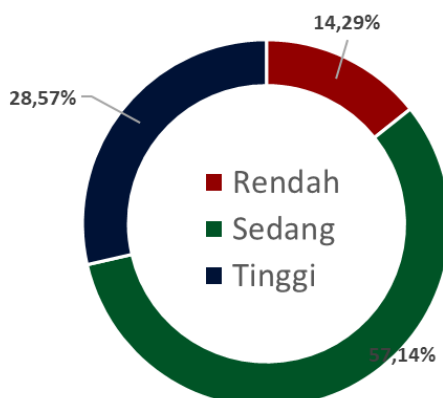


Gambar 107 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Cirebon

Sebaran inovasi daerah pada Kota Cirebon berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Komunikasi dan Informatika dengan 2 inovasi. Kemudian dengan masing-masing 1 inovasi dari urusan Statistik, Perpustakaan, Perhubungan, Pariwisata, Kepegawaian, kebudayaan, Kearsipan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Fungsi Penunjang Lainnya. Dari

sebaran inovasi daerah tersebut, belum ada urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaporkan.

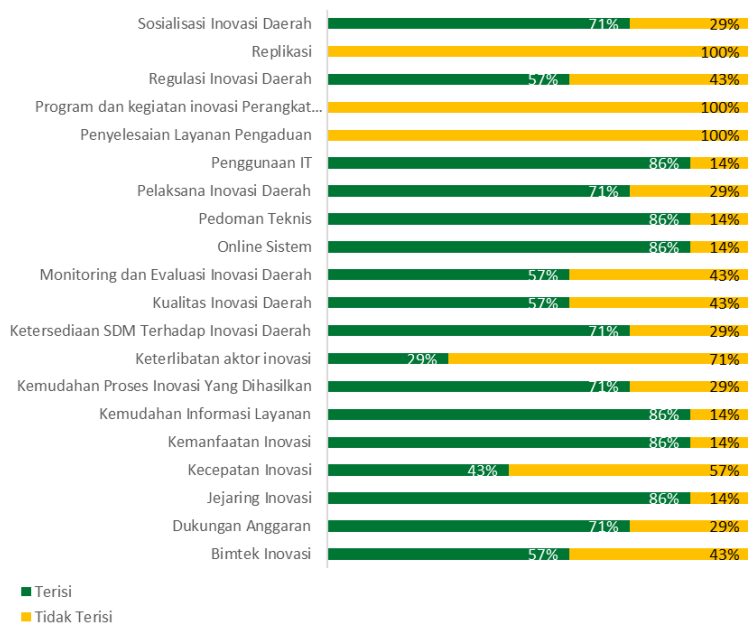
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Cirebon

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, di mana terdapat 4 (63,14%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 2 (28,57%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 1 (14,29%) sisanya masih dalam rentang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

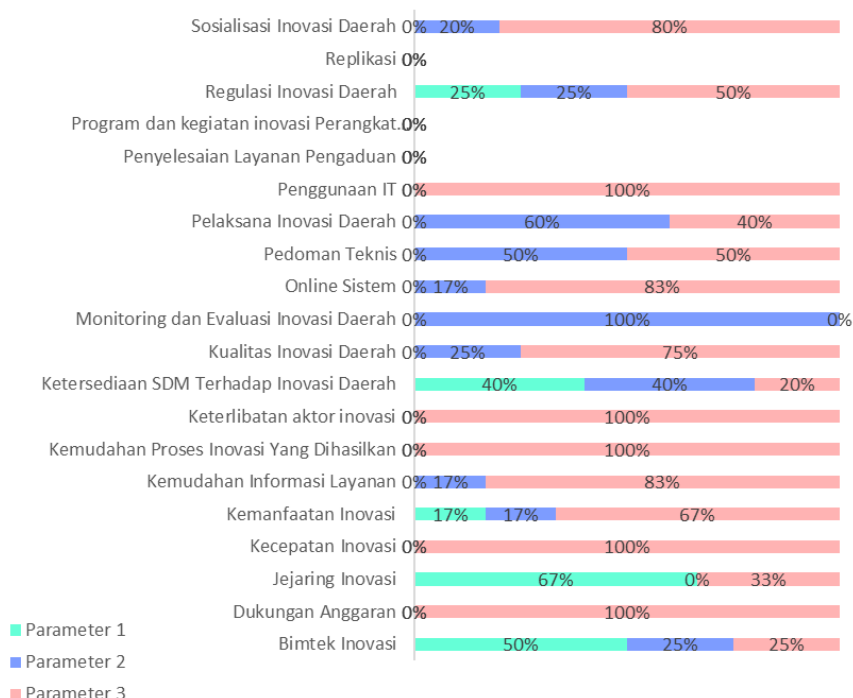


Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Cirebon

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cirebon, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 41,43% sedangkan 58,57% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian tertinggi 86%, yaitu Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, Lemudahan Informasi Layanan, kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Jejaring Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Cirebon telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi, Program Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD dan Penyelesaian Layanan Pengaduan yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

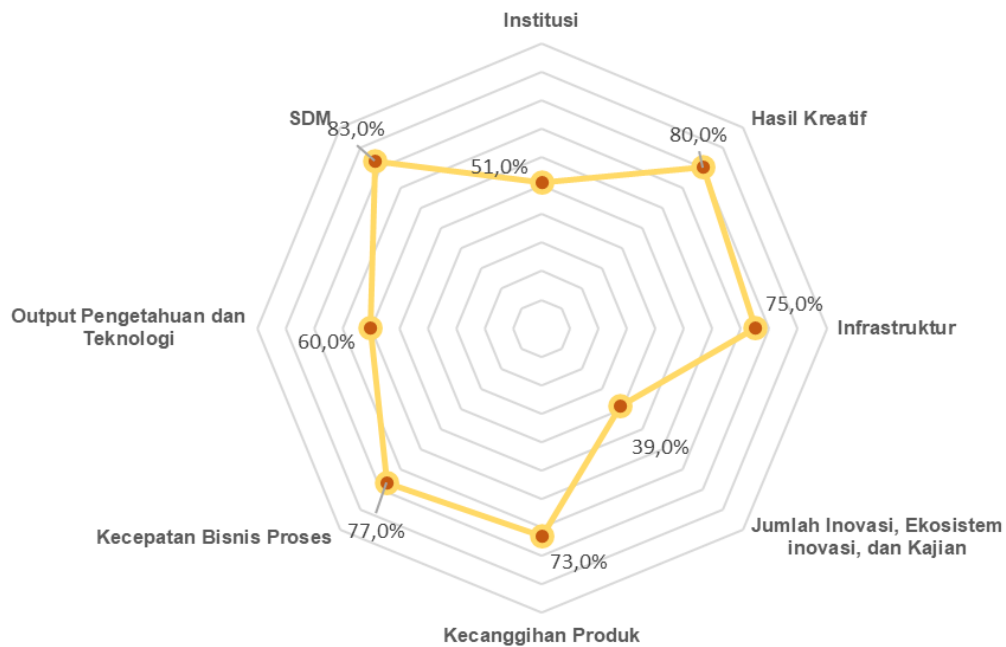
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi Yang dihasilkan, dan kecepatan penciptaan inovasi sebesar 100%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi sebesar 83% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Cirebon beserta Skor Kematangannya

Tabel II Daftar Inovasi Kota Cirebon beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
i-Cirebon Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon	68
Pembayaran Parkir Non Tunai Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)	89
ISUN CIREBON (Informasi Surat Undangan dan Kehadiran)	53
WISTAKON (Wisata Kota Cirebon)	101
SEDULUR (Sistem Elektronik Administrasi Umum Kelurahan)	34
Cirebon Satu Data	108
SAMPEAN (Sistem Aplikasi Mobile Kepegawaian)	88

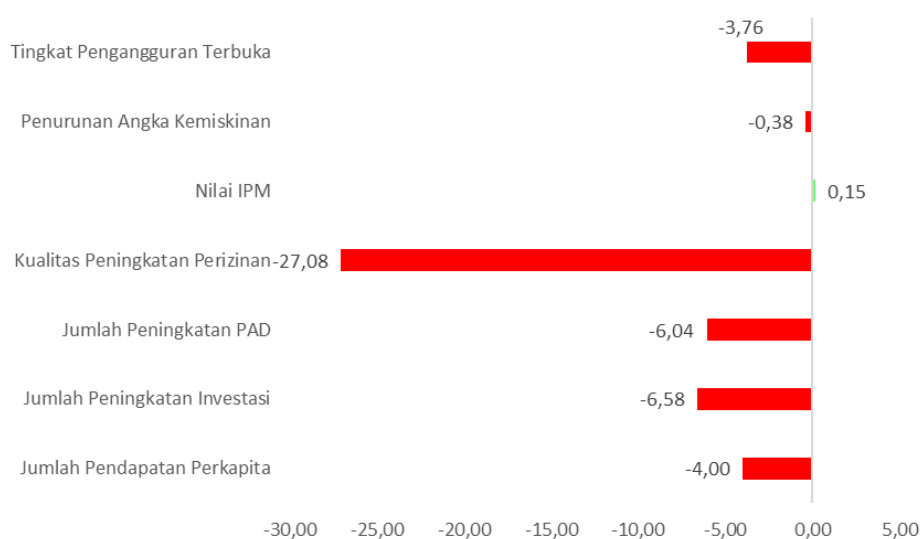
K. KOTA DEPOK



Gambar 111 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Depok

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas nilai maksimal dicapai pada variabel Sumber Daya Manusia dengan 83,00% artinya, rata-rata indikator di dalam variabel tersebut telah terisi pada parameter 2 dan 3. Kemudian variabel dengan capaian terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian yang rata-rata terisi parameter 1 dengan capaian 39%.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



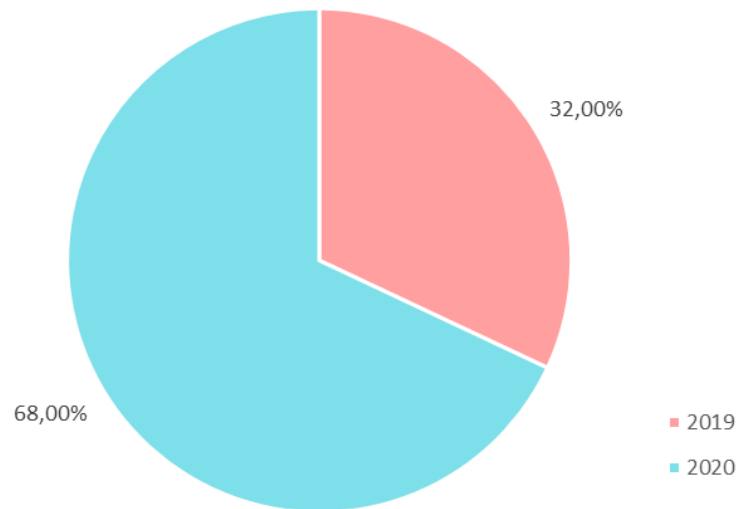
Gambar 112 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Depok

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Depok belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang turun sebesar 4,00% yang mana nilai ini lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Kedua, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,76%. Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 0,92%. Ketiga, indikator Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,38%, angka tersebut masih dibawah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15, di mana nilai tersebut lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 27,08%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang turun sebesar 6,58% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Selanjutnya, indikator Peningkatan PAD pada Kota Depok menunjukkan penurunan sebesar 6.04%, yang jauh masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Terakhir indikator Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 4,00%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

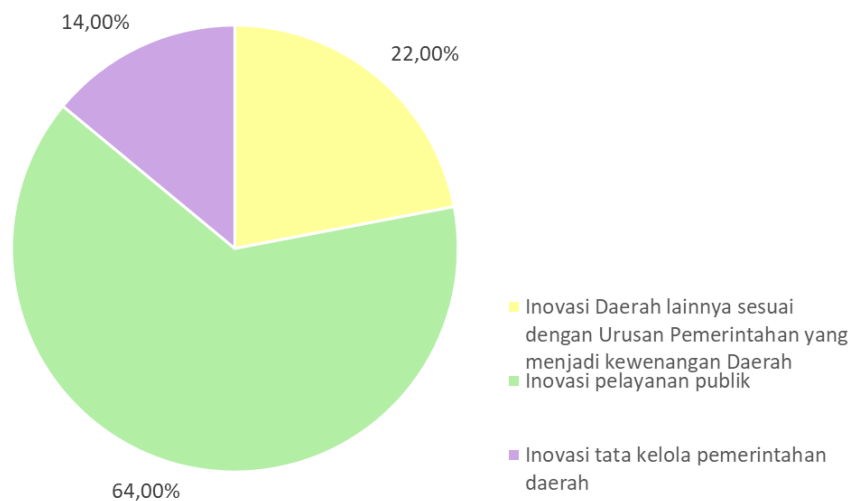
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Depok

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Depok telah diterapkan sejak tahun 2020. Inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 yang dilaporkan dalam indeks inovasi daerah tahun 2021 berjumlah 16 inovasi (32,00%) dan yang mulai diterapkan pada tahun 2020 sejumlah 34 inovasi (68,00%).

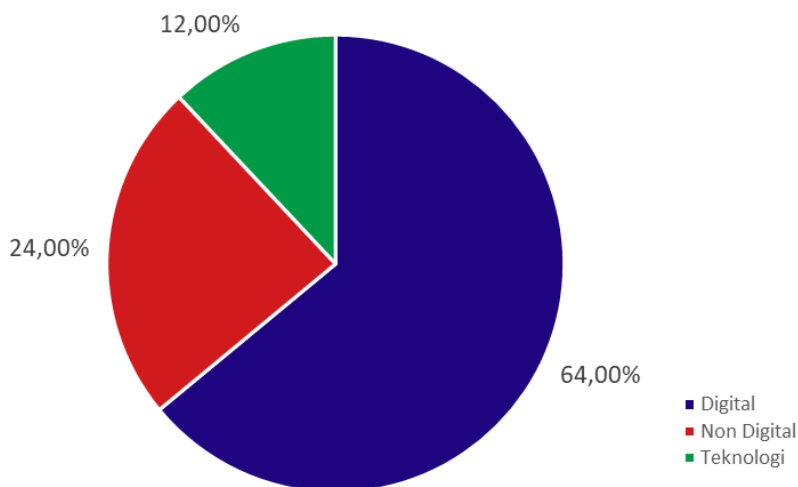
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Depok

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 32 (64,00%) inovasi. Bentuk inovasi terbanyak kedua adalah inovasi daerah lainnya dengan 11 inovasi (22,00%) dan terakhir 7 (14,00%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

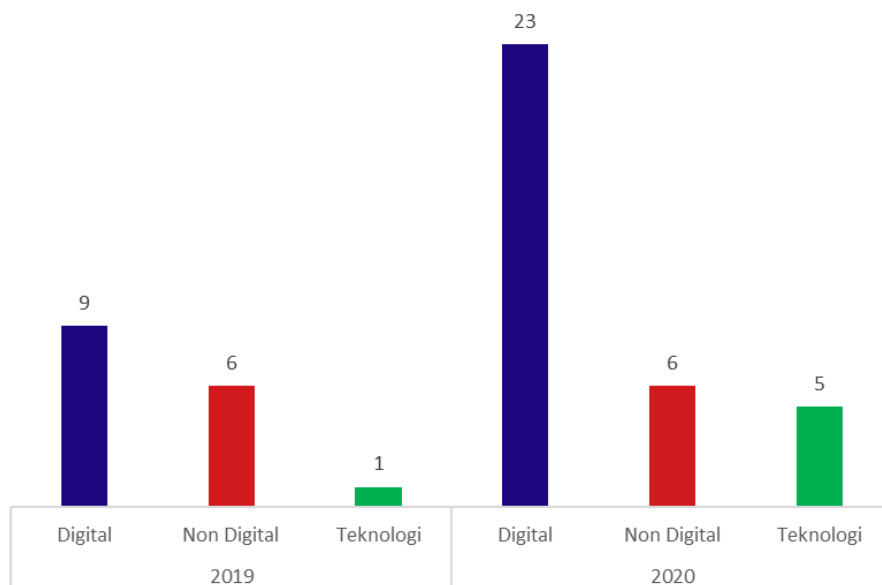
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 115 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Depok

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 32 (64,00%) yang dilaporkan Kota Depok merupakan inovasi digital. Kemudian, 12 (24,00%) inovasi merupakan inovasi Non digital dan 6 (12,00%) merupakan inovasi Teknologi.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

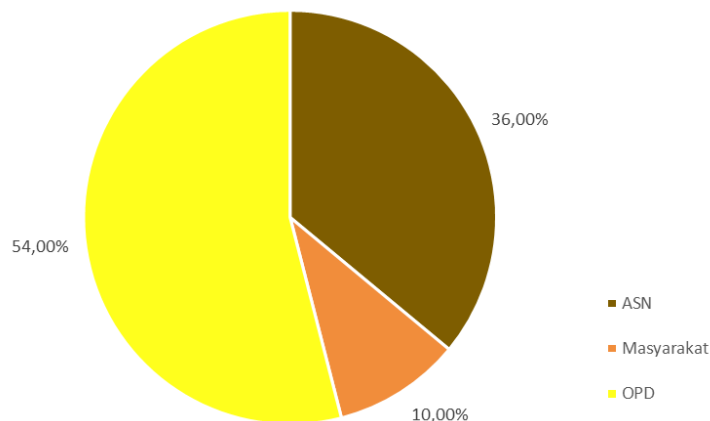


Gambar 116 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Depok

Terdapat kenaikan jumlah inovasi baru yang diterapkan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pada inovasi digital, di tahun 2019 ada 9 inovasi mulai diterapkan dan meningkat di tahun 2020 dengan 23 inovasi baru diterapkan. Sejalan dengan itu, inovasi Teknologi juga mengalami kenaikan dari 1 inovasi baru di tahun 2019 menjadi 5 inovasi

baru di tahun 2020. Sementara inovasi non digital tidak mengalami perubahan jumlah inovasi baru yang diterapkan di tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu 6 inovasi baru pada masing-masing tahun.

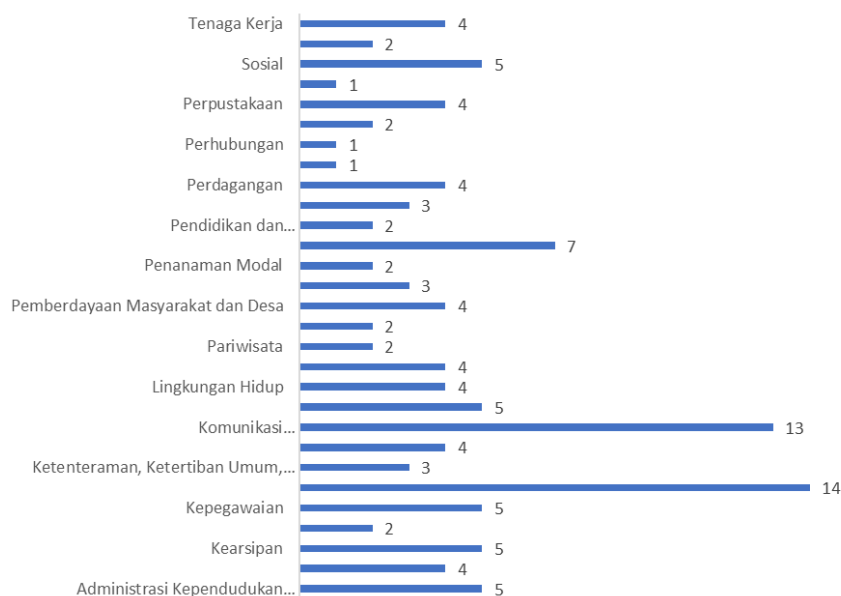
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 117 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Depok

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Depok pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 27 (54,00%) inovasi sementara 18 (36,00%) inovasi diinisiasi oleh ASN, dan 5 (10,00%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi Kepala Daerah dan Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

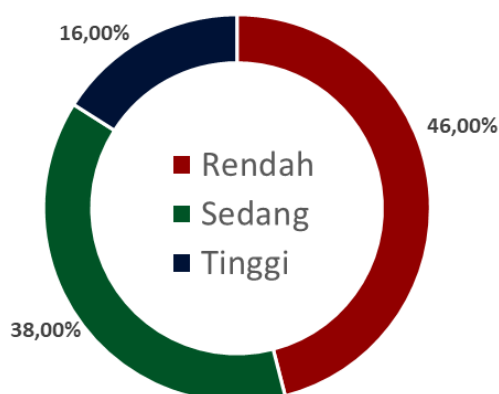


Gambar 118 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Depok

Sebaran inovasi daerah pada Kota Depok berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pariwisata dengan 4 inovasi kemudian masing-masing 1 inovasi merupakan urusan Perhubungan, Perdagangan, dan

Fungsi Penunjang Lainnya. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat satupun urusan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar.

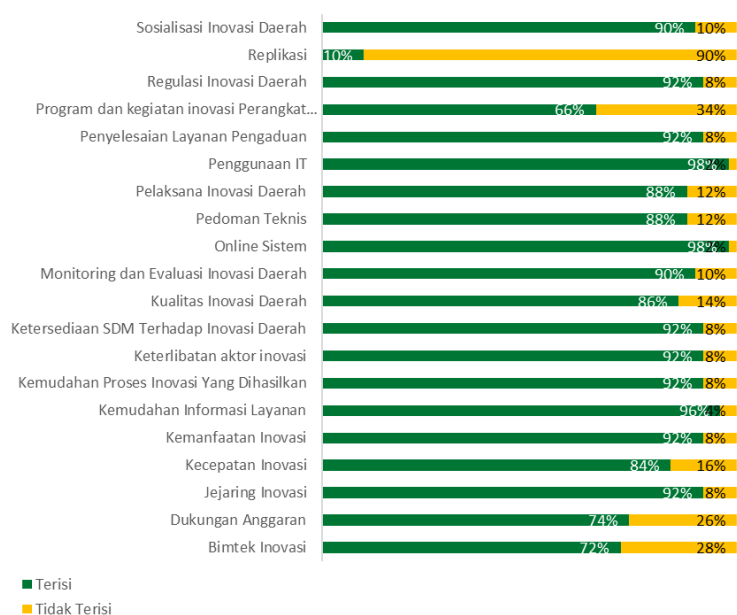
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 119 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Depok

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi tergolong dalam skor kematangan rendah. 23 (46,00%) inovasi tergolong dalam skor kematangan rendah, 19 (38,00%) inovasi mendapatkan skor kematangan sedang dan 8 (23,00%) inovasi mendapatkan skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

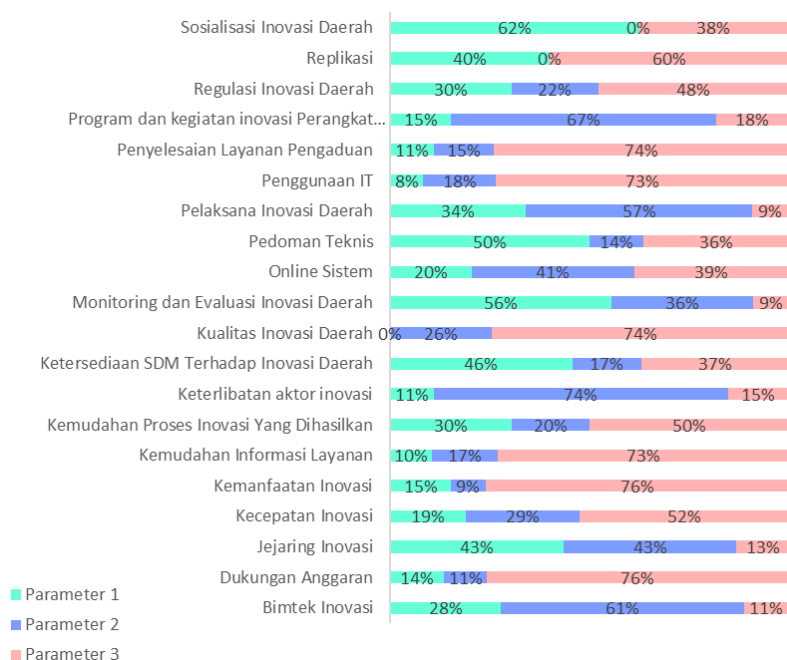
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 120 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Depok

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Depok, 84,20% bukti dukung telah dipenuhi sementara 15,20% belum dapat dipenuhi. Dari 20 indikator satuan inovasi daerah, indikator Penggunaan IT dan Online Sistem, artinya mayoritas inovasi telah memenuhi kedua indikator tersebut. Indikator dengan tingkat keterisian terendah adalah indikator replikasi yaitu 10% artinya baru sebagian kecil inovasi dapat memenuhi indikator replikasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 121 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Indikator dengan keterisian parameter 3 tertinggi adalah Kemanfaatan inovasi dengan 76%. Sementara untuk parameter 2 tertinggi adalah Indikator Keterlibatan Aktor Inovasi dengan 76% artinya mayoritas inovasi yang telah mengisi indikator tersebut mampu memenuhi parameter kedua. Selanjutnya adalah indikator dengan keterisian parameter 1 tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi daerah dengan 62%.

j. Daftar Inovasi Kota Depok beserta Skor Kematangannya

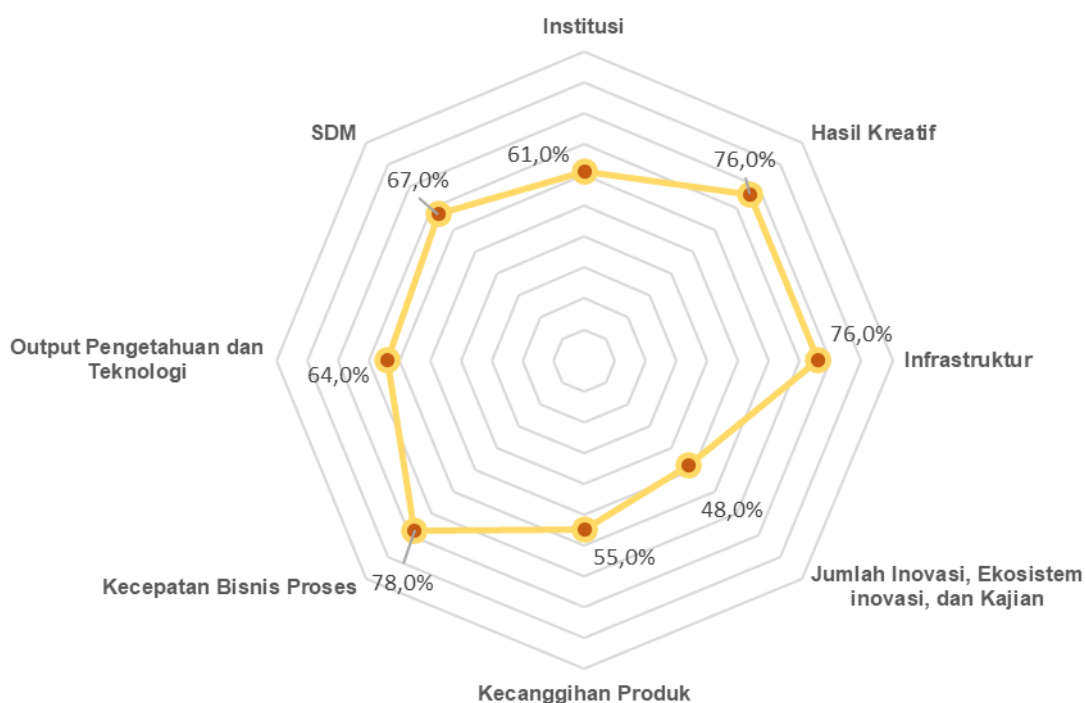
Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Depok beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sistem SP2D (Sistem Surat Perintah Pencairan Dana) Online	27
Pelayanan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Reklame yang Terintegrasi	33
Sekolah Pra Nikah	100
Sekolah Ayah Bunda	106
PASAR CISALAK MENUJU PASAR JUARA	10
SISTEM INFORMASI CONTINUUM OF CARE (SI COC)	30
Laskar Pelangi sebagai pasukan penggerak untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa berbasis kultur sekolah	34
JOTRAM: Joyful Traffic Management (Model Pengelolaan	99

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Kemacetan Lalu Lintas yang berorientasi customer di Jalan Margonda Raya)	
Sistem Aplikasi Perlindungan Anak/ Web KLA (SAPA)	121
Aplikasi Kinerja Mobile (KMob Depok)	110
SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN BERBASIS KINERJA (SIKAWAT BAJA)	8
Informasi Pelayanan Publik Kecamatan Beji Berbasis Media Elektronik	8
Germas Butoga	14
Portal Smart Healthy City	97
Depok Smart Government (Kec Sukmajaya)	8
Pengembangan aplikasi DM nutriassist sebagai self assistive technology pasien DM di Indonesia	12
Kombucha Belimbing Dewa (KOBWEWA)	8
Retort untuk Usaha Mikro Kecil	8
Aplikasi Absensi E-KPT	33
Waste to Energy	20
SILONDO (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok)	95
Pusat Informasi Covid-19 Kota Depok (PICODEP)	105
Sistem Informasi Pemetaan Profil Kesehatan Lingkungan (SIPPKLING)	106
Easy Tax	53
DigiCash (Transaksi Non Tunai) di pasar Sukatani	0
Aplikasi Bursa Kerja Online (BKOL) Berbasis website dan mobile Apps	95
Sistem Informasi Monitoring Aplikasi Terintegrasi Automatis e-Gov "SIMATA e-Gov	55
Aplikasi Hibah dan Bansos (BERBAGI)	6
Aplikasi Manajemen Inovasi Smart City Depok (IDEA)	77
Sistem Pengelolaan Layanan TIK (SIMPATIK)	84
Aplikasi Ruang Terbuka Publik (Hai Depok)	74
Aplikasi Hitung Suara – HITUNG SUARA	0
Smart Portal Perangkat Daerah	47
Smart Portal Kecamatan	51
Smart Portal Kelurahan Kota Depok	58
Sistem Layanan Online Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok (SiLO)	97
Smart Portal Puskesmas	111
SIAPKOMPAK	94
Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Sektor Perdagangan d'Co Mart	29
e-Perpus Kota Depok	75
JELITA DEPOK - Jejaring Literasi Kota Depok	30
Depok Single Window	95

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pusat Data Terintegrasi Kota Depok (DataWarehouse)	89
Helpdesk	85
E-Rapor Kesehatan	97
Program kampung iklim (PROKLIM)	42
SIMPEL (Sistem Informasi Pelatihan)	75
Pengembangan Pelayanan RSUD Kota Depok selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	0
PENGUNAAN MEDIA SISWA KEPO UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA	0
Aplikasi KSC (KAMPUNG SIAGA COVID-19)	129

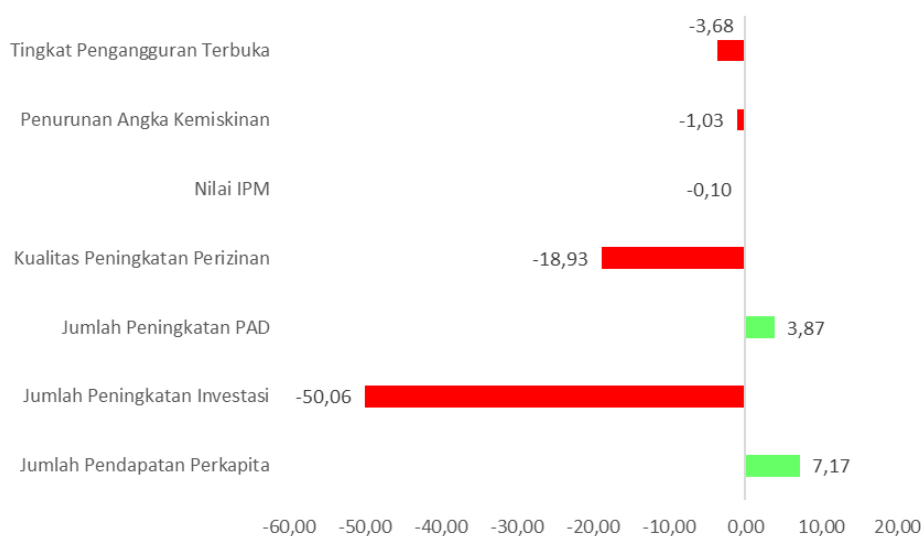
L. KOTA SUKABUMI



Gambar 122 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sukabumi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas variabel dengan capaian tertinggi adalah variabel kecepatan bisnis proses dengan capaian 78% artinya mayoritas indikator dalam variabel tersebut telah dipenuhi pada parameter 3. Sementara capaian terendah ada pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem, dan Kajian. Meskipun demikian dengan capaian 48% artinya indikator-indikator dalam variabel tersebut hampir mencapai parameter 2 meskipun parameter 1 masih mendominasi.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



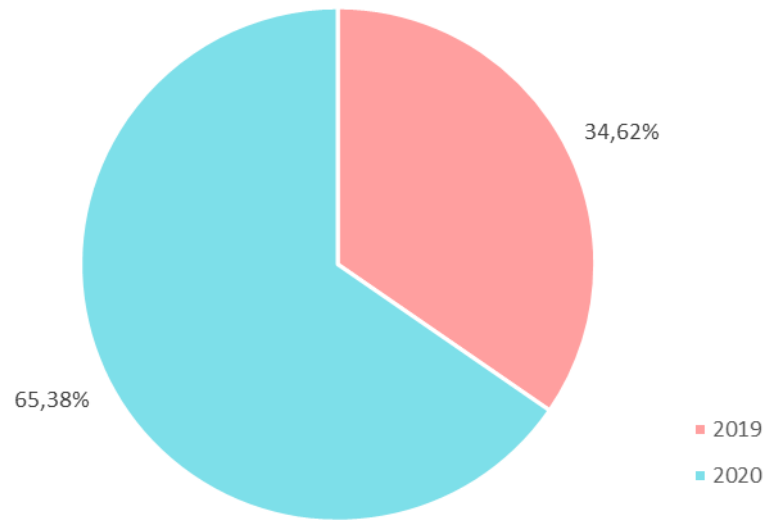
Gambar 123 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sukabumi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sukabumi belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data menunjukkan adanya perbaikan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami naik sebesar 7,17% yang mana nilai ini lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Kedua, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,68%. Angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Ketiga, indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,03%, sebenarnya angka tersebut masih dibawah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu penurunan sebesar 0,10%, di mana nilai tersebut lebih rendah dibanding dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 18,93%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang turun sebesar 50,06% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Sukabumi menunjukkan kenaikan sebesar 3,87%, yang jauh masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

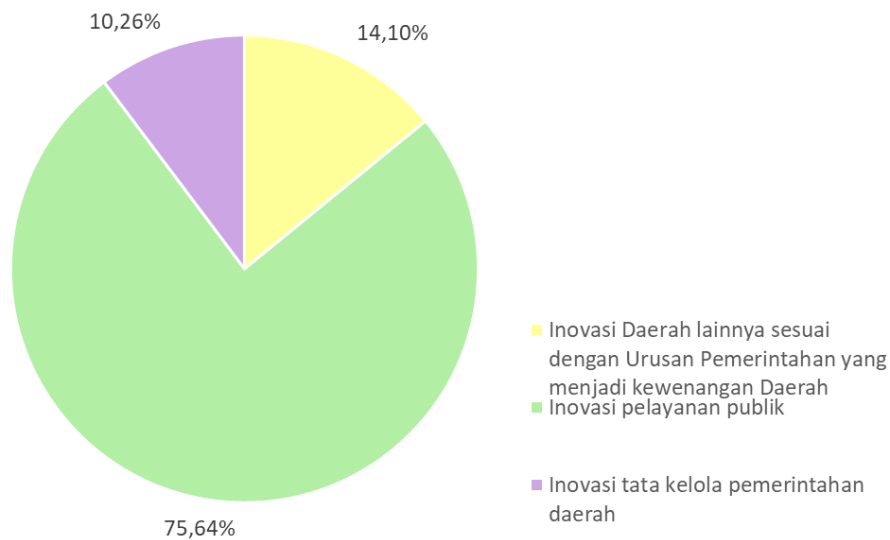
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 124 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sukabumi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi telah diterapkan sejak tahun 2020. Sebanyak 51 (65,38%) inovasi mulai diterapkan di tahun 2020 sementara 27 (43,62%) inovasi mulai diterapkan di tahun 2019.

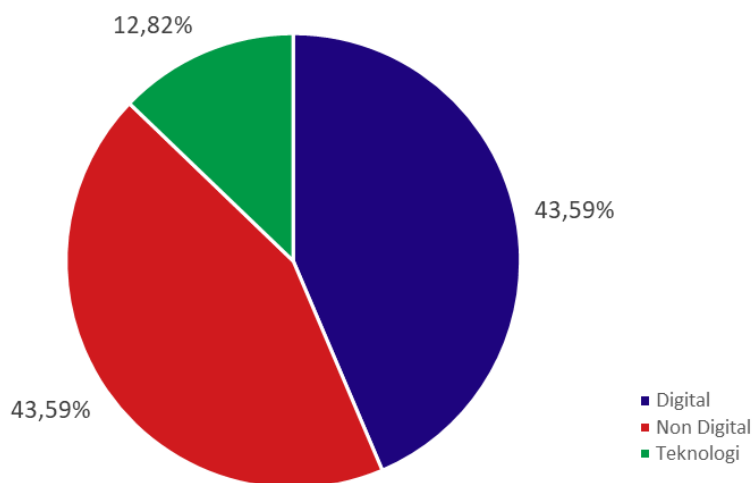
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 125 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sukabumi

Berdasarkan bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi, paling banyak merupakan inovasi pelayanan publik sebanyak 59 (75,64%) kemudian 11(14,10%) merupakan inovasi lainnya dan 8 (10,26%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.

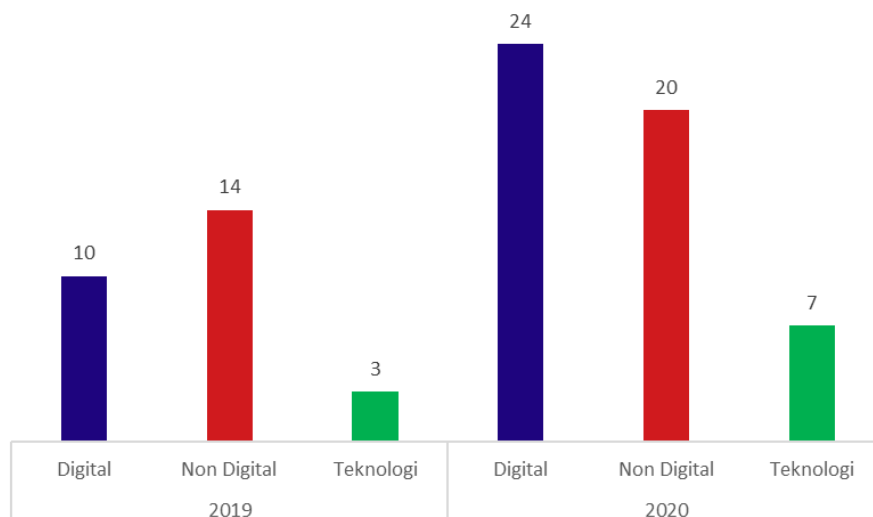
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 126 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sukabumi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, dengan masing-masing 34 (43,59%) yang dilaporkan Kota Sukabumi merupakan inovasi digital dan non teknologi. Kemudian 10 (12,82%) merupakan inovasi teknologi.

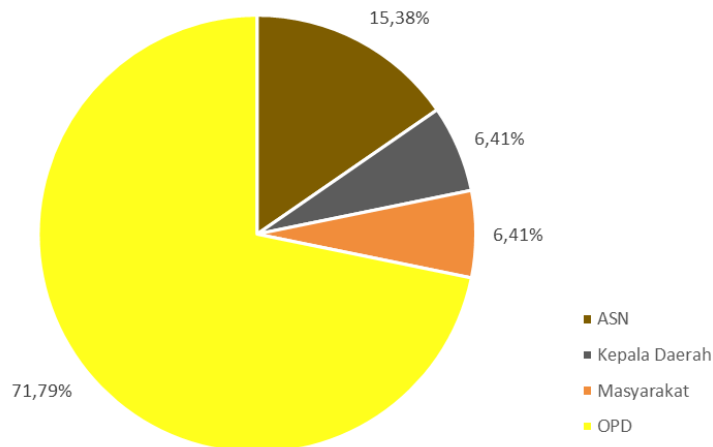
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 127 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sukabumi

Pada semua jenis inovasi, terdapat kenaikan jumlah inovasi baru yang mulai diterapkan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Pertama, inovasi digital yang tumbuh 14 inovasi baru kemudian inovasi non digital yang tumbuh dari 14 inovasi baru di tahun 2019 menjadi 24 inovasi baru di tahun 2020. Terakhir inovasi teknologi yang sebelumnya 3 inovasi baru di tahun 2019 menjadi 7 inovasi baru di tahun 2020.

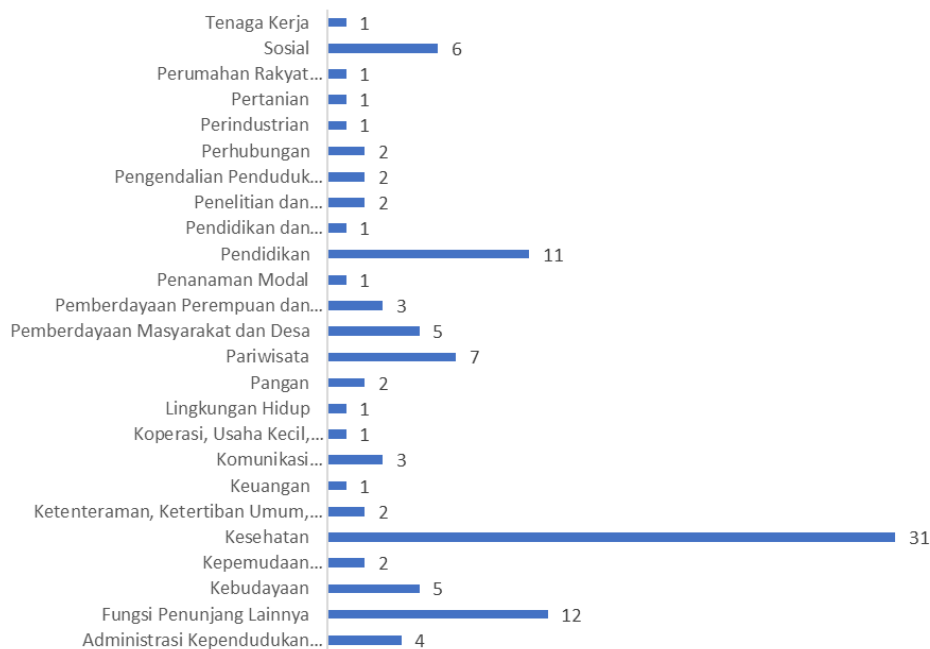
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 128 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Sukabumi

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 56 (71,79%) inovasi sementara masing-masing 5 (6,41%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan Kepala Daerah, serta 12 (15,38%) inovasi merupakan inovasi yang diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

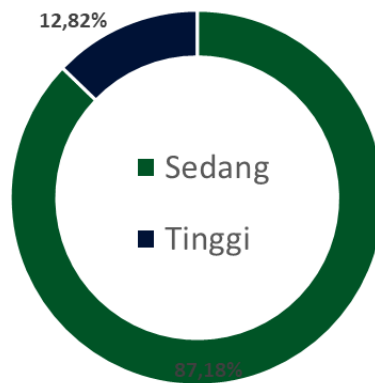


Gambar 129 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sukabumi

Sebaran inovasi daerah pada Kota Sukabumi berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Kesehatan dengan 31 inovasi kemudian 11 inovasi merupakan fungsi penunjang lainnya. Dari sebaran inovasi daerah

tersebut, terdapat 5 urusan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas,, pendidikan, dan kesehatan..

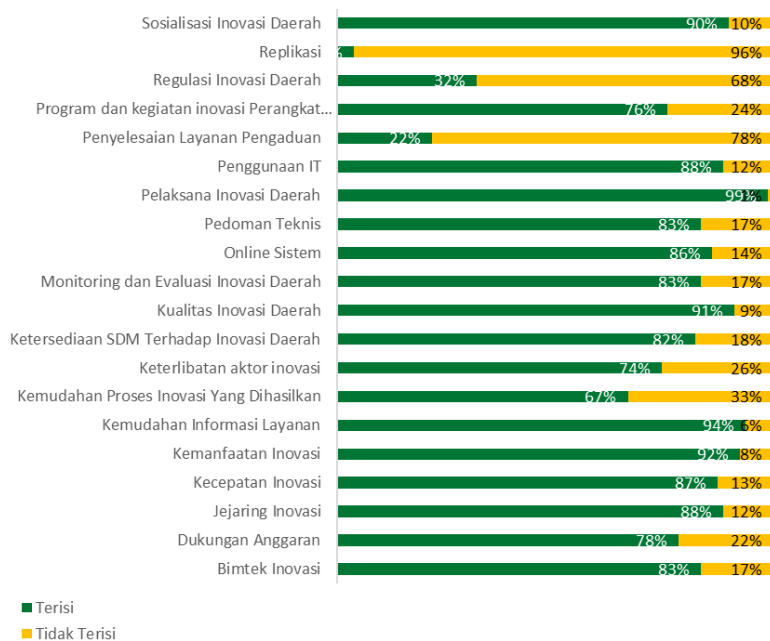
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 130 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sukabumi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi tergolong dalam skor kematangan sedang yaitu sebanyak 68 (87,18%) sementara 10 (12,82%) inovasi mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

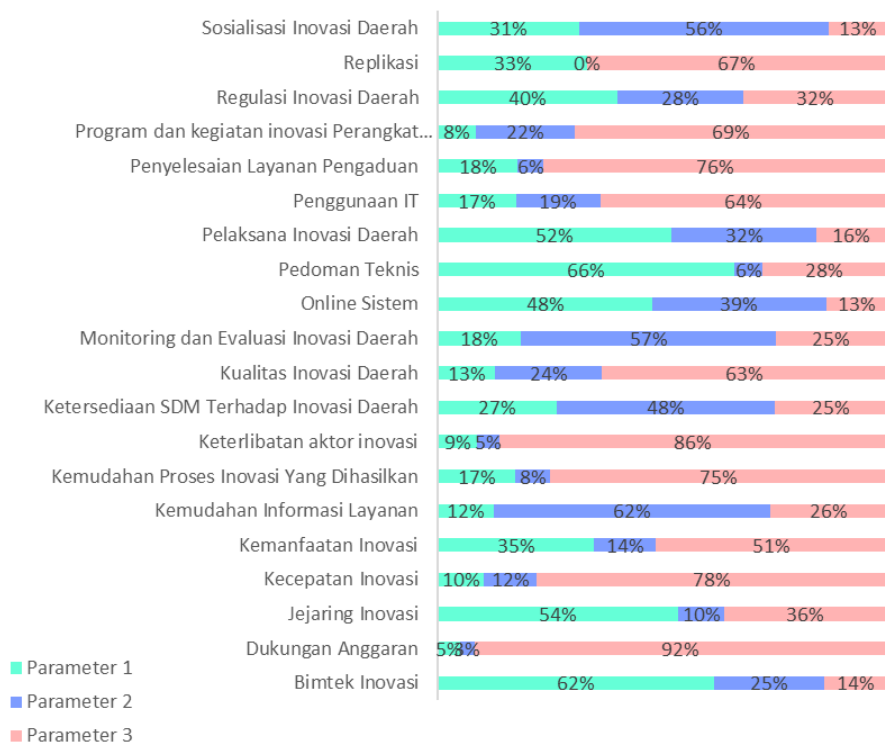


Gambar 131 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 25,00% sedangkan 75,00% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian tertinggi 99%, yaitu Pelaksana Inovasi Daerah. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 4% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 132 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan sebesar 62% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis sebesar 66% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Sukabumi beserta Skor Kematangannya

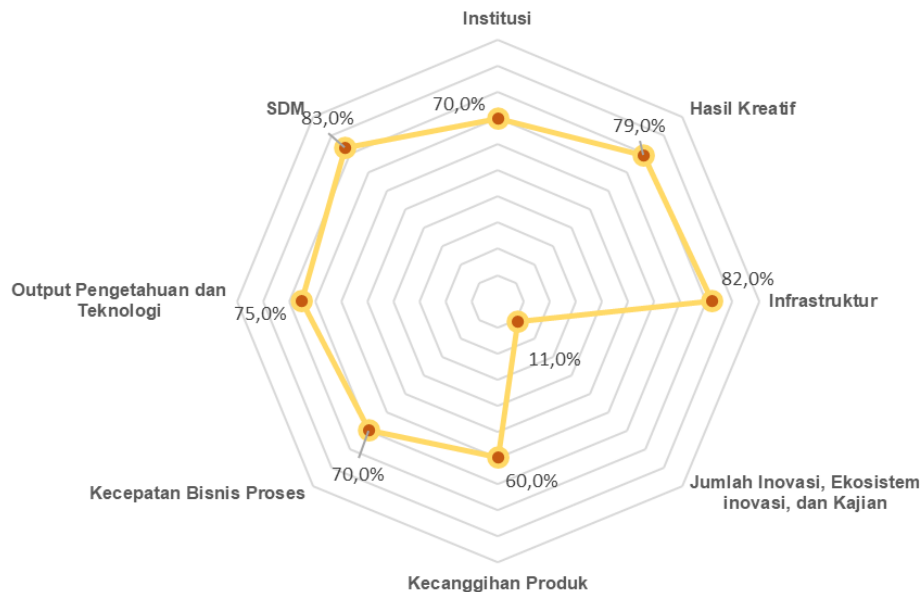
Tabel 13 Daftar Inovasi Kota Sukabumi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
MONALISA (Mobil Naker Keliling Seputar Kota)	66
Layanan Kemboja Sari (Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari)	121
PANON PENDEKAR (Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor)	113
SUPER (SUKABUMI PARTICIPATORY RESPONDER)	105
SISTEM WHATSAPP PELAYANAN ADMINSTRASI (SWALAYAN) KECAMATAN CITAMIANG	56
Dilan Milea (Peduli Kesehatan Mileneal Kita)	67
Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Sekala Rumah Tangga	75
PENDAKK DI KELURAHAN	65
Perencanaan pengembangan aplikasi Digital Sukabumi Kece untuk UMKM Kota Sukabumi, terdiri dari aplikasi Mobile Apps (Android) dan Web Portal yang dilengkapi dengan Dashboard Manajemen System	94
Sinegritas Pembangunan Terpadu Kepemudaan Berbasis e-Youth (SIBANGDUKEP)	62
POS MAMAH (Posyandu Mapay Imah)	75
SICEPOT (sistem cepat penanganan ODGJ terpadu) PUSKESMAS TIPAR	70
LEGIT (Lansia Energic dan Produktif)	73
STEAMBOOT (Strategi Peningkatan Imunisasi Booster)	61
SI ENDOLITA (Aksi Cegah Deteksi dan Kendalikan Hipertensi)	84
Love Mom Bersama Puskesmas Nanggaleng	79
SORGUM SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PANGAN POKOK DI KOTA SUKABUMI	67
SIMPELDONG (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PELAPORAN DOKUMEN LINGKUNGAN)	87
IMAH KURING	60
Udunan Online	88
Pelayanan Tanpa Menunggu Kelengkapan Persyaratan Administrasi (PATAS)	105
GEGEBER (Gelora Gerakan Bebersih)	88
SIKAP SEHAT (SISTEM INFORMASI KEPUASAN PASIEN DAN SISTEM EDUKASI KESEHATAN)	90
SIKALEM (SISTEM KOTAK LAYANAN ELEKTRONIK MANDIRI)	71
WEDANG JAHE (WISATA EDUKASI TINGKATKAN PENTINGNYA BELAJAR HIDUP SEHAT ELIMINASI PENYAKIT)	77
Layanan Kemboja Sari (Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari)	80
SI IBU (Sistem Informasi Kebudayaan dan Promosi Pariwisata)	81
GELORA CINTA MANIS (GERAKAN OLAHRAGA BERSAMA ATASI CEPAT PENYAKIT MENAHUN DAN KRONIS)	82
GEMAR MENGAJI (GERAKAN MASYARAKAT MEMPERDULIKAN	80

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
KESEHATAN DAN GANGGUAN JIWA)	
HAI CINTA (HIMBAUAN AKTIF IKUT IMUNISASI CERMIN PEDULI BAYI DAN BALITA)	98
PDKT (PROGAM DAMPINGI KASUS TB)	78
RASA AMAN (geRAkan Atasi Sampah Aktifkan Jamban)	96
KLIK UP (KELOLA LAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI PADA KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN)	76
KASEP PIS-AN (KEGIATAN AKSELERASI, SINERGITAS DAN ELABORASI PIS-PK ANTAR PROGRAM)	92
MASAGI (MASYARAKAT SADAR KESEHATAN GIGI)	95
Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Online (RAOS)	73
Strategi One Roof (One Region, One Offtaker)	95
SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAN HEWAN (SIMPEL KESRAWAN)	90
PASIGIT (PENGAWASAN SISTEM DIGITAL)	130
KONSULTAN (Konsultasi dan penyuluhan kesehatan)	66
SISKAMLINK (SISTEM INFORMASI DAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK)	70
JELITA (JEJARING LINTAS KOTA	82
LAYANAN SI MEKAR (Sistem Informasi dan Media Kelurahan Jayamekar)	108
KORAN JAYAMEKAR (KOTAK SARAN KELURAHAN JAYAMEKAR)	83
LAYANAN ANANDA SEHAT (Layanan Akta Kelahiran Anda Melalui Daring, Segera – Mudah dan Cepat)	85
PETI KEMAS (PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI KELUAR MASUK SURAT)	96
Layanan KITA CERDAS (Layanan Kartu Identitas Anak-Cepat Secara Daring Dan Sempel)	94
Website Covid 19 Pemerintah Kota Sukabumi	112
POWER (Promosi Online Pariwisata Tersebar Berkelanjutan)	87
Sukabumi Creative Hub	82
INFAK TABAROK (TABUNGAN BAROKAH)	66
Pojok Budaya	64
Cahaya Museum	75
Small City Museum	105
Revitalisasi Gotong Sisig	65
RIJARI (Periksa Jantung Sendiri)	103
Map Information City Of Sukabumi	92
JAPATI KENCANA (Jaringan Akses Pelayanan Terintegrasi Keluarga Berencana)	95
SI PINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar)	88
Sistem Informasi Geografis Kota Sukabumi (SiGenKo)	97
E-PERFORMANCE	90
Catur Cerdas Cermat	60

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Cerita Dongeng Online (CENDOL)	79
Competency Development Need Analysis (cDNA)	93
Cinderamata.com	90
SIJIMAT (SIAP JEMPUT PERIZINAN MASYARAKAT)	84
BEAS PERELEK	81
LEGIT (Lansia Energik dan Produktif)	81
KRIWIL	84
MODal Cinta TiDAk CUKUP (MOCIDAKU)	94
WAYANG SUKU RAGA Versi ANDROID	82
SIMANIS (akSI MAsyarakat ciNta hidup Sehat)	56
CIBER (CIBEUREUM BERAKSI)	65
TERAS TETANGGA	74
ELING (Edukasi Keliling)	78
RUTAN BESI (Rumah Tangga Bebas Polusi)	69
SiEdan (Sisten Informasi Elektronik Data Bencana)	94
e-Moetan (elektronik monitoring pelaksanaan kegiatan)	103

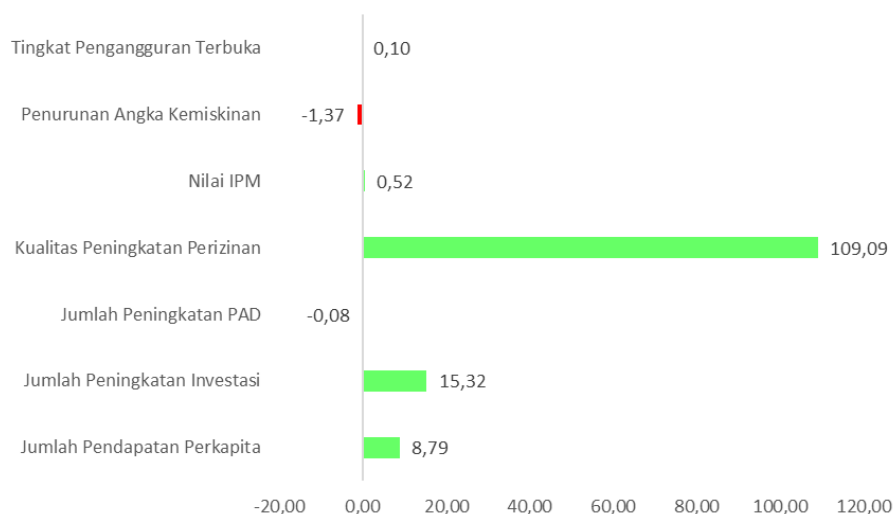
M. KOTA TASIKMALAYA



Gambar 133 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Tasikmalaya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Tasikmalaya memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 11% di mana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



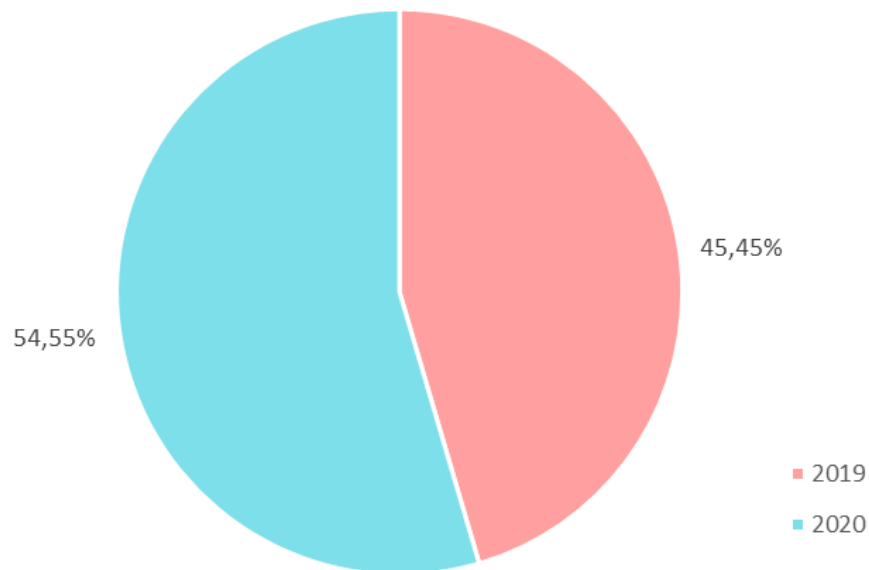
Gambar 134 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tasikmalaya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Tasikmalaya telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data menunjukkan adanya perbaikan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami naik sebesar 8,79% yang mana nilai ini lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Kedua, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,10%. Angka tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Ketiga, indikator Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1,37%, sebenarnya angka tersebut masih dibawah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,52, di mana nilai tersebut lebih dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 109,09%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 15,32% di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sebesar 0,08%, yang jauh masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

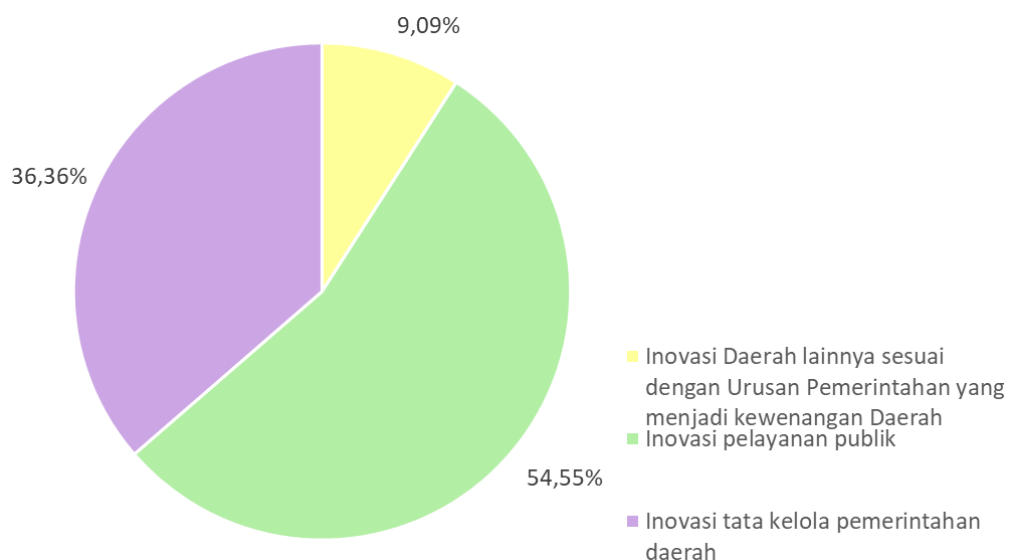
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 135 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Tasikmalaya telah diterapkan sejak tahun 2020 yaitu sebanyak 6 (54,55%) sedangkan 5 inovasi (45,45%) merupakan inovasi yang diterapkan pada tahun 2019.

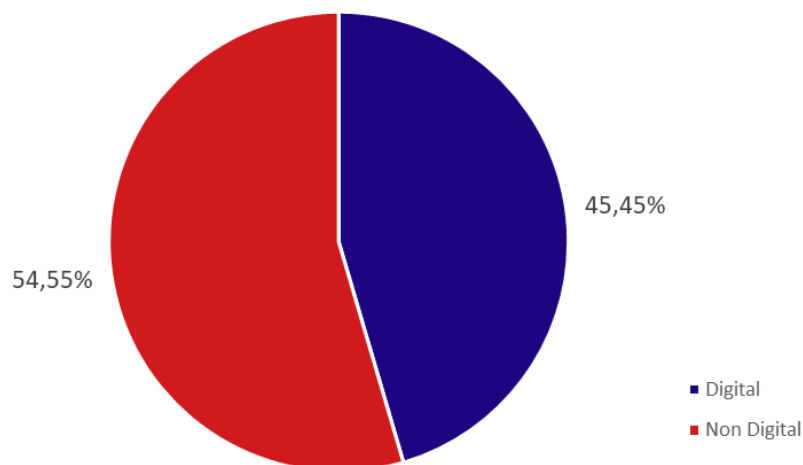
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 136 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 6 (54,55%) inovasi kemudian 4 inovasi (36,36%) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 1 (9,09%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

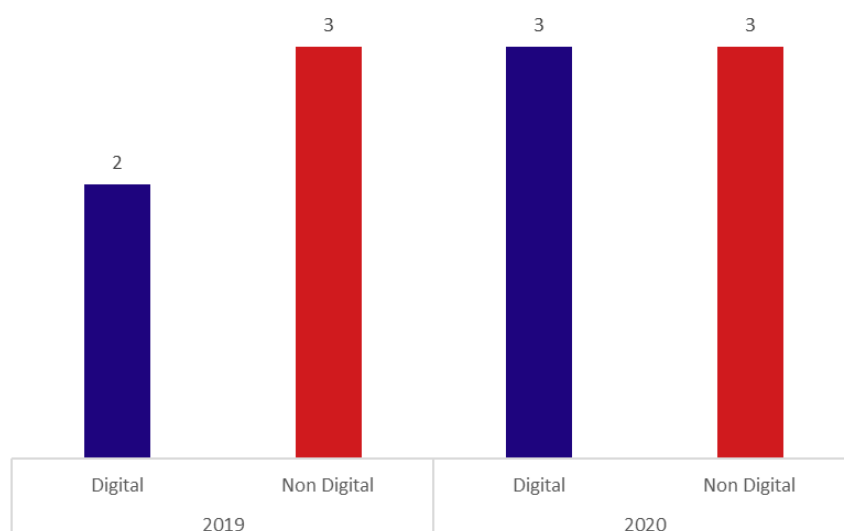
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 137 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 6 (54,55%) yang dilaporkan Kota Tasikmalaya merupakan inovasi non-digital. 7 inovasi (45,45%) merupakan inovasi digital dan tidak ada inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun 2021.

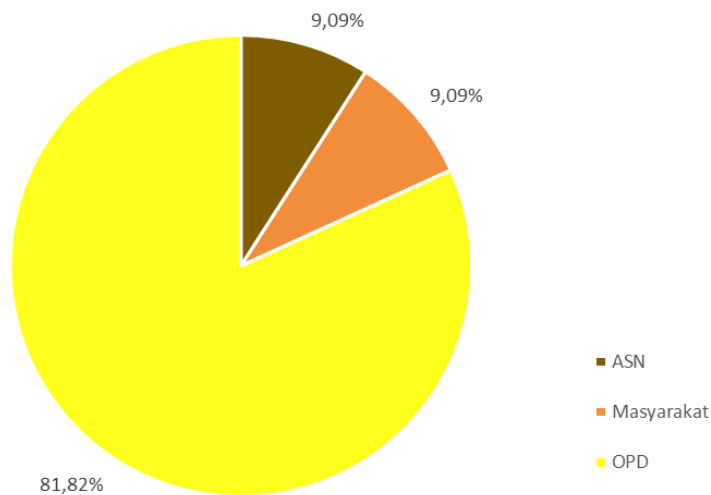
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 138 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Tasikmalaya

Seluruh inovasi Kota Tasikmalaya dilaporkan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 diterapkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diukur perkembangan jumlah inovasi non digital dan digital pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

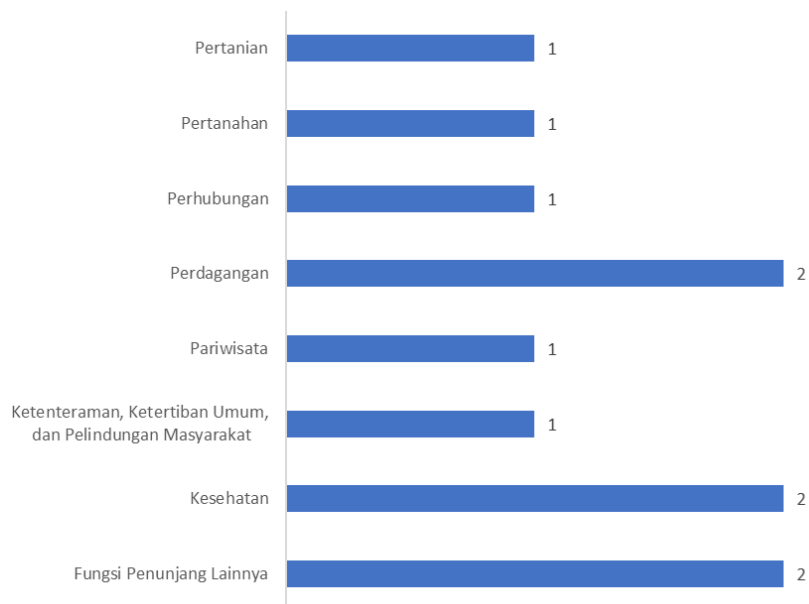
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 139 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Tasikmalaya

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 diinisiasi oleh Masyarakat, yaitu sejumlah 4 (57,14%) inovasi sementara masing-masing 1 (14,29%) inovasi diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

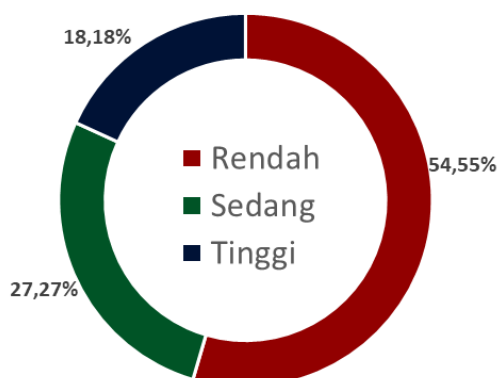


Gambar 140 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Tasikmalaya

Sebaran inovasi daerah pada Kota Tasikmalaya berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Perdagangan, Kesehatan, dan Fungsi Penunjang Lainnya dengan masing-masing 2 inovasi. Dari sebaran inovasi

daerah tersebut, ada 2 urusan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu kesehatan dan trantibumlinmas.

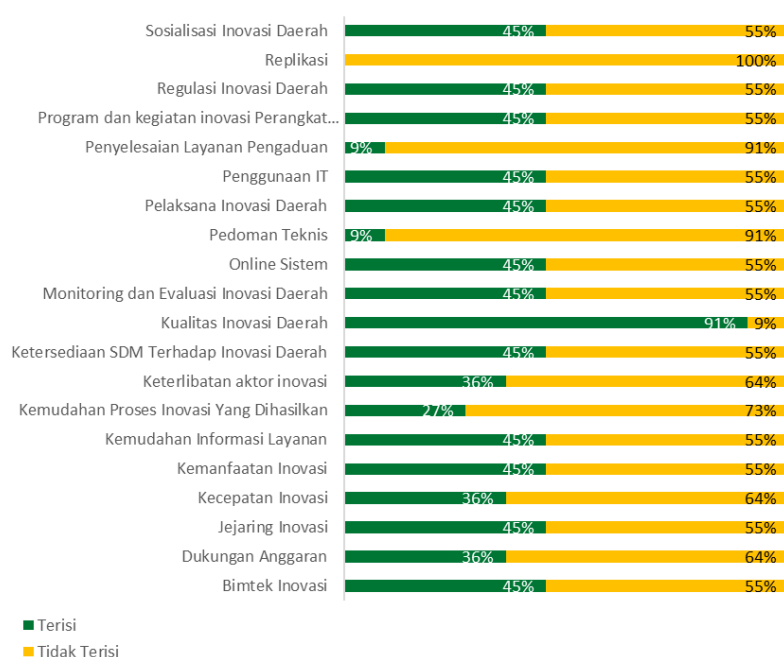
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 141 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Tasikmalaya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi tergolong dalam skor kematangan rendah yaitu sebanyak 6 (54,55%) inovasi kemudian rentang skor kematangan sedang terdapat 3 (27,27%) inovasi dan terakhir 2 inovasi (18,18%) lainnya mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

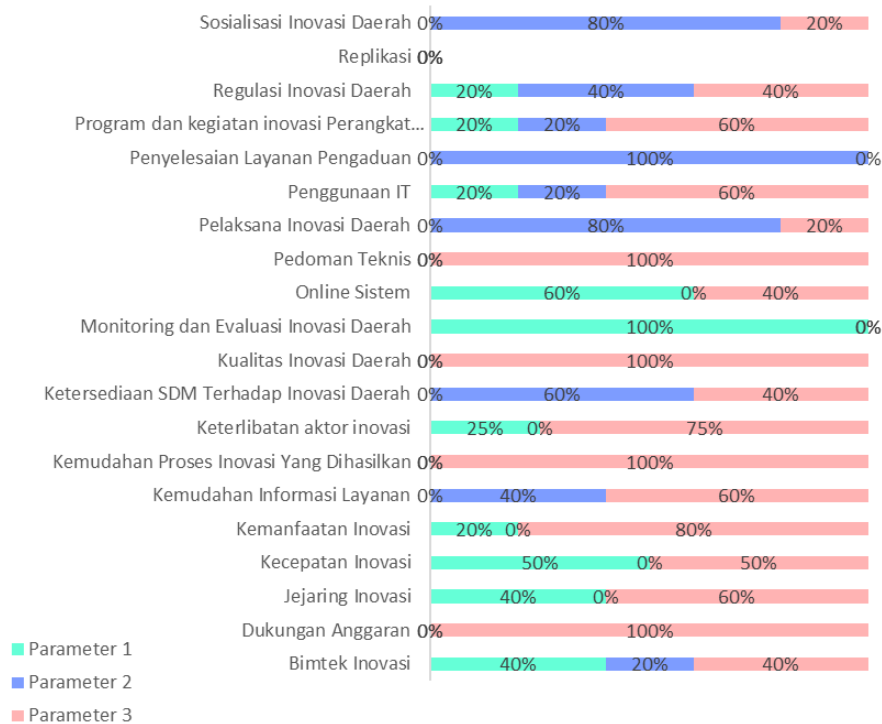


Gambar 142 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya

Dari inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 39,55% sedangkan 60,00% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian tertinggi 91%, yaitu Kualitas Inovasi daerah. Artinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sukabumi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 143 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan sebesar 100%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

Tabel 14 Daftar Inovasi Kota Tasikmalaya beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	15
Penerapan New Normal Sektor Toko Swalayan di Asia Plaza Tasikmalaya	15
Penerapan New Normal Sektor Pasar Rakyat di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya	15
penerapan standar pelayanan covid 19 di rumah makan	15
Tatanan Budaya Hidup Baru dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15
"SILAPAS" SEBAGAI AKSELERASI PENINGKATAN PELAYANAN KETERTIBAN UMUM	68
Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (PROTASIK)	112
BERANDA SAKOTA (Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya).	95
BERANDA SAKOTA (Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya).	98
Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (PROTASIK)	104
(MADU 3) SISTEM INTEGRASI PERTANIAN TERPADU	0

The background is a yellow-tinted photograph of a monument and a building. The monument is a tall, slender, tapered structure with a flame-like top. The building is a classical-style structure with columns and a pediment. The text is overlaid on the image.

BAB III

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pada Provinsi Jawa Barat bagian 2 terdapat 13 Kabupaten /Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Kabupaten Subang

Kabupaten Subang memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 47,05 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Subang melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 57,49 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sukabumi melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 60,19 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sumedang melalui Replikasi inovasi, melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, ekshibisi dan konferensi seminar dan penghargaan inovasi.

D. Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 45,72 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tasikmalaya melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. Kota Bandung

Kota Bandung memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 60,29 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Bandung melalui Replikasi inovasi, melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, ekshibisi dan konferensi seminar dan penghargaan inovasi.

F. Kota Banjar

Kota Banjar memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 46,28 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Banjar melalui bentuk pembinaan

antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. Kota Bekasi

Kota Bekasi memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 51,74 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Bekasi melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. Kota Bogor

Kota Bogor memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 57,80 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bogor melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. Kota Cimahi

Kota Cimahi memiliki predikat daerah sangat inovatif dengan skor 63,76 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi bidang, diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, Bantuan HKI. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Cimahi melalui Replikasi inovasi, melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan inovasi daerah, rapat teknis inovasi provinsi, ekshebis dan konferensi seminar dan penghargaan inovasi.

J. Kota Cirebon

Kota Cirebon memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 43,47 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Cirebon melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

K. Kota Depok

Kota Depok memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 41,52 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Depok melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

L. Kota Sukabumi

Kota Sukabumi memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 55,46 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Sukabumi melalui

bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

M. Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 36,43 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jawa Barat juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Tasikmalaya melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

